

Edisi 1 Juli 2026

UNITED NATIONS *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL*

(PROGRAM PEMBANGUNAN- GLOBAL BERKELANJUTAN)

Laporan Riset Maya Dr.Jan Hoesada, Komite Kerja KSAP

PENDAHULUAN

Makalah ini berpasangan dengan makalah berjudul Negara Gagal, juga dalam edisi 1 Juli 2026 yang sama. Makalah bermuara pada Makalah LAKIP, mohon terbitan ditunggu dengan sabar. Makalah ini terkait pula dengan Makalah Daya Saing Bangsa yang terbit bulan lalu.

Dari sekitar 200 negara dimuka-bumi, NKRI tergolong negara sukses ber SDG versi PBB, dengan sebutan Laporan Voluntary National Review (VNR). Laporan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Republik Indonesia kepada PBB, yang sering disebut sebagai *Voluntary National Review* (VNR), merupakan suplemen (utama) LAKIP tahunan, merinci kemajuan Indonesia dalam mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Laporan *Voluntary National Review* (VNR) Indonesia 2025, yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, telah disampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Juli 2025. Laporan ini merupakan VNR keempat yang disampaikan Indonesia, menunjukkan komitmen kuat terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Ringkasan Laporan VNR Indonesia 2025 kepada PBB

- Disampaikan pada: *High-Level Political Forum* (HLPF) di Markas Besar PBB, New York, pada tanggal 22 Juli 2025.
- Tema: Laporan ini mengangkat tema "Mendorong solusi berkelanjutan, inklusif, berbasis sains dan bukti untuk Agenda 2030 dan SDG-nya agar tidak ada seorang pun yang tertinggal".
- Fokus SDG: VNR 2025 melakukan tinjauan mendalam terhadap lima tujuan prioritas: SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 8 (Pertumbuhan Ekonomi), SDG 14 (Kehidupan di bawah air), dan SDG 17 (Kemitraan).
- Proses Inklusif: Penyusunan laporan melibatkan pendekatan "seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat" (*whole-of-government and whole-of-society*), dengan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil, dan tinjauan independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Capaian: Indonesia mengklaim telah memenuhi 61,4% indikator SDGs dan capaian SDGs Indonesia berada di atas rata-rata global.

Sebagai sekapur-sirih makalah ini, seperti biasa, sekitar 20 tahun terakhir makalah penulis sebagai Komja KSAP disajikan pada situs KSAP di Departemen Keuangan bertujuan untuk (1) mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan daya-saing NKRI, (2) memberi latar-belakang atau bahan masukan memadai bagi KSAP untuk menyusun Standar Akuntansi Kepemerintahan NKRI, (3) memberi dasar bagi pelaku akuntansi kepemerintahan

untuk membukukan berbagai dimensi APBN/D, mendukung raihan LKPP/D berkualitas, (4) sebagai rujukan akademisi dalam menyusun bahan ajar bagi seluruh-pengajar sekolah-dasar sampai dengan S3 jurusan apapun, dan sebagai sumber gagasan riset/karya-akhir akademis, (5) dimaksud untuk memberi kemudahan bagi K/L dan Pemda membuat rencana kerja & pedoman pembangunan daya-saing, dan (6) memberi kesadaran publik untuk mendukung program SDG NKRI, dan penggemar situs KSAP agar mendukung akuntansi-kepemerintahan nan-baik.

Seperti biasa, penulis mengaku bahwa makalah naif-dangkal dibatasi kemampuan penulis dalam memilih dan merangkai berbagai sumber yang dianggapnya afdol, durasi pengumpulan bahan hanya sekitar 3 bulan, sambil selalu mengingatkan sidang-pembaca bahwa banyak sekali sumber bermutu yang mungkin tak terbaca penulis atau sumber yang melarang dirujuk/dikuotasi atau kuotasi-berizin, sehingga sidang pembaca terkasih disarankan mencari info lain dari berbagai sumber yang tak terkuotasi penulis, demi kejayaan NKRI tentu saja.

Program SDG versi PBB merupakan ajang olimpiade prestasi bangsa-bangsa di dunia, berada diatas olimpiade olah-raga dunia. Kemakmuran mencipta atlet, peringkat SDG NKRI berkorelasi positif pada raihan olimpiade olah-raga NKRI. Menurut sahibul hikayat, KTT Bumi 1992 di Rio yang melahirkan Agenda 21, dilanjutkan dengan MDGs (Millennium Development Goals) tahun 2000, dan akhirnya adopsi resmi 17 Tujuan SDGs pada September 2015 melalui Agenda Pembangunan PBB 2030, yang merupakan hasil proses partisipatif global untuk mengatasi tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi secara universal hingga tahun 2030.

Latar Belakang dan Tahap Awal MDG:

1. 1972 (Stockholm Conference): Konferensi ini menjadi awal mula pembahasan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
2. 1992 (Rio Earth Summit): PBB menyelenggarakan konferensi ini, melahirkan Agenda 21, sebuah rencana aksi untuk pembangunan berkelanjutan, serta Deklarasi Rio, Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan Kerangka Perubahan Iklim.
3. 2000 (MDGs): Fokus pada isu sosial seperti pengentasan kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan (8 tujuan).
4. 2012 (Rio+20 Summit): Evaluasi kemajuan MDGs dan menginisiasi pengembangan agenda baru yang lebih komprehensif, yang kemudian mengarah ke SDGs.

Perkembangan Menuju Cita-Cita SDGs versi PBB:

- 2013: Majelis Umum PBB membentuk Kelompok Kerja Terbuka untuk mengembangkan proposal SDGs.
- 2015 (Proses Negosiasi): PBB memulai negosiasi pasca-2015, melibatkan 10 juta orang dari seluruh dunia dalam konsultasi.

Adopsi SDGs:

- 25 September 2015: 193 negara anggota PBB secara resmi mengesahkan SDGs (17 tujuan dan 169 target) sebagai bagian dari Agenda 2030, dengan prinsip utama "tidak meninggalkan seorang pun" (leaving no one behind).

UU NKRI dan Falsafah Negara sejalan dengan tujuan HAM PBB dan selaras 17 Tujuan & 169 Program SDG PBB. Dari 193 negara tersebut, Indonesia telah menyampaikan Laporan Peninjauan Nasional Sukarela (Voluntary National Review/VNR) SDGs keempat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Juli 2025. Laporan tersebut (semoga) telah memuat evaluasi komprehensif 17 Tujuan dan 169 Program SDG mengenai raihan NKRI dan hambatan/tantangan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di

Indonesia. NKRI dengan gagah-berani telah menyampaikan VNR kepada PBB pada tahun 2017, 2019, 2021, dan 2025.

Ringkasan Laporan SDGs Indonesia kepada PBB sbb :

- Penyampaian Laporan: Indonesia secara rutin menyampaikan VNR kepada Forum Politik Tingkat Tinggi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (HLPF). Laporan tahun 2025 merupakan yang keempat, setelah laporan sebelumnya pada tahun 2017, 2019, dan 2021.
- Raihan: Hingga tahun 2024, sekitar 61,4% hingga 62,5% indikator SDGs di Indonesia berada di jalur yang benar atau menunjukkan kemajuan yang moderat. Capaian ini dinilai lebih baik dibandingkan rata-rata global.



- Tantangan: Perhatian khusus diberikan pada sekitar 29,5% indikator yang dinilai stagnan atau bahkan memburuk, memerlukan intervensi kebijakan yang lebih intensif. Tantangan utama meliputi kemiskinan, ketidaksetaraan sosial ekonomi, perubahan iklim, akses kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam.

- Fokus Strategis: Dalam VNR 2025, Indonesia menekankan pembangunan berkelanjutan sebagai komitmen nyata dalam kebijakan dan aksi, bukan sekadar slogan. Hal ini mencakup pemanfaatan hutan tropis dan mangrove, transisi menuju ekonomi hijau dan energi terbarukan, serta pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Laporan VNR Indonesia disampaikan melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Laporan VNR 2021 dapat diakses melalui portal resmi PBB, sementara laporan terbaru tahun 2025 biasanya dipublikasikan di situs web Kementerian PPN/Bappenas atau di portal Pembangunan Berkelanjutan PBB

Sejarah mencatat bahwa SDGs adalah kelanjutan dan perluasan dari MDGs, yang lebih inklusif dan universal, mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi secara terintegrasi untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi semua.

AGENDA MDG

Agenda MDGs (Millennium Development Goals) PBB adalah delapan tujuan pembangunan global yang disepakati tahun 2000 dengan target tahun 2015 untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, kelaparan, penyakit, kurangnya pendidikan, diskriminasi perempuan, serta isu lingkungan dan kemitraan, yang kemudian dilanjutkan dan diperluas oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Delapan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs):

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem: Mengurangi separuh proporsi penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan kelaparan.
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua: Memastikan semua anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan: Menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dan pekerjaan.
4. Menurunkan angka kematian anak: Mengurangi dua pertiga angka kematian anak di bawah usia lima tahun.
5. Meningkatkan kesehatan ibu: Mengurangi tiga perempat rasio kematian ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya: Menghentikan penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan tuberkulosis (TB).

7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup: Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan mengurangi separuh populasi yang tidak memiliki akses air bersih dan sanitasi.
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan: Meningkatkan bantuan pembangunan, mengatasi masalah utang, dan memperluas akses teknologi.

Millennium Development Goals (MDG) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berlangsung dari tahun 2000 hingga 2015, menghasilkan beberapa raihan nyata yang signifikan, terutama dalam hal menyelamatkan nyawa dan pengurangan kemiskinan ekstrem, meskipun pencapaiannya tidak merata secara global.

Raihan nyata MDG PBB meliputi:

- Penurunan Angka Kematian: Minimum terdapat tambahan 21 juta jiwa terselamatkan berkat kemajuan yang dipercepat di luar tren pra-MDG dalam hal angka kematian anak, angka kematian ibu, serta penanganan HIV/AIDS dan tuberkulosis.
- Pengurangan Kemiskinan Ekstrem: Target untuk mengurangi separuh proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem (kurang dari \$1 per hari, disesuaikan kemudian) secara global tercapai, terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dan India.
- Peningkatan Akses Pendidikan Dasar: Partisipasi sekolah dasar meningkat dari 80% menjadi 91% di wilayah berkembang antara tahun 1990 dan 2015, meskipun penekanannya terkadang mengorbankan kualitas atau pendidikan menengah.
- Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi: Terdapat kemajuan besar dalam meningkatkan akses terhadap sumber air minum yang lebih baik dan sanitasi yang layak (tanpa statistik raihan).
- Peningkatan Akses Teknologi: Pada tahun 2015, sekitar 95% populasi global telah tercakup oleh minimum oleh jaringan seluler 3G, dan 43% memiliki akses internet, menunjukkan kemajuan dalam target kemitraan global.
- Fokus Global: MDG berhasil memfokuskan perhatian dunia dan sumber daya dunia pada kebutuhan negara-negara termiskin dan memobilisasi bantuan serta komitmen dari negara-negara maju.

Meskipun terdapat raihan nyata tersebut, MDG juga menghadapi kritik karena pendekatannya yang dianggap "dipaksakan" kepada negara berkembang, hanya berlaku untuk negara-negara di belahan bumi selatan, dan keberhasilannya tidak dirasakan secara merata di seluruh dunia. Kelemahan-kelemahan ini kemudian mengarah pada perancangan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang lebih komprehensif dan inklusif untuk periode pasca-2015

AGENDA SDG

Dari MDGs ke SDGs: Setelah tahun 2015, agenda MDGs diganti oleh agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), sebuah paket Pembangunan Berkelanjutan Global yang memiliki 17 tujuan sebagai perluasan tujuan MDG. Pemerintah NKRI menggunakan cetak-biru SDG PBB sebagai salah-satu sumber-gagasan bahan kebijakan utama untuk merealisasikan tujuan bernegara NKRI cq Konstitusi & UUD NKRI.

Agenda SDG PBB (*Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah sebuah agenda menuju tahun 2030, sebuah cetak biru global yang berisi 17 tujuan dengan 169 target yang disepakati PBB untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi planet bumi pada tahun 2030, mencakup isu sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik bagi semua.

Berikut adalah daftar 17 Tujuan SDGs yang saling terkait:

1. Tanpa Kemiskinan (No Poverty)
2. Tanpa Kelaparan (Zero Hunger)
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-being)
4. Pendidikan Berkualitas (Quality Education)
5. Kesetaraan Gender (Gender Equality)
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (Clean Water and Sanitation)
7. Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy)
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth)
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure)
10. Mengurangi Kesenjangan (Reduced Inequalities)
11. Kota dan Komunitas Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities)
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production)
13. Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action)
14. Kehidupan Bawah Air (Life Below Water)
15. Kehidupan di Darat (Life on Land)
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace, Justice and Strong Institutions)
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals)

169 TARGET SDG 2030

Berikut adalah 169 Target SDG 2030. SumberKompas.Com, : <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/04/160000486/daftar-169-target-sdgs>, menjelaskan 169 target SDG 2030 sbb :

1. Sasaran Tanpa Kemiskinan.

Ambisi akbar tersebut perlu ditangani paling sedikit sebuah Menko, berbagai negara mungkin membentuk kementerian khusus memerangi kemiskinan yang bersifat multi-dimensi. Sebab/akar kemiskinan adalah konstitusi-demokrasi diambil alih (kudeta ?) pemerintahan otokratis & kleptokras nir-demokrasi & nir-GCG dilamari ribu-tahun watak-genetis seperti budaya malu & malas bukan budaya kebenaran & keadilan, budaya maling-korupsi, budaya pengecut dan budaya keroyokan (sebaliknya dari budaya ksatria), budaya suka-menzalimi nan sewenang-wenang & kekerasan, budaya kasar-brutal, budaya oportunistis pembohong/penipu dan budaya suka akan ketidak-adilan antara lain ketidak-adilan gender atau SARA, serta rerata pendidikan amat rendah. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dollar AS per hari.



- Pada tahun 2030, program berhasil mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- Program berhasil menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

- Pada tahun 2030, sasaran ini ingin menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.



- Pada tahun 2030, program ini diharapkan berhasil membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

2. Sasaran Dunia tanpa Tanpa Kelaparan

Sebab/akar kelaparan adalah konstitusi-demokrasi diambil alih pemerintahan otokratis kleptokras nir-demokrasi & nir-GCG dilambari ribu-tahun budaya malu & malas, budaya maling-korupsi, budaya suka-menzalimi nan sewenang-wenang & kekerasan, budaya kasar-brutal, budaya oportunist pembongong/penipu dan budaya suka akan ketidak-adilan antara lain ketidak-adilan gender atau SARA, serta rerata pendidikan amat rendah. Apartheid gender menyebabkan bangsa kehilangan 50% SDM nya, dan dipastikan selalu kalah bersaing di bidang apapun dengan bangsa-lain.

- Pada tahun 2030, program PBB berhasil menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
- Pada tahun 2030, program PBB berhasil menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
- Pada tahun 2030, program PBB berhasil menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.
- Pada tahun 2030, PBB berharap berhasil membangun sistem produksi pangan global yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

- Pada tahun 2020, PBB berharap telah mampu mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.



3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

- Pada tahun 2030, PBB diharapkan mencapai target mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
- Pada tahun 2030, PBB berharap mampu mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan target seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.
- Pada tahun 2030, PBB bertujuan mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
- Pada tahun 2030, PBB bertekad mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
PBB berharap berhasil memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
- Pada tahun 2020, PBB berharap mampu mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.
- Pada tahun 2030, PBB bertekad untuk menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. PBB mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
- Pada tahun 2030, PBB berharap secara signifikan dapat mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

4. Pendidikan Berkualitas

- Pada tahun 2030, PBB ingin menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan *pendidikan dasar dan menengah* tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- Pada tahun 2030, PBB ingin menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
- Pada tahun 2030, PBB ingin menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
- Pada tahun 2030, PBB berharap berhasil meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
- Pada tahun 2030, PBB bertekad menghilangkan senjang/disparitas gender dalam pendidikan di muka-bumi, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

- Pada tahun 2030, PBB ingin menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
- Pada tahun 2030, PBB berharap mampu menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.

5. Program Kesetaraan Gender versi PBB

Terdapat banyak negara yang menerapkan hukum-adat dan/atau hukum ketidaksetaraan gender sehingga tugas SDG 3 PBB bukanlah sebuah tugas ringan, karena azas kemerdekaan internal diatur oleh masing-masing negara berdaulat. Masih banyak terdapat perbedaan gender untuk akses kependidikan-formal dan pekerjaan formal, hukum waris, kemerdekaan memilih pasangan hidup, kemerdekaan untuk menolak tugas reproduksi dan layanan seksual kepada pasangan hidup resmi, berbasis hukum adat dan/atau hukum positif.

- PBB bermaksud mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
- PBB bermaksud menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, poligami tak bertanggungjawab serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- PBB bermaksud menghapuskan semua praktik berbahaya terhadap wanita, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
- Dunia menjadi mampu mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
- Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
- Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kelestarian mata-air bersih di jaga oleh Kabinet. Di bumi, hanya sekitar 1-2,5% air yang merupakan air tawar, dan dari jumlah itu, sebagian besar terkunci di gletser atau lapisan es; artinya, hanya kurang dari 1% dari total air bumi yang benar-benar tersedia sebagai sumber air bersih yang dapat diminum (sungai, danau, air tanah), yang jumlahnya sangat terbatas dan menghadapi tantangan besar akibat pencemaran, pertumbuhan penduduk, serta perubahan iklim, membuat sebagian besar penduduk dunia tidak memiliki akses air bersih layak.

- Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

- Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
- Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dampak pembuangan dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
- Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor kehidupan, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
- Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
- Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

7. Tujuan kesetaraan gender.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 tentang kesetaraan gender merupakan tujuan ke-5 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan ini didirikan dan diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 yang memiliki tujuan “mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan”.

- Kesetaraan gender dalam tujuan ini berfokus pada pemberdayaan perempuan, mendorong realisasi potensi dan bakat perempuan untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki.
- Untuk mencapai hal tersebut, tujuan ini berfokus untuk mengeliminasi diskriminasi dan kekerasan dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini, dan praktik sunat perempuan.
- Hal tersebut kemudian mengarahkan pada akses hak kesehatan seksual dan reproduksi.
- Lebih jauh, tujuan ini menekankan kebutuhan untuk menjamin hak perempuan dalam mengakses sumber daya produktif dan berpartisipasi secara setara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, serta dalam pengambilan keputusan baik di sektor publik maupun swasta.
- Tujuan 5 atau Kesetaraan Gender merupakan bagian dari dimensi atau pilar sosial dalam pembangunan manusia.
- Selain itu, tujuan ini juga memiliki peran lintas pilar dan lintas tujuan sehingga menjadi aspek strategis dalam mencapai keseluruhan tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Tujuan ini memiliki 9 target dan 14 indikator. Terdapat enam target hasil dan tiga target implementasi atau cara kerja. Target hasil, meliputi pengakhiran diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak perempuan; kekerasan dan eksploitasi; praktik berbahaya seperti pernikahan dini dan sunat perempuan; meningkatkan apresiasi pekerjaan rumah tanpa upah; partisipasi penuh perempuan dalam kepemimpinan; serta akses ke hak reproduksi dan kesehatan.
- Sedangkan target implementasinya atau cara kerjanya, mencakup pemberian hak yang sama atas sumber daya ekonomi dan kepemilikan untuk perempuan; pemberdayaan

melalui teknologi; dan penguatan kebijakan kesetaraan gender dengan dukungan legislasi.

- Meskipun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 5 adalah kerangka utama PBB untuk kesetaraan gender, beberapa badan dan program PBB mengimplementasikan inisiatif spesifik di luar kerangka SDGs yang lebih luas, atau yang mendahului SDGs itu sendiri, yang semuanya mendukung tujuan SDG 5.

8. Energi Bersih dan Terjangkau

- Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
- Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.
- Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.

9. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

- Mempertahankan / meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
- Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
- Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
- Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan *the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production*, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.
- Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak. manusiawi, terhormat bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
- Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
- Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk buruk tenaga-kerja usia anak-anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.
- Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam sektor pekerjaan berbahaya.
- Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
- Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

- Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
- Mempromosikan industrialisasi nan-inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
- Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terutama akses terhadap fasilitas / jasa keuangan, termasuk kredit nan-terjangkau rakyat miskin, dan mengintegrasikan industri ke dalam rantai nilai dan pasar.
- Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkembang-berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi teknologi produksi barang/jasa, pembangunan proses industri bersih/ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.
- Memperkuat riset ilmiah bangsa, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja-penelitian & pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik (APBN) dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

10. Berkurangnya Kesenjangan.

- Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
- Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
- Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.
- Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.
- Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.
- Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.
- Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.

11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

- Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

- Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.
- Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.
- Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.
- Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang tertimpa bencana / penyakit, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
- Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
- Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

- Melaksanakan *the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns*, dengan semua negara mengambil tindakan penyempurnaan pola produksi nasional dan konsumsi nasional, dipandu negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang tersebut.
- Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber-daya-alam secara efisien.
- Pada tahun 2030, berhasil mengurangi hingga setengah limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca-panen.
- Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
- Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali substansi yang di buang. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik pelestarian - berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi sukses melaksanakan program keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.
- Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
- Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

13. Penanganan Perubahan Iklim

- Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
- Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.
- Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.

14. Pelestarian Ekosistem Lautan.

- Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.
- Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.
- Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak lingkungan-hidup, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.
- Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.
- Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.
- Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.

15. Pelestarian Ekosistem Daratan.

- Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
- Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, melaksanakan restorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.

- Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.
- Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk kandungan keanekaragaman hayati hutan-primer, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.
- Melakukan tindakan nan-segera/cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati hutan-primer, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.
- Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.
- Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna brharga/langka yang dilindungi serta mengatasi cq membasmi pasar, permintaan dan pasokan produk fauna/flora dalam hidupan liar secara ilegal.
- Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis elemen- asing invasif pada ekosistem darat dan air, seperti industrialisasi perkebunan yang memusnahkan hutan-primer, limbah industri nan-berbahaya, serta mengendalikan atau memberantas jenis elemen-asing invasif sebagai prioritas. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.

16. Pembangunan Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Bersih & Tangguh.

- Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
- Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi manusia, perdagangan/penyelundupan manusia, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap perempuan & anak.
- Meningkatkan kesadaran negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
- Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun aliran senjata, menguatkan sistem pemulihan & pengembalian aset curian, memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.
- Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
- Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
- Menjamin pengambilan keputusan berbangsa/bernegara yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan masyarakat.
- Memperluas / meningkatkan partisipasi negara-berkembang di dalam lembaga tata kelola global, misalnya PBB..
- Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah berlegitimasi-hukum bagi semua aspek-kehidupan bermasyarakat, termasuk pencatatan kelahiran.

17. Pembangunan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Kamakmuran.

- Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
- Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance – ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto

untuk bantuan pembangunan ODA/GNI bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.

- Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.
- Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.
- Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.
- Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
- Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.
- Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
- Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular. Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.
- Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.
- Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.
- Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan. Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.
- Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

- Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.
- Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.
- Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

RINCIAN AGENDA SDG

1. AGENDA MENGHAPUS KEMISKINAN GLOBAL

Agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memerangi kemiskinan dicanangkan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Pertama, yaitu Tanpa Kemiskinan (No Poverty) bertema "Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan di mana pun pada tahun 2030".

Target Utama SDG 1 adalah

- Memberantas kemiskinan ekstrem: Mengakhiri kondisi hidup masyarakat yang pendapatannya di bawah ambang batas kemiskinan internasional (saat ini ditetapkan sekitar \$1,90 per hari).
- Mengurangi kemiskinan multidimensi: Mengurangi setidaknya separuh proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan dalam segala dimensi (misalnya, kurangnya akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan air bersih), sesuai dengan definisi nasional.
- Menerapkan sistem perlindungan sosial: Menciptakan sistem dan langkah-langkah perlindungan sosial yang sesuai secara nasional untuk semua, termasuk jaminan pendapatan dasar bagi kelompok rentan.
- Menjamin akses yang sama: Memastikan semua orang, terutama kelompok miskin dan rentan, memiliki hak yang sama atas sumber daya ekonomi, layanan dasar, kepemilikan lahan, dan teknologi.
- Meningkatkan ketahanan: Membangun ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap guncangan dan bencana terkait iklim, ekonomi, dan lingkungan lainnya.

Implementasi di Indonesia

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 1, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk, melibatkan berbagai kementerian/lembaga (K/L) di Indonesia yang berkoordinasi di bawah Kementerian PPN/Bappenas selaku koordinator nasional SDGs.

Beberapa K/L utama yang terlibat program pengentasan kemiskinan meliputi terutama :

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas: Berperan sebagai koordinator utama yang menyusun kerangka kebijakan, strategi, dan rencana aksi

nasional untuk pencapaian SDG 1. Bappenas juga mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya.

- Kementerian Sosial (Kemensos): Bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan sosial dan bantuan sosial yang ditargetkan untuk masyarakat miskin dan rentan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Terlibat dalam aspek pendanaan dan alokasi sumber daya. Melalui Special Mission Vehicle (SMV) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Kemenkeu mengelola platform SDG Indonesia One untuk mobilisasi pendanaan infrastruktur yang mendukung target SDGs, termasuk yang berkaitan dengan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT): Fokus pada pembangunan infrastruktur pedesaan dan pemberdayaan ekonomi lokal untuk mengurangi kemiskinan di daerah tertinggal.
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker): Berperan dalam program pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga miskin.

Secara umum, tugas K/L NKRI terkait SDG 1 adalah mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk:

- Memberantas kemiskinan ekstrem (hidup dengan kurang dari \$1.90 per hari).
- Menyediakan akses setara terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi.
- Membangun ketahanan masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, bencana alam, dan perubahan iklim.
- Memastikan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan layanan keuangan, termasuk keuangan mikro.

Setiap K/L mengintegrasikan tupoksi terkait dengan target SDG 1, ke dalam rencana kerja dan kebijakan sektoral masing-masing K/L untuk mencapai tujuan nasional "tanpa kemiskinan" pada tahun 2030.

Pemerintah Indonesia, melalui SDG 1, mengimplementasikan tujuan SDG 1i ke dalam berbagai program nasional, seperti:

- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Pengembangan infrastruktur pedesaan dan program dana desa untuk mengurangi ketimpangan wilayah

Indonesia menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem lebih cepat dari 2030, yaitu mencapai kemiskinan 0% pada tahun 2024, mendahului target global 2030. Pemerintah Indonesia menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, bukan kemiskinan secara keseluruhan. Target ini merupakan komitmen dari Presiden Jokowi, namun data terbaru per Maret 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat 2,38 juta orang dalam kategori miskin ekstrem.



Kriteria kemiskinan ekstrem adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, akses informasi) dengan patokan pengeluaran di bawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu sekitar Rp10.739 per orang per hari atau Rp322.170 per bulan (standar Bank Dunia USD 1.9 PPP), serta indikator multidimensi seperti akses sanitasi layak yang rendah, pendidikan rendah, dan kerentanan terhadap masalah kesehatan atau disabilitas.

Berikut adalah rincian kinerja dan target terkait kemiskinan di Indonesia:

- Target Awal (2024): Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada akhir tahun 2024. Berbagai program percepatan telah dilaksanakan, seperti pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan fokus pada wilayah kantong kemiskinan.
- Realisasi 2024: Realisasi kemiskinan ekstrem pada Maret 2024 tercatat sekitar 0,83% atau sekitar 2,3 juta orang.
- Data Terbaru 2025: Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, persentase penduduk miskin secara nasional adalah 8,47%, yang setara dengan 23,85 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan dari September 2024 (8,57%) dan Maret 2024. Sementara itu, jumlah penduduk miskin ekstrem per Maret 2025 adalah 2,38 juta orang.
- Target 2026: Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati target kemiskinan ekstrem untuk tahun 2026 berada di rentang 0% hingga 0,5%, merevisi target nol persen absolut yang sebelumnya dicanangkan.

Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan angka kemiskinan, target untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2024 belum sepenuhnya tercapai berdasarkan data awal 2025. Pemerintah terus berupaya mengintensifkan program-program penanggulangan kemiskinan dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga..

2. AGENDA MENGHAPUS KELAPARAN DI MUKA-BUMI

Berbagai laporan menunjukkan bahwa jutaan warga rentan atau menderita kelaparan, dengan angka bervariasi dari 19-45 juta jiwa tergantung sumber (ADB, FAO, Kementan) dan periode data, serta skor *Global Hunger Index* (GHI) Indonesia masuk kategori sedang, peringkat tinggi di ASEAN. Beberapa tahun lalu, ada data sekitar 19,4 juta orang kelaparan (2015) atau 22 juta (2019), sementara 2024 menyebut 19-45 juta warga berpotensi terdampak krisis pangan jika produksi tidak digenjut.

Agenda PBB untuk menghapus kelaparan adalah SDG 2: Tanpa Kelaparan (Zero Hunger), yang bertujuan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan pada tahun 2030, melalui target seperti memastikan akses makanan aman, mengakhiri semua bentuk malnutrisi, menggandakan produktivitas petani kecil, serta menerapkan sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan, seperti yang dilansir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia, UN World Food Programme (WFP), dan Satu Data Demak.

Target Utama SDG 2 (Zero Hunger) Global

- Mengakhiri Kelaparan: Memastikan semua orang, terutama yang miskin dan rentan, memiliki akses sepanjang tahun ke makanan yang aman, bergizi, dan cukup.
- Mengakhiri Semua Bentuk Malnutrisi: Menangani kekurangan gizi kronis (stunting, wasting) dan masalah gizi berlebih (obesitas).
- Pertanian Berkelanjutan: Menerapkan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan praktik pertanian yang tangguh untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan produsen makanan skala kecil.

- Investasi dan Riset: Meningkatkan investasi di infrastruktur pedesaan, layanan pertanian, dan penelitian untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian.
- Perdagangan yang Adil: Mengatasi distorsi di pasar pertanian global dan mencegah subsidi ekspor yang merugikan.

Faktor Penyebab Kelaparan Global

- Kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi.
- Konflik dan ketidakstabilan pemerintahan.
- Perubahan iklim dan degradasi lingkungan.
- Akses yang tidak setara terhadap sumber daya.

Peran Berbagai Pihak

- PBB dan Lembaga Terkait: Memberikan dukungan teknis, pengembangan kapasitas, dan advokasi kebijakan (misalnya, WFP, FAO).
- Pemerintah: Mengembangkan kebijakan pro-ketahanan pangan dan mendukung petani.
- Masyarakat: Mendukung petani lokal, mengurangi limbah makanan, dan berpartisipasi dalam inisiatif sosial.

Kinerja NKRI

SDG 2, yang bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, melibatkan koordinasi dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) di Indonesia

Beberapa K/L utama yang terlibat dalam pelaksanaan SDG 2 di Indonesia meliputi:

- Kementerian sosial: Bertanggungjawab untuk menghapus kelaparan.
- Kementerian Pertanian (Kementan): Bertanggung jawab langsung atas produksi pertanian, peningkatan produktivitas petani skala kecil, dan pengembangan pertanian berkelanjutan.
- Badan Pangan Nasional (NFA): Berfokus pada penanganan kerawanan pangan, stabilitas harga pangan, dan pengelolaan cadangan pangan.
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes): Memiliki peran penting dalam perbaikan gizi masyarakat, termasuk upaya pencegahan stunting dan malnutrisi lainnya, yang sejalan dengan target SDG 2.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Terlibat dalam perumusan kebijakan makro terkait ketahanan pangan dan transformasi sistem pangan agar lebih efisien dan tangguh.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas: Berperan sebagai koordinator utama dalam perencanaan dan pemantauan pencapaian seluruh target SDGs di tingkat nasional, termasuk SDG 2.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa): Fokus pada implementasi program ketahanan pangan dan perbaikan gizi di tingkat desa melalui program SDGs Desa.
- Badan Pusat Statistik (BPS): Bertugas menyediakan data dan indikator terkait prevalensi kekurangan gizi dan kerawanan pangan untuk memantau kemajuan target SDG 2.

Pencapaian SDG 2 membutuhkan kolaborasi intensif lintas K/L dan pemerintah daerah, serta melibatkan berbagai pihak lain seperti para dermawan, pelaku usaha, organisasi masyarakat, akademisi, dan pakar.

Laporan Serikat Petani Indonesia (SPI) pada Agustus 2025 menyoroti bahwa target penurunan angka kelaparan masih jauh dari harapan dan menyerukan solusi reformasi agraria dan kedaulatan pangan.

- Data lain menunjukkan Indonesia berada di peringkat 77 dari 127 negara dalam Global Hunger Index (GHI).
- Laporan resmi Global Hunger Index (GHI) terbaru adalah tahun 2024, yang menunjukkan Indonesia berada di peringkat 67 dari 127 negara dengan skor 16.9 (kelaparan sedang), namun masih tertinggi ketiga di ASEAN
- Untuk tahun 2025, belum ada laporan GHI lengkap, tetapi laporan lain seperti FAO dan WFP (Program Pangan Dunia) mengindikasikan tantangan kelaparan akut global masih tinggi akibat konflik, ekonomi, dan iklim, dengan peringatan bahwa banyak orang di 2025 masih sulit mengakses makanan sehat, meskipun ada tren perbaikan di beberapa wilayah.

Butir Penting dari Laporan Terkait 2025:

- FAO (2025): 43.5% orang Indonesia tidak mampu membeli makanan sehat, terutama karena harga protein tinggi, menurut laporan *The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025*.
- WFP (2025): Kelaparan akut tetap mengkhawatirkan di 2025, dengan 343 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut, terutama di Sudan dan Gaza.
- Global Report on Food Crises (GRFC) 2025: Menunjukkan lebih dari 295 juta orang di 53 negara mengalami kelaparan akut pada 2024, dipicu konflik dan guncangan ekonomi.

Tren GHI 2024 (Acuan Terbaru):

- Indonesia skor 16.9 (kategori "sedang"), menurun dari tahun sebelumnya, namun masih tinggi di Asia Tenggara.
- Indikator GHI mencakupi: kekurangan gizi, stunting, wasting, dan kematian anak.

Tantangan di Indonesia (Menjelang GHI 2025):

- Inflasi & Daya Beli: Kenaikan harga pangan melemahkan daya beli.
- Ketergantungan Impor: Membuat harga pangan tinggi.
- Risiko Iklim: Bencana alam mengancam ketahanan pangan.

3. AGENDA KESEHATAN & KESEJAHTERAAN

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kesehatan dan kesejahteraan berkualitas terangkum dalam Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*). Tujuan ini berfokus pada penjaminan kehidupan yang sehat dan peningkatan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

Tanggung jawab utama untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera, di Indonesia diemban oleh beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) dengan tugas dan peran spesifik.

K/L utama yang terlibat meliputi:

- Kementerian Kesehatan (Kemenkes): Merupakan pemimpin dan koordinator utama dalam perumusan kebijakan dan implementasi program kesehatan nasional. Kemenkes bertanggung jawab atas peningkatan akses pelayanan kesehatan berkualitas, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta jaminan kesehatan nasional melalui program JKN.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK): Bertugas mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan

pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pembangunan manusia dan kebudayaan, yang mencakup aspek kesehatan dan kesejahteraan.

- Kementerian PPN/Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional): Berperan sebagai koordinator perencanaan pencapaian SDGs di tingkat nasional, termasuk mengintegrasikan target SDG 3 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan: Bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan kesehatan universal di Indonesia, yang merupakan target kunci dalam SDG 3 (Target 3.8).
- Kementerian Sosial (Kemensos): Terlibat dalam aspek kesejahteraan sosial, termasuk perlindungan kelompok rentan dan penanganan masalah kesehatan mental dalam konteks kesejahteraan sosial.
- Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota): Melalui Tim Koordinasi Daerah (TKD) SDGs, pemerintah daerah bertanggung jawab mengimplementasikan program-program kesehatan dan kesejahteraan di tingkat lokal, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik daerah masing-masing.

Secara kolektif, K/L ini bekerja sama untuk mencapai target SDG 3, yang mencakup pengurangan angka kematian ibu dan bayi, pemberantasan epidemi, penanganan penyakit tidak menular, dan penyediaan akses universal terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Tujuan 3 mencakup berbagai prioritas kesehatan global dan nasional, yang diintegrasikan ke dalam satu agenda komprehensif. Fokus-fokus utamanya meliputi:

- Kesehatan Ibu dan Anak: Menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas bagi ibu dan anak, termasuk kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- Pencegahan Penyakit Menular: Berupaya mengakhiri epidemi penyakit menular tertentu seperti AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan lainnya.
- Pencegahan Penyakit Tidak Menular: Mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan.
- Kesehatan Mental dan Kesejahteraan: Meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan sebagai bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan.
- Cakupan Kesehatan Universal (UHC): Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan esensial yang berkualitas, serta akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua.
- Penguatan Sistem Kesehatan: Meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko kesehatan nasional dan global, termasuk kesiapan dan respons terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat.
- Penanganan NAPZA: Melakukan pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (NAPZA).

Implementasi di Indonesia

- Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS): Mendorong masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat.
- Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan: Memperkuat sarana, prasarana, dan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik di tingkat dasar maupun rujukan.
- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Melalui program JKN-KIS, pemerintah berupaya mencapai target UHC.

- Kemitraan Multihak: Melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, akademisi (melalui SDG Center), dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil untuk bersinergi mencapai target SDG.
- Indeks kesehatan dan kesejahteraan di Indonesia pada tahun 2025 diukur melalui berbagai publikasi statistik resmi dan indikator utama yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta dokumen perencanaan strategis dari Kementerian Kesehatan.
 - Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025: Publikasi ini menyajikan potret luas tentang kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025.
 - Statistik Indonesia 2025: Merupakan kompilasi data statistik tahunan yang mencakup berbagai sektor, termasuk indikator kesehatan dan kesejahteraan.
 - Profil Statistik Kesehatan 2025: Data ini juga tersedia melalui berbagai sumber statistik daerah maupun pusat, merinci metrik spesifik kesehatan.

Indikator Kunci Penilaian

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan meliputi:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Indikator keberhasilan pembangunan yang mencakup aspek kesehatan (Angka Harapan Hidup), pendidikan, dan standar hidup layak (daya beli).
- Angka Kesakitan: Data terbaru per November 2025 menunjukkan angka kesakitan Indonesia mencapai 12,66% secara nasional.
- Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan: Indikator ekonomi makro yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.
- Gini Ratio: Mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Arah Kebijakan Pemerintah 2025-2029 sbb :

- Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, sedang mematangkan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025-2029. Dokumen ini menjadi panduan strategis untuk mencapai target kesehatan nasional, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan visi Indonesia Emas 2045.
- Sasaran utama dalam perencanaan ini mencakup peningkatan kesehatan ibu dan anak, percepatan perbaikan gizi masyarakat, dan penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Tema Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025 adalah “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat,” yang menekankan pentingnya kesehatan fisik, dan mental.
- Program Makan Siang Gratis (MBG) bertujuan meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak sekolah serta menstimulasi ekonomi lokal melalui pemenuhan gizi, yang secara langsung berkorelasi dengan peningkatan indeks kesehatan anak (mengatasi gizi buruk/stunting, meningkatkan fokus belajar) dan pertumbuhan ekonomi, dengan target utama SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045, meskipun pelaksanaannya butuh pengawasan ketat soal transparansi anggaran dan kualitas gizi agar manfaat maksimal dan tidak menimbulkan polemik.

Hubungan Program Makan Siang Gratis dengan Indeks Kesehatan

- Peningkatan Gizi: MBG menyediakan makanan bergizi yang diharapkan mengurangi masalah gizi buruk dan stunting, indikator utama indeks kesehatan anak, terutama di kalangan ekonomi rendah.
- Peningkatan Kualitas SDM: Anak yang sehat dan bernutrisi baik akan lebih fokus belajar, meningkatkan prestasi akademik, dan pada akhirnya memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia secara keseluruhan.

- Kesehatan Ibu & Balita: Program ini juga menyoar ibu hamil dan balita, mencegah stunting sejak dini dan memaksimalkan perkembangan otak, yang merupakan fondasi penting indeks kesehatan jangka panjang.

Dampak Ekonomi & Indeks Kesehatan (secara luas)

- Stimulasi Ekonomi Lokal: Bahan baku dipasok dari petani, nelayan, dan UMKM lokal, menggerakkan ekonomi produktif dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- Menciptakan Lapangan Kerja: Melibatkan banyak pekerja di dapur sekolah, menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat UMKM.

Tantangan & Isu

- Anggaran & Efisiensi: Besarnya anggaran (Rp71 triliun di APBN 2025) memicu pertanyaan efisiensi dan pemangkasan sektor lain, serta isu perbedaan harga bahan makanan antar daerah.
- Kualitas & Transparansi: Perlu pengawasan ketat agar gizi sesuai standar dan tidak terjadi kebocoran anggaran atau keracunan makanan, yang dapat merusak tujuan kesehatan program.

4. AGENDA PENDIDIKAN BERKUALITAS

Faktor terpenting yang berpengaruh pada tingkat SDG adalah kualitas dan rerata pendidikan formal bangsa cq rerata ijazah sektor formal. Agenda PBB untuk pendidikan berkualitas adalah SDG 4 (Sustainable Development Goal 4), yang bertujuan memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Tujuannya mencakup akses universal ke pendidikan dasar dan menengah yang gratis, peningkatan literasi dan numerasi, serta pengembangan keterampilan teknis dan vokasional untuk pekerjaan yang layak, dengan penekanan kuat pada kesetaraan dan inklusivitas tanpa memandang latar belakang.

- Akses Universal: Memastikan semua anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, merata, dan gratis.
- Keterampilan Dasar: Mencapai tingkat literasi dan numerasi universal bagi kaum muda dan dewasa.
- Pendidikan Vokasi & Tinggi: Meningkatkan jumlah pemuda dan orang dewasa dengan keterampilan yang relevan untuk pekerjaan, kewirausahaan, dan pendidikan tinggi.
- Kesetaraan: Menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang sama ke semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan.
- Inklusivitas: Menyediakan pendidikan yang adil dan inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.
- Kualitas: Memperbarui kurikulum, meningkatkan kualitas pengajar, dan memastikan infrastruktur yang memadai.

Implementasi & Peran:

- Pemerintah: Menjadikan pendidikan prioritas investasi nasional, menyediakan pendidikan gratis dan wajib, serta memperbaiki infrastruktur.
- Masyarakat: Berpartisipasi aktif dalam kemajuan pendidikan, termasuk dalam adopsi teknologi dan bimbingan bagi yang kurang mampu.
- Organisasi Non-Profit: Memberikan beasiswa dan program pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti yang dilakukan Hoshizora Foundation.

Sebagai kesimpulan, SDG 4 adalah fondasi untuk masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang setara, berkualitas, dan dapat diakses oleh semua orang.

Program Kabinet NKRI

Tugas utama kementerian dan lembaga (K/L) terkait SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) di Indonesia adalah memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Pelaksanaan tugas ini melibatkan kolaborasi berbagai K/L di bawah koordinasi utama dari Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian dan Lembaga yang berperan penting antara lain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Sebagai lembaga utama yang mengurus sektor pendidikan formal, tugas dan peran Kemendikbudristek mencakup:

- Penyelenggaraan Pendidikan: Mengatur dan mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- Peningkatan Kualitas Guru: Melakukan program pembinaan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme guru dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi dan inovasi pembelajaran.
- Pengembangan Kurikulum: Memastikan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan standar kompetensi lulusan, termasuk integrasi nilai-nilai pembangunan berkelanjutan.
- Penyediaan Akses: Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang inklusif, aman, dan peka terhadap disabilitas dan gender.

Kemenag berperan dalam memastikan pendidikan berkualitas di bawah lingkungannya, seperti:

- Pendidikan Agama dan Keagamaan: Melayani, membimbing, dan membina pendidikan madrasah, pesantren, dan pendidikan agama lainnya.
- Peran Tokoh Agama: Memanfaatkan peran penyuluh dan tokoh agama untuk menginspirasi komitmen dan tindakan pribadi dalam mencapai tujuan pendidikan, terutama membangun kebebasan-kerukunan beragama dan menghapus SARA di komunitas keagamaan masing-masing.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) memegang peran sentral dalam perencanaan dan pengawasan pencapaian SDG di tingkat nasional:

- Koordinasi Perencanaan: Menyusun, menetapkan, mengendalikan, dan mengevaluasi rencana pembangunan nasional, termasuk Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs yang terukur.
- Sinkronisasi Kebijakan: Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran antar K/L untuk memastikan pencapaian target SDG 4.
- Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator SDG 4 secara berkala.

K/L Lain yang Terlibat

Lembaga lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah juga berkontribusi sesuai peran masing-masing, misalnya dalam memastikan akses pendidikan bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas, masyarakat adat, anak dalam situasi darurat).

Pencapaian SDG 4 adalah upaya kolaboratif yang tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, lembaga pendidikan (universitas), filantropi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.

- "Program pendidikan kabinet versi SDG 4" merujuk pada kebijakan dan inisiatif pemerintah Indonesia saat ini yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke-4, yaitu untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
- Program utama pemerintah Indonesia di sektor pendidikan yang mengimplementasikan visi SDG 4, terutama di bawah kepemimpinan Mendikbudristek Nadiem Makarim, adalah inisiatif Merdeka Belajar.
- Program Utama "Merdeka Belajar" dan Keterkaitannya dengan SDG 4. Inisiatif Merdeka Belajar mencakup berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mentransformasi sistem pendidikan Indonesia, dengan fokus pada peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan kesetaraan, sesuai dengan target-target SDG 4.

Berikut adalah rincian beberapa program utama dan kaitannya:

- Pendidikan Berkualitas untuk Semua (Universal Quality Education): Ini adalah agenda prioritas yang secara langsung menegaskan komitmen Indonesia pada SDG 4. Program ini mendorong pemerataan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang, khususnya bagi kelompok rentan, guna pemulihan pasca-pandemi COVID-19.
- Kurikulum Merdeka: Inti dari Kurikulum Merdeka adalah memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk mendalami minat dan bakat mereka, serta mengurangi beban administrasi guru. Hal ini mendukung aspek "pendidikan berkualitas" dan "inklusif" (SDG 4), di mana pendidikan dirancang untuk mengenali potensi unik setiap anak.
- Digitalisasi Pendidikan: Program ini bertujuan untuk pemerataan kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia melalui penyediaan perangkat media seperti laptop dan konten pembelajaran interaktif. Ini sejalan dengan target SDG 4 untuk membangun fasilitas pendidikan yang efektif dan didukung teknologi, serta memastikan lingkungan belajar yang inklusif.
- Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan: Pemerintah berupaya meningkatkan pasokan guru berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru dan peningkatan profesionalisme. Hal ini krusial untuk mencapai target SDG 4 yang menekankan pentingnya pendidik yang berkualitas.
- Program Indonesia Pintar (PIP) / Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah): Melalui bantuan pembiayaan pendidikan, program-program ini menyoal siswa dari keluarga kurang mampu untuk memastikan akses yang setara ke semua jenjang pendidikan. Ini secara langsung mendukung prinsip "inklusif dan berkeadilan" (SDG 4) dengan menghilangkan hambatan finansial.
- Sekolah Penggerak: Program ini bertujuan mendorong sekolah-sekolah menjadi katalis perubahan untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara holistik, yang sejalan dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan efektif bagi semua.

Secara keseluruhan, program-program ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk mengintegrasikan target SDG 4 ke dalam kebijakan nasional guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, merata, dan relevan di Indonesia.

5. AGENDA KESETARAAN GENDER

Di banding Afganistan, kesetaraan gender di NKRI jauh lebih baik. Agenda PBB untuk kesetaraan gender berpusat pada SDG 5: Kesetaraan Gender, yang bertujuan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, dengan target menghapus diskriminasi, kekerasan berbasis gender, antara lain biaya sekolah, pernikahan dini, kekerasan seksual dalam rumah, memastikan partisipasi penuh semua gender dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi di DPR, serta memberikan

akses setara bagi semua-gender terhadap pendidikan, pekerjaan layak, kepemilikan sumber daya, dan layanan dasar. SDG 5 ini terintegrasi dengan SDG lainnya (seperti SDG 4 Pendidikan, SDG 8 Pekerjaan Layak, SDG 3 Kesehatan) karena kesetaraan gender adalah pendorong kunci pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.



Target utama dalam SDG 5:

- Menghapus segala bentuk diskriminasi & kekerasan berbasis gender di muka-bumi, termasuk pernikahan dini, pernikahan paksa, pemasungan, kekerasan dalam rumah, dan Mutilasi Genital Perempuan (MGP).
- Menghargai dan mengakui pekerjaan rumah tangga tak berbayar: Melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur, pendidikan para suami dan kebijakan perlindungan sosial bagi wanita.
- Memastikan partisipasi penuh wanita dan kepemimpinan nan-setara, di semua tingkat pengambilan keputusan dalam politik, ekonomi, dan kehidupan publik.
- Menjamin akses universal: Ke pelayanan kesehatan berbasis gender, seksual dan kesehatan

reproduksi, serta hak reproduksi.

- Memberikan hak yang sama pada kaum wanita untuk sumber daya ekonomi, kepemilikan, penguasaan atas tanah/properti, warisan, teknologi baru, dan layanan sosial & keuangan.
- Meningkatkan penggunaan teknologi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan.
- Mengadopsi kebijakan yang kuat untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua tingkatan.

Implementasi dan Dukungan PBB:

- UN Women adalah badan PBB yang memimpin upaya ini, bekerja sama dengan lembaga lain seperti UNDP, untuk mengintegrasikan perspektif gender di semua SDG.
- UN Women mendukung penghapusan undang-undang diskriminatif terhadap wanita, memberikan dukungan teknis untuk parlemen, dan mengembangkan pelatihan untuk pemimpin perempuan.
- Pakta Global PBB (UN Global Compact) mendorong perusahaan untuk menerapkan Target Kesetaraan Gender melalui pembelajaran lintas-peer dan advokasi.

Program NKRI

Penanggung jawab utama dan koordinator pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 5 tentang Kesetaraan Gender di Indonesia adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Kementerian ini, bersama dengan kementerian/lembaga terkait lainnya, memiliki tugas dan peran kunci dalam mencapai target SDG 5, yang secara umum meliputi:

- Penyusunan Kebijakan: Merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta legislasi yang melarang diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di tingkat nasional maupun daerah.

- Penghapusan Kekerasan: Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual.
- Peningkatan Partisipasi dan Kepemimpinan: Memastikan partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang setara bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkatan pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik.
- Pemberdayaan Ekonomi: Mendorong kesetaraan hak terhadap sumber daya ekonomi, kepemilikan properti, dan layanan keuangan bagi perempuan.
- Akses Layanan: Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi, sesuai dengan Program Aksi ICPD dan Platform Aksi Beijing.
- Pemanfaatan Teknologi: Mempromosikan pemberdayaan perempuan melalui penggunaan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

Secara keseluruhan, Kementerian PPN/Bappenas bertindak sebagai koordinator pelaksana seluruh SDGs di Indonesia, termasuk SDG 5, dan bertanggung jawab untuk pemantauan dan evaluasi pencapaiannya.

SDG 5 PBB adalah kerangka kerja global untuk mencapai kesetaraan gender secara universal pada tahun 2030, sementara "program kabinet kesetaraan gender" merujuk pada kebijakan dan inisiatif spesifik yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara (dalam hal ini, Indonesia) untuk memenuhi target SDG 5 tersebut.

Berikut adalah perbandingan utama antara keduanya:

Aspek

	SDG 5 PBB (Tujuan 5 Program Kabinet Kesetaraan Gender Pembangunan Berkelanjutan)	(Pemerintah Indonesia)
Sifat	Tujuan universal yang diadopsi oleh semua negara anggota PBB, termasuk target dan indikator spesifik.	Rencana aksi nasional dan daerah yang diterjemahkan dari target global ke dalam konteks lokal.
Cakupan	Mencakup spektrum penuh dari penghapusan kekerasan perempuan dan anak, pemberdayaan hingga partisipasi politik dan hak ekonomi perempuan, dan penguatan kepemilikan lahan.	Fokus pada program yang relevan dengan kesetaraan gender secara global, prioritas nasional, seperti perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan, dan penguatan kelembagaan gender.
Dasar Hukum	Berakar pada hukum dan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia.	Diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan nasional, seperti Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Tujuan Akhir	Menjamin hak yang setara dan kesempatan yang sama bagi semua perempuan dan anak perempuan secara global pada tahun 2030.	Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam semua kebijakan dan program pembangunan nasional (pengarusutamaan gender) untuk mencapai target SDG 5 di Indonesia.

Secara ringkas, SDG 5 adalah "apa" yang ingin dicapai secara global, sedangkan program kabinet kesetaraan gender pemerintah Indonesia adalah "bagaimana" negara tersebut berencana mencapainya di tingkat nasional. Program pemerintah Indonesia

berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam SDG 5.

6. AGENDA AIR-BERSIH DAN SANITASI

Agenda PBB untuk program air bersih dan sanitasi adalah SDG 6 (Sustainable Development Goal 6): Air Bersih dan Sanitasi Layak, yang bertujuan menjamin ketersediaan serta pengelolaan air dan sanitasi berkelanjutan untuk semua pada tahun 2030, mencakup akses air minum aman, sanitasi adil, peningkatan kualitas air, efisiensi penggunaan air, pengelolaan terintegrasi, hingga perlindungan ekosistem air. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) keenam adalah Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua.

Tujuan ini memiliki 8 target spesifik yang harus dicapai pada tahun 2030, yang dirinci sebagai berikut:

Rincian Target Tujuan 6 SDGs PBB

- Target 6.1: Air Minum Aman Universal Menjamin akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2030.
- Target 6.2: Sanitasi dan Kebersihan yang Layak Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, serta mengakhiri buang air besar di tempat terbuka pada tahun 2030.
- Target 6.3: Kualitas Air dan Pengolahan Limbah Meningkatkan kualitas air, mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan limbah, dan meminimalkan pelepasan bahan berbahaya, serta meningkatkan daur ulang dan penggunaan kembali air limbah pada tahun 2030.
- Target 6.4: Efisiensi Penggunaan Air dan Ketersediaan Pasokan Meningkatkan efisiensi penggunaan air secara substansial di semua sektor dan menjamin pasokan air tawar yang berkelanjutan pada tahun 2030.
- Target 6.5: Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk kerja sama lintas batas pada tahun 2030.
- Target 6.6: Perlindungan Ekosistem Terkait Air Melindungi dan memulihkan ekosistem terkait air (target 2020).
- Target 6.A: Kerja Sama Internasional dan Dukungan Kapasitas Memperluas kerja sama dan dukungan internasional untuk pembangunan kapasitas negara-negara berkembang dalam kegiatan terkait air dan sanitasi.
- Target 6.B: Partisipasi Komunitas Lokal Mendukung dan memperkuat partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan air dan sanitasi.

Program NKRI

SDG 6 PBB tentang Air Bersih dan Sanitasi Layak di Indonesia dikoordinasikan oleh Bappenas, dengan pelaksana utama dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Berikut adalah beberapa K/L utama dan tugas spesifik mereka:

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Berperan sebagai koordinator utama dalam perumusan kebijakan, penyusunan rencana aksi nasional, pemantauan, dan evaluasi pencapaian seluruh SDG, termasuk SDG 6.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi, pengelolaan sumber daya air, dan pembangunan sistem pengelolaan limbah.

- Kementerian Kesehatan (Kemenkes): Fokus pada aspek kesehatan masyarakat terkait akses air bersih dan sanitasi, termasuk promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pencegahan penyakit akibat sanitasi yang buruk.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Bertugas dalam pengendalian pencemaran air, pengelolaan kualitas air, perlindungan ekosistem air, serta pengelolaan limbah padat dan cair yang tidak ditangani oleh PUPR.
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Memfasilitasi dan mengawasi pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mengimplementasikan program air bersih dan sanitasi di tingkat lokal, termasuk integrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT): Berperan dalam penyediaan akses air bersih dan sanitasi di wilayah pedesaan melalui program-program berbasis masyarakat seperti Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).

Setiap K/L ini bekerja sama untuk mencapai target SDG 6, yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua pada tahun 2030.

Pemerintah Indonesia menyadari penyusutan sumber air bersih karena perusakan hutan primer, kini menjalankan beberapa program nasional di tingkat kabinet untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi, yang berkoordinasi dengan target global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua pada tahun 2030.

Dua program utama yang dilaksanakan oleh kementerian terkait adalah:

a. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Program ini merupakan inisiatif utama yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

- Tujuan: Meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan.
- Pendekatan: Melibatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pemeliharaan fasilitas. Program ini menekankan pada kepemilikan dan keberlanjutan oleh masyarakat sendiri.
- Fokus: Penyediaan infrastruktur seperti jaringan perpipaan, tangki air, dan sambungan rumah, seringkali bekerja sama dengan pemerintah daerah dan swasta.

b. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Program ini diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan dan berfokus pada perubahan perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.

- Tujuan: Mengurangi penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan stunting dengan mengubah perilaku masyarakat agar hidup lebih bersih dan sehat.
- Lima Pilar STBM:
 - Hentikan Budaya Buang Air Besar Sembarangan (SBABS).
 - Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
 - Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT).
 - Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT).
 - Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT).
- Pendekatan: Melakukan pemicuan (triggering) di tingkat komunitas untuk menyentuh perasaan dan pola-pikir masyarakat agar secara mandiri berkomitmen menjalankan lima pilar tersebut.

Kedua program ini saling melengkapi, di mana Pamsimas berfokus pada penyediaan infrastruktur fisik, sedangkan STBM berfokus pada aspek perilaku dan kesehatan masyarakat untuk memastikan fasilitas yang dibangun digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Program air bersih mencakup suaka- alam sumber-air oleh kementerian Lingkungan Hidup, kementerian Desa, kementerian Kehutanan dan kementerian Dalam Negeri. Inventarisasi dan laporan (statistik) mata-air NKRI oleh Kabinet terkait pada pengawasan penebangan hutan, polisi hutan dan polisi mata-air.

7. AGENDA ENERGI-BERSIH NAN-EKONOMIS TERJANGKAU

Agenda PBB untuk energi bersih dan murah diuraikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke-7, yang bertujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

Tujuan tersebut memiliki lima target spesifik yang harus dicapai pada tahun 2030, diukur dengan serangkaian indikator global:

Berikut adalah rincian target hasil dan target cara implementasi di bawah SDG 7:

Target SDG 7 (Batas waktu: 2030)

	Deskripsi	Indikator Utama
Target 7.1	Memastikan akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern.	7.1.1: Proporsi populasi dengan akses listrik. 7.1.2: Proporsi populasi yang mengandalkan bahan bakar dan teknologi bersih utama (untuk memasak).
Target 7.2	Meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1: Pangsa energi terbarukan dalam total konsumsi energi akhir.
Target 7.3	Mengendalikan tingkat peningkatan efisiensi energi global.	7.3.1: Intensitas energi yang diukur dalam energi primer dan PDB (Produk Domestik Bruto).

Target Cara Implementasi (Means of Implementation)

Selain target hasil di atas, SDG 7 juga mencakup dua target yang berfokus pada cara pencapaiannya:

- Target 7.A: Meningkatkan kerja sama internasional untuk memfasilitasi akses terhadap riset dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, serta teknologi bahan bakar fosil yang canggih dan lebih bersih, dan mendorong investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.
- Target 7.B: Memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara berkembang yang terkurung daratan, sesuai dengan program dukungan masing-masing.

PBB melalui mekanisme PBB-Energi (UN-Energy) melacak kemajuan target dan indikator ini secara global, sementara di tingkat nasional (seperti di Indonesia), pemerintah daerah dan berbagai institusi juga mengimplementasikan program untuk mendukung pencapaian tujuan ini.

Program NKRI

Tugas utama kementerian dan lembaga (K/L) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terkait SDG 7 PBB (Energi Bersih dan Terjangkau) adalah mengimplementasikan kebijakan nasional untuk memastikan akses energi yang universal, meningkatkan pangsa energi terbarukan, dan melipatgandakan efisiensi energi.

Kementerian dan lembaga yang memegang peran sentral dalam pencapaian SDG 7 di Indonesia meliputi:

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Memiliki peran utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di sektor energi. Tugasnya mencakup:
 - Mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) seperti tenaga surya, angin, dan air.
 - Melaksanakan program BBM Satu Harga dan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga guna meningkatkan aksesibilitas energi yang terjangkau.
 - Menerapkan kebijakan efisiensi energi di berbagai sektor.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas: Bertanggung jawab atas koordinasi perencanaan dan pemantauan implementasi seluruh SDG di tingkat nasional. Bappenas menyusun rencana aksi nasional dan memastikan agenda SDGs terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- Kementerian Keuangan: Berperan dalam pengalokasian anggaran, insentif fiskal, dan kebijakan pembiayaan untuk mendukung proyek-proyek energi bersih, termasuk penerapan pajak karbon.
- Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Terlibat dalam mendorong efisiensi energi di sektor industri dan pembangunan infrastruktur.
- Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota): Melaksanakan program-program energi bersih di tingkat lokal, seperti pengelolaan energi terbarukan skala kecil dan penyediaan solusi memasak bersih di daerah terpencil.

Secara kolektif, K/L NKRI berupaya mencapai target SDG 7 pada tahun 2030, yang mencakup penyediaan layanan energi modern, andal, berkelanjutan, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Program kabinet penyediaan energi di Indonesia berfokus pada kemandirian dan ketahanan energi dengan mengutamakan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT), serta menjamin ketersediaan pasokan dalam negeri. Hal ini diwujudkan melalui beberapa program utama dan target kebijakan energi nasional.

Program Utama dan Kebijakan NKRI

Pemerintah Indonesia, di bawah Kabinet Merah Putih periode 2025-2029, menetapkan beberapa inisiatif kunci:

- Pembangunan Infrastruktur EBT: Peresmian dan pembangunan puluhan proyek pembangkit EBT, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), tenaga surya (PLTS), dan tenaga air (PLTA), di berbagai provinsi. Proyek-proyek ini

bertujuan untuk mendiversifikasi bauran energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

- Percepatan Program Listrik Desa (Lisdes): Program ini dicanangkan untuk melistriki ribuan desa dan dusun yang belum terjangkau akses listrik, seringkali menggunakan solusi EBT berbasis potensi lokal.
- Optimalisasi Bioenergi: Peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel), dengan target mencapai penggunaan B50 (campuran 50% bahan bakar nabati dalam solar) pada tahun 2029, serta menggalakkan sumber bioetanol.
- Proyek Strategis Nasional (PSN) Ketenagalistrikan: Meliputi pembangunan pembangkit listrik (banyak di antaranya berbasis EBT dan gas), jaringan transmisi, dan gardu induk untuk memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional.
- Penyelarasan Kebijakan Energi Nasional (KEN): Adanya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KEN (RPP KEN) yang diselaraskan dengan program kabinet baru, berfokus pada dekarbonisasi sektor energi dan target *Net Zero Emission* (NZE) pada 2060.
- Efisiensi dan Konservasi Energi: Upaya penjaminan ketersediaan pasokan energi dalam negeri juga dilakukan melalui pengoptimalan produksi energi dan pelaksanaan konservasi energi.

Target Bauran Energi

- Target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang sebelumnya 23% pada tahun 2025, kini diperkirakan dapat tercapai antara tahun 2029 atau 2030, dengan penyesuaian target jangka pendek menjadi sekitar 17-20%. Dalam jangka panjang, RPP KEN menargetkan bauran EBT minimal 60% pada tahun 2060 untuk mencapai target NZE.
- Secara keseluruhan, program kabinet ini menekankan pada transisi energi yang bertahap, rasional, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus berkontribusi pada target pengurangan emisi karbon global.

8. AGENDA PEMERKERJAAN-PARIPURNA NAN-BERKEMANUSIAAN-BERADAB DAN PROGRAM PERTUMBUHAN EKONOMI

Agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak merujuk pada satu "sidang" tunggal dengan fokus eksklusif pada "program full employment dan perekonomian nan makmur", melainkan mengintegrasikan tujuan-tujuan ini ke dalam kerangka kerja yang lebih luas dan berkelanjutan, terutama melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) cq Sasaran utama PBB dalam SDG 8, yaitu: "Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkesinambungan, lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan layak bagi semua".



Rincian agenda dan diskusi PBB mengenai program "*full employment*" (pemerkerjaan paripurna seluruh angkatan kerja cq negara nir-pengangguran) dan perekonomian nan-makmur biasanya dibahas dalam berbagai forum, komite, dan badan khusus, terutama Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), dan Majelis Umum PBB.

Fokus utama dalam agenda PBB dan badan-badan terkait meliputi:

- **Pemerkerjaan Penuh dan Produktif:** Mencapai situasi di mana semua sumber daya tenaga kerja yang tersedia digunakan secara efisien, dengan tujuan menghapus pengangguran siklis.
- **Pekerjaan Layak (Decent Work):** Memastikan kondisi kerja yang adil, jaminan sosial, hak-hak di tempat kerja (seperti kebebasan berserikat dan penghapusan kerja paksa/anak), dan dialog sosial.
- **Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan:** Memastikan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi semua orang, termasuk kaum muda, perempuan, dan penyandang disabilitas, serta berkelanjutan secara lingkungan.
- **Kesetaraan Upah:** Menargetkan upah yang setara untuk pekerjaan dengan nilai yang sama (equal pay for work of equal value).
- **Pengembangan Keterampilan:** Fokus pada pendidikan dan pelatihan (life-long education) untuk membekali tenaga kerja menghadapi perubahan pasar, termasuk transisi menuju ekonomi hijau (green jobs).
- **Perlindungan Sosial:** Memperluas jaminan perlindungan sosial bagi semua pekerja.

Mekanisme Sidang dan Implementasi

Isu-isu ini dibahas dalam sidang-sidang melalui:

- **Resolusi dan Keputusan:** Majelis Umum dan ECOSOC mengadopsi resolusi yang memandu negara-negara anggota dalam menerapkan kebijakan ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
- **Laporan Sekretaris Jenderal:** Laporan rutin disiapkan untuk menilai kemajuan dan tantangan dalam mencapai SDG 8.
- **Kemitraan:** PBB bekerja sama dengan berbagai organisasi seperti ILO, UNDP, UNICEF, dan Bank Dunia untuk meluncurkan program bersama di tingkat negara.

Secara ringkas, "program *full employment* dan perekonomian nan makmur" adalah bagian integral dari Agenda 2030 PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan kerangka kerja global, bukan agenda sidang tunggal yang terisolasi.

Agenda NKRI

SDG 8 PBB berfokus pada Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Di Indonesia, implementasinya melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) yang tugasnya mencakup aspek-aspek terkait seperti perencanaan ekonomi, ketenagakerjaan, investasi, dan pengembangan UMKM.

Lembaga utama yang mengoordinasikan pelaksanaan SDGs di Indonesia adalah Kementerian PPN/Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

Berikut adalah beberapa K/L utama dan peran spesifik mereka terkait SDG 8:

- **Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker):** Bertugas memastikan terciptanya kesempatan kerja penuh dan produktif, perlindungan hak-hak buruh, serta penghapusan kerja paksa dan pekerja anak. Ini mencakup pengembangan strategi ketenagakerjaan dan pelatihan vokasi.
- **Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan:** Berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri dan perdagangan, memastikan keberlanjutan produksi, dan memfasilitasi akses pasar.

- Kementerian Koperasi dan UKM: Fokus pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.
- Kementerian Keuangan: Bertanggung jawab atas kebijakan fiskal dan penganggaran yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta reformasi sistem keuangan.
- Badan Pusat Statistik (BPS): Berperan dalam pengumpulan data dan pengukuran indikator terkait pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan kondisi ketenagakerjaan untuk memonitor capaian SDG 8.
- Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota): Melaksanakan kebijakan di tingkat lokal, seperti menyediakan pelatihan kewirausahaan dan memfasilitasi bantuan sosial untuk mendukung pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing.

Secara keseluruhan, pelaksanaan SDG 8 di Indonesia melibatkan kolaborasi multisektor antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dengan Bappenas sebagai koordinator utama untuk memastikan target nasional selaras dengan agenda global PBB.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang. Angka ini setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85%.

Disamping memperluas lapangan kerja formal, pemerintah membangun kewirausahaan cq mental-pengusaha, membuka peluang berwira-usaha cq membangun UMKM modern dan bertanggung-jawab untuk mengatasi pengangguran.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker, dulunya Depnakertrans) menjalankan berbagai program prioritas untuk penyediaan dan perluasan lapangan kerja, terutama di masa Kabinet Merah Putih saat ini. Program-program ini dirancang untuk mengatasi pengangguran, meningkatkan kualitas SDM, dan mendorong kewirausahaan.



Berikut adalah program-program utama Kemnaker untuk penyediaan lapangan kerja:

1. Program pembentukan budaya kerja, memerangi budaya malas dan santai, kementerian Kebudayaan.
2. Program peningkatan jumlah lulusan pendidikan formal kejuruan cq link & Match, Program penampungan pengangguran SDM Terdidik oleh APBN/D Kemnakerian Aparatur Negara.
3. Program Magang Nasional, kerjasama lintas kementerian. Program ini menjadi salah satu unggulan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
 - Target Peserta: Lulusan baru (fresh graduate) dari perguruan tinggi.
 - Implementasi: Dilaksanakan melalui platform daring Magang Hub Kemnaker dan melibatkan ribuan perusahaan serta kementerian/lembaga sebagai penyedia tempat magang.
 - Manfaat: Peserta mendapatkan gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP), jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Program ini diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2025.

4. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
Program ini berfokus pada penciptaan wirausaha baru dan lapangan kerja mandiri, baik di sektor formal maupun informal. Kemnaker membantu masyarakat untuk menciptakan usaha sendiri, lalu diharapkan juga dapat membuka lapangan kerja bagi orang lain.
5. Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pelatihan Vokasi.
Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi di BLK yang menjamin kualitas SDM siap-pakai, termasuk pendirian BLK Komunitas. Menaker membuka pasar-maya SDM terdidik lintas-provinsi. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterampilan lulusan sesuai dengan kebutuhan industri (*link and match*).
6. Program Prioritas Nasional Lainnya (Bagian dari Paket Ekonomi 2025)
Pemerintah, melalui koordinasi lintas kementerian, meluncurkan lima program akselerasi utama untuk menyerap jutaan tenaga kerja, di antaranya:
 - a. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Ditargetkan menyerap jutaan pekerja dengan menggerakkan ekonomi lokal dan menyediakan kebutuhan pokok.
 - b. Pengembangan Sektor Pertanian dan Maritim: Melalui revitalisasi tambak, modernisasi kapal nelayan, dan penanaman kembali perkebunan rakyat.
 - c. SDM Terdidik diberi-tempat kerja dikampung-halaman dengan Program Panggilan Ibu Pertiwi, Pemda dan pengusaha mengumumkan kebutuhan tenaga kerja-terdidik pada laman Bursa Tenaga Kerja Nasional Depnakertrans, situs provinsi, situs pemda dan situs pengusaha.

9. AGENDA PEMBANGUNAN INDUSTRI, INOVASI DAN PRASARANA

Program pembangunan industri & perdagangan, inovasi, dan infrastruktur PBB merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 9. Agenda global ini berlaku sejak 1 Januari 2016 dan menargetkan pencapaiannya pada tahun 2030.

Tujuan 9 berfokus pada pembangunan infrastruktur yang tangguh, pendorongan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta penumbuhan inovasi.

Rincian Target Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)

Tujuan 9 memiliki 8 target spesifik yang harus dicapai, di antaranya adalah:

- 9.1: Mengembangkan infrastruktur berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan adil bagi semua.
- 9.2: Mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta, pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pangsa industri dalam PDB dan lapangan kerja nasional, sesuai dengan keadaan nasional, dan meningkatkan dua kali lipat pangsa tersebut di negara kurang berkembang.
- 9.3: Meningkatkan akses usaha skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap layanan keuangan, termasuk kredit yang terjangkau, dan mengintegrasikan mereka ke dalam rantai nilai dan pasar.
- 9.4: Memperbarui dan merehabilitasi infrastruktur dan industri agar berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang lebih besar dan

adopsi teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, dengan semua negara mengambil tindakan sesuai kemampuan masing-masing.

- 9.5: Meningkatkan riset ilmiah, memajukan kapasitas teknologi sektor industri di semua negara, khususnya negara berkembang, termasuk, pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja riset dan pembangunan per 1 juta penduduk serta belanja riset dan pembangunan pemerintah atau swasta.
- 9.6: Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang melalui dukungan finansial, teknologi, dan teknis yang ditingkatkan dari negara maju.
- 9.7: Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset, dan inovasi di negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif untuk, antara lain, diversifikasi industri dan penambahan nilai komoditas.
- 9.8: Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta berupaya menyediakan akses universal dan terjangkau ke internet di negara kurang berkembang pada tahun 2020 (meskipun target waktu ini telah lewat, upaya tetap dilanjutkan).

Program NKRI

Industri tulang punggung NKRI secara umum merujuk pada sektor manufaktur, pertanian, dan juga UMKM, yang secara konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja nasional. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai strategi untuk memperkuat sektor-sektor ini, yang dirumuskan dalam kebijakan seperti *Making Indonesia 4.0* dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.

Strategi utama untuk industri tulang punggung NKRI meliputi:

- Hilirisasi Sumber Daya Alam: Fokus pada pengolahan bahan mentah di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah, yang mencakup industri baja sebagai tulang punggung industri modern.
- Penguatan Teknologi dan Ekosistem Industri: Mendorong adopsi teknologi industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, termasuk pengembangan pusat-pusat inovasi dan infrastruktur digital.
- Pengembangan Industri Hijau: Menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keramahan lingkungan dalam proses industrialisasi.
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Industri: Menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri: Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dan Kawasan Industri (KI) sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
- Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN): Mendorong penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat struktur industri nasional.
- Pemberdayaan UMKM: Memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menembus pasar yang lebih luas (lintas kepulauan dan global) melalui bantuan pemasaran dan keuangan digital.

Melalui implementasi strategi ini, pemerintah menargetkan terciptanya struktur industri yang tangguh, mandiri, dan kompetitif, yang mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara industri maju pada visi Indonesia Emas 2045. Informasi lebih rinci mengenai kebijakan industri dapat diakses melalui portal resmi Kementerian Perindustrian atau Badan Pembinaan Hukum Nasional terkait regulasi perindustrian.

Implementasi SDG 9 PBB di Indonesia, yang berfokus pada Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, dikoordinasikan secara nasional oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) lain dengan tugas spesifik sesuai lingkup kerja masing-masing.

Tugas dan peran K/L NKRI dalam pencapaian SDG 9 meliputi:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas

- Koordinator Utama: Bappenas bertugas mengoordinasikan, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh SDG di tingkat nasional dan daerah, termasuk SDG 9.
- Perumusan Kebijakan: Merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang mengintegrasikan target-target SDG 9, seperti pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan industrialisasi hijau.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

- Pembangunan Infrastruktur: Memimpin upaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik (jalan, jembatan, bendungan, sanitasi) yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, dengan fokus pada akses yang adil bagi semua.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

- Industrialisasi Inklusif dan Berkelanjutan: Bertanggung jawab mempromosikan industrialisasi yang inklusif, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mendorong adopsi teknologi bersih dan ramah lingkungan.

Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

- Mendorong Inovasi dan Litbang: Bertugas mendorong penelitian, pengembangan, dan inovasi di berbagai sektor, serta meningkatkan kapasitas riset ilmiah dan memfasilitasi pengembangan teknologi dalam negeri.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

- Transformasi Digital dan Akses TIK: Berperan dalam mendukung transformasi digital, memastikan akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan menyediakan akses internet yang terjangkau dan universal.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

- Inovasi Pendanaan: Mencari dan mengelola sumber pendanaan, termasuk inovasi pendanaan publik seperti penerbitan obligasi SDGs (SDG Bonds) dan penandaan anggaran, untuk mendukung proyek-proyek terkait SDG 9.

Kementerian Koperasi dan UKM

- Peningkatan Daya Saing UMKM: Mendorong kewirausahaan dan membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing melalui inovasi dan digitalisasi.

Kolaborasi tersebut diatas juga melibatkan pemerintah daerah (Tim Koordinasi Daerah SDGs), akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai target SDG 9 secara efektif.

Program kabinet saat ini untuk pembangunan industri dan perdagangan berlandaskan pada visi Asta Cita versi Kabinet yang berfokus pada hilirisasi, industrialisasi, kemandirian bangsa, dan peningkatan daya saing global.

Program Utama dan Strategi

Program dan strategi kunci yang diimplementasikan oleh kementerian terkait (Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan) meliputi:

- Hilirisasi dan Industrialisasi: Melanjutkan dan memperluas program hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam dan maritim untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Hal ini termasuk mendorong industrialisasi minyak mentah agar tidak perlu diekspor untuk diproses di luar negeri.



- Kemandirian Ekonomi: Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada di berbagai sektor (pangan, energi, air), yang secara langsung mendukung industri dan perdagangan dalam negeri.

- Peningkatan Lapangan Kerja dan Kualitas SDM: Menyiapkan ratusan ribu tenaga kerja terampil untuk pasar global dan meningkatkan kompetensi SDM industri melalui pendidikan vokasi berbasis kompetensi.

- Penguatan Industri Manufaktur dan UMKM:

Fokus pada pertumbuhan positif kinerja industri manufaktur dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk pemerataan ekonomi.

- Menjaga Stabilitas dan Daya Beli: Menggunakan kebijakan pengamanan perdagangan seperti Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk melindungi industri dalam negeri, serta kebijakan ekonomi makro untuk menjaga daya beli masyarakat.
- Target Pertumbuhan Ekonomi: Berusaha mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% dalam beberapa tahun ke depan, dengan mengaktifkan mesin pertumbuhan ekonomi seperti investasi dan ekspor, bukan hanya konsumsi rumah tangga.
- Inovasi dan Ekonomi Kreatif: Mendorong pengembangan industri kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, serta penerapan inovasi dan standar global.

Kementerian Perindustrian, menyiapkan program "quick wins" (hasil cepat) untuk menyelaraskan target pertumbuhan ekonomi tersebut dan siap mendukung langkah-langkah untuk menjadikan Indonesia produsen yang berdaulat dan berdaya saing global, bukan hanya pasar.

Program kabinet Indonesia, melalui Kementerian Perdagangan, berfokus pada tiga program kerja utama untuk pembangunan perdagangan:

Selain tiga program utama tersebut, pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan pendukung, antara lain:

- Deregulasi Impor: Pemerintah secara aktif merevisi dan melonggarkan aturan impor untuk 10 kelompok komoditas guna memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, meningkatkan daya saing, dan mempercepat investasi.
- Penerbitan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI): Hal ini dilakukan untuk memperlancar kegiatan ekspor dan impor serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
- Pengembangan Ekonomi Kreatif: Upaya dilakukan melalui pengembangan database ekonomi kreatif yang didukung teknologi informasi untuk mewujudkan strategi pemerintah.
 - Pengamanan Pasar Dalam Negeri: Program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok, dan melindungi konsumen serta industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak sehat. Hal ini melibatkan kebijakan seperti penetapan tarif dan kuota impor untuk komoditas tertentu.
 - Perluasan Pasar Ekspor: Fokus utama program ini adalah meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri dengan membuka akses pasar baru bagi produk Indonesia di pasar internasional, baik melalui perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral. Program ini mencakup promosi dagang, diversifikasi produk ekspor bernilai tambah, dan penghapusan hambatan birokrasi perdagangan.
 - Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar Dapat Ekspor: Program ini dirancang khusus untuk memberdayakan UMKM, membantu mereka memenuhi standar ekspor, dan mengoptimalkan kontribusi mereka terhadap kinerja ekspor nasional.

Fokus Utama Program Inovasi Bangsa dalam Asta Cita:

- Inovasi adalah segala-galanya. Penguatan SDM, Sains, dan Teknologi: Program ini menekankan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses teknologi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan talenta berkualitas yang siap menghadapi kemajuan pesat, termasuk dalam bidang kecerdasan buatan.
- Hilirisasi dan Industrialisasi: Melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional.
- Ekonomi Kreatif dan Digital: Mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif, serta mendukung transformasi digital di sektor publik untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif dan aman.
- Kemandirian Bangsa: Mendorong kemandirian melalui swasembada pangan, energi, dan air, yang didukung oleh riset dan inovasi. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berperan sebagai orkestrator inovasi untuk menyelesaikan masalah di berbagai daerah, seperti dalam sektor pertanian.
- Kolaborasi Riset dan Industri: Mendorong investasi di bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) dengan memberikan insentif pajak bagi industri yang melakukan kegiatan Litbang internal atau bermitra dengan lembaga Litbang lainnya.
- Pembangunan Berkelanjutan: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, dengan fokus pada ekonomi hijau dan biru.

Agenda pembangunan infrastruktur sbb :

Infrastruktur terpenting di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) mencakup berbagai sektor penting yang menopang konektivitas, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat

Tidak ada satu jenis infrastruktur tunggal yang paling penting, melainkan sebuah ekosistem yang saling bergantung, di mana infrastruktur transportasi dan energi sering dianggap sebagai pilar utama karena dampaknya yang luas terhadap sektor lain.

Infrastruktur Kritis Utama di Indonesia

Sektor-sektor infrastruktur yang dianggap paling krusial meliputi:



- **Infrastruktur Transportasi (Konektivitas):** Ini adalah salah satu fokus utama pemerintah negara seluas 50 % Eropa, untuk memastikan pemerataan pembangunan. Jaringan ini mencakup:
 - **Jalan Raya dan Jalan Tol:** Menghubungkan wilayah perkotaan dan pedesaan, serta mendukung logistik dan perdagangan nasional, seperti Jalan Tol Trans-Sumatera.
 - **Pelabuhan dan Bandar Udara:** Penting untuk konektivitas maritim dan udara di negara kepulauan, memfasilitasi distribusi barang dan pergerakan orang antar pulau dan internasional.
 - **Jalur Kereta Api:** Berperan dalam angkutan massal dan logistik darat yang efisien di pulau-pulau padat seperti Jawa.
- **Infrastruktur Energi dan Kelistrikan:** Pasokan listrik dan energi yang stabil dan merata adalah fundamental untuk operasional industri, bisnis, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Proyek-proyek seperti jaringan listrik dan pipa gas sangat penting.
- **Infrastruktur Sumber Daya Air:** Ketersediaan air bersih dan pengelolaan sumber daya air sangat penting untuk kehidupan, pertanian, dan sanitasi. Ini termasuk pembangunan bendungan, irigasi, dan sistem penyediaan air minum (SPAM).
- **Infrastruktur Telekomunikasi dan Digital:** Jaringan telekomunikasi dan internet menjadi semakin vital untuk komunikasi modern, ekonomi digital, dan layanan publik, terutama dalam menghubungkan daerah terpencil.
- **Infrastruktur Perbatasan:** Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dilakukan secara gencar untuk memperkuat keutuhan NKRI dan mengurangi disparitas pembangunan antar daerah.

Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang sering dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), bertujuan untuk menghubungkan nusantara, menggerakkan ekonomi, dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Kualitas infrastruktur Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan signifikan, menduduki peringkat ke-28 di dunia pada tahun 2024, menunjukkan fokus pemerintah yang besar pada sektor ini.

Program kabinet saat berfokus pada percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dengan prioritas pada ketahanan pangan, konektivitas kewilayahan, dan

infrastruktur digital, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK).

Fokus dan Prioritas Utama

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029:

- **Konektivitas dan Pemerataan Wilayah:** Menjamin pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi merata di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- **Ketahanan Pangan:** Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air, termasuk pembangunan dan perbaikan irigasi serta fasilitas pertanian.
- **Infrastruktur Digital:** Pemerintah menargetkan pemerataan akses internet hingga ke pelosok negeri untuk menghapus kesenjangan digital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis digital.
- **Efisiensi Investasi:** Program ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dalam investasi infrastruktur guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.
- **Proyek Strategis Nasional (PSN):** Melanjutkan dan menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang dianggap strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksana dan Pendanaan

Beberapa kementerian dan lembaga terkait memegang peran kunci:

- **Kemenko IPK:** Berfungsi untuk menguatkan koordinasi dan menyelaraskan pembangunan antar sektor infrastruktur.
- **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):** Sebagai garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, pengairan, dan perumahan.
- **Pembiayaan:** Selain dari anggaran belanja pemerintah pusat, pembiayaan juga melibatkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta peran aktif sektor swasta dan mitra internasional untuk menutup celah fiskal.

Program kabinet menekankan pendekatan yang lebih terintegrasi, masif, strategis, dan berkeadilan untuk memastikan infrastruktur berfungsi optimal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peringkat infrastruktur Indonesia bervariasi tergantung metriknya, namun menunjukkan tren peningkatan, terutama di bidang infrastruktur mutu (seperti standardisasi, akreditasi, dan metrologi) yang melonjak ke peringkat 27-28 dunia pada tahun 2024-2025, bahkan unggul di ASEAN menurut data UNIDO. Sementara itu, data dari tahun-tahun sebelumnya (seperti 2019) menunjukkan peringkat daya saing infrastruktur secara umum lebih rendah (sekitar peringkat 72) dari World Economic Forum, namun ada peningkatan signifikan di sub-sektor seperti konektivitas bandara (peringkat 5 ASEAN).

Peringkat Terbaru (2024-2025): Infrastruktur Mutu

- **Peringkat Dunia:** 27 atau 28 dari sekitar 155-185 negara.

- Posisi di ASEAN: Terbaik atau kedua terbaik.
- Detail Pilar:
 - Akreditasi: Peringkat 10 dari 185 negara (2023).
 - Standardisasi: Peringkat 37 (2023).
 - Metrologi: Peringkat 38 (2023).
- Korelasi: Peringkat ini selaras dengan posisi Indonesia di G20 dan PDB-nya, menunjukkan korelasi kuat antara kemajuan infrastruktur mutu dan kekuatan ekonomi.

Data Sebelumnya (Tren Peningkatan)

- 2019 (WEF): Peringkat 72 dari 142 negara untuk daya saing infrastruktur secara umum, dengan skor 67.7.
- Konektivitas Bandara (2019): Tertinggi di ASEAN, peringkat 5 dunia.

Kesimpulan, Indonesia menunjukkan perbaikan signifikan dalam infrastruktur, terutama pada aspek kualitas dan mutu (infrastruktur mutu), yang menjadi kunci daya saing global dan regional (ASEAN). Meskipun peringkat umum bisa berbeda tergantung survei, fokus pada standardisasi dan akreditasi menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dan positif.

10. PROGRAM MENGURANGI SENJANG KAYA-MISKIN

Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menangani masalah kesenjangan kaya-miskin global secara khusus melalui Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan (Reduced Inequalities), serta secara tidak langsung melalui tujuan lain seperti menghapus kemiskinan (Tujuan 1).

Berikut adalah rincian agenda dan program utama dalam Tujuan 10 SDGs:

Fokus Utama Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 10 menyerukan pengurangan ketimpangan pendapatan serta ketimpangan berdasarkan usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal usul, agama, atau status ekonomi di dalam dan antar negara.

Target Rinci dan Strategi Program

Tujuan ini memiliki beberapa target spesifik yang memandu program-program global dan nasional, antara lain:

- Pertumbuhan Pendapatan Inklusif: Secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan bagi 40 persen populasi terbawah pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
- Pemberdayaan dan Inklusi: Memperkuat dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua orang, tanpa memandang status mereka.
- Penghapusan Diskriminasi: Menghilangkan undang-undang, kebijakan, dan praktik diskriminatif serta mendorong legislasi, kebijakan, dan tindakan yang tepat terkait prinsip kesetaraan.
- Kebijakan Fiskal dan Sosial: Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial, untuk mencapai kesetaraan yang lebih baik secara progresif.

- Regulasi Pasar Finansial Global: Memperbaiki regulasi dan pemantauan pasar dan institusi finansial global serta memperkuat implementasi regulasi tersebut.
- Representasi Negara Berkembang: Memastikan representasi yang lebih kuat dan suara yang lebih besar bagi negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan di institusi ekonomi dan finansial global untuk membentuk institusi yang lebih efektif, kredibel, akuntabel, dan inklusif.
- Bantuan Pembangunan dan Migrasi: Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang aman, teratur, dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.

Implementasi Global dan Nasional

- Di tingkat global, PBB melalui badan-badan seperti UNDP (Program Pembangunan PBB) dan UN Women mendukung negara-negara anggota dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan inklusif.
- Di Indonesia, implementasi agenda ini terlihat melalui berbagai program pemerintah seperti:
 - Pemberian bantuan sosial (Program Keluarga Harapan/PKH, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar).
 - Program dana desa untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.
 - Peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

SDG 10 PBB bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan di dalam-negeri dan antar-negara. Di Indonesia, implementasi SDG 10 dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas, melibatkan berbagai kementerian/lembaga (K/L) dengan tugas dan peran spesifik.

Berikut adalah tugas umum K/L di NKRI dalam mencapai SDG 10:

1. Perencanaan, Koordinasi, dan Pengawasan

- Kementerian PPN/Bappenas (Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional): Bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan SDGs secara nasional, termasuk integrasi target SDG 10 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan pembangunan lainnya.
- DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat): Berperan dalam pengawasan terhadap pemerintah dalam pelaksanaan SDGs, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan): Melakukan audit dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran dan capaian program pemerintah terkait SDGs.

2. Implementasi Kebijakan dan Program K/L terkait mengimplementasikan kebijakan yang mendorong kesetaraan, seperti kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial:

- Kementerian Keuangan: Menerapkan kebijakan fiskal, seperti penandaan anggaran SDGs dan penganggaran tanggap gender, untuk mendukung pendanaan program yang mengurangi ketimpangan.

- Kementerian Sosial: Bertanggung jawab atas sistem perlindungan sosial, termasuk program pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial untuk kelompok rentan

(penyandang disabilitas, lansia, dll.).



- Kementerian Ketenagakerjaan: Berfokus pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memastikan kesempatan kerja yang setara untuk semua, tanpa diskriminasi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama: Berupaya memastikan akses pendidikan berkualitas yang adil dan inklusif bagi semua kalangan, termasuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas dan gender, serta beasiswa bagi kelompok kurang mampu.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Memastikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk mengurangi ketimpangan berbasis gender.
- Kementerian Kesehatan: Berupaya memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Fokus pada pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah (desa-kota) melalui program seperti dana desa.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM): Berperan dalam memastikan penghapusan undang-undang, kebijakan, dan praktik diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan.

Secara umum, semua K/L memiliki peran untuk memastikan "tidak ada yang tertinggal" (*leave no one behind*) dalam pembangunan, yang merupakan prinsip inti dari SDGs memutus *rantai-kemiskinan tak ber-ujung-pangkal* (*vicious circle of poverty*, Gunar Myrdal).

Pemerintah Indonesia, melalui Kabinet, menjalankan strategi holistik untuk menghapus kemiskinan ekstrem dengan target nol persen pada tahun 2026. Pendekatan utama melibatkan dua skema: pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Strategi dan Program Utama

Program-program ini dirancang untuk memutus mata rantai-kemiskinan dan mencakup berbagai sektor:

1. Pendidikan dan Peningkatan SDM

- Menteri Kebudayaan bertugas mereformasi budaya santai-malas menjadi budaya rajin-energetik, setiap keluarga berambisi semua anak-anak lulus S1 keatas. Menteri Pendidikan dan Menaker bertugas menyalurkan lulusan S1-keatas ke pasar tenaga-kerja. Menteri perdagangan dan Perindustrian mendorong lulusan S1-keatas untuk menjadi pengusaha.
- Sekolah Rakyat Terintegrasi: Pemerintah berencana membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan, menyediakan pendidikan holistik dari SD hingga SMK dengan fasilitas lengkap seperti laboratorium dan bengkel vokasional. Mandagri/Mendes menghimbau para sarjana baru-lulus pulang kembali membangun pemda/desa nya.
- Pendidikan Vokasi: Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi (kejuruan) untuk memastikan kurikulum relevan dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja, mempercepat penyerapan lulusan kerja.

- Program Makan Bergizi Gratis: Program ini ditujukan untuk mengatasi beban keluarga miskin dan memastikan asupan gizi anak-anak sejak janin hingga lulus SMA, yang diharapkan berdampak jangka panjang pada kualitas SDM.
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 - Koperasi Desa: Pembentukan 80.000 koperasi-desa di seluruh Indonesia untuk menyediakan akses layanan keuangan nan-murah/terjangkau, logistik, dan kebutuhan pokok, sekaligus memberantas praktik rentenir.
 - Menarik Investor: Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) berupaya menarik investasi ke daerah-daerah potensial untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran secara struktural.
 - Sentra Pangan dan Pertanian Gizi (SPPG) berbasis UMKM-Agri: Pembangunan 1.000 SPPG di daerah kantong-kantong kemiskinan untuk memperkuat ekonomi lokal dan ketahanan pangan.
 3. Perlindungan Sosial dan Data Terpadu
 - Bantuan Sosial (Bansos) Depsos: Pemerintah melanjutkan dan memperluas program bansos yang sudah berjalan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lain-lain
 - Sistem Data Tunggal: Pembentukan Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan akurasi data penerima manfaat, memastikan bantuan tepat sasaran dan terintegrasi.
 - Inpres No. 8 Tahun 2025: Penerbitan Instruksi Presiden ini mengoptimalkan pelaksanaan dan sinergi program pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan pendekatan paripurna tersebut di atas, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan secara keseluruhan menjadi 4,5% pada tahun 2029.

Ukuran Gini Ratio yang sehat itu relatif, tapi umumnya semakin rendah semakin baik, dengan nilai 0 (kesetaraan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Gini Ratio sekitar 0,3-0,4 (atau 30-40%) sering dianggap ketimpangan sedang dan relatif baik untuk negara berkembang seperti Indonesia (sekitar 0,38), sementara di bawah 0,3 dianggap rendah (seperti di Jerman atau Norwegia) dan di atas 0,5 dianggap tinggi (ketimpangan tidak adil/tinggi).

Rentang dan Interpretasi:

- 0 (atau 0%): Kesetaraan sempurna (semua orang punya pendapatan/sumber daya sama).
- 1 (atau 100%): Ketimpangan sempurna (satu orang punya semuanya).
- 0,3 - 0,4: Ketimpangan rendah/sedang (Indonesia sering di kisaran ini, contohnya 0,381).
- > 0,4 - 0,5: Ketimpangan cukup tinggi.
- > 0,5: Ketimpangan tinggi atau tidak adil (indikasi masalah distribusi pendapatan).

Contoh Perbandingan (Data BPS Indonesia vs Negara Lain):

- Indonesia: Sekitar 0,38 (sedang).
- Jerman: Sekitar 0,317 (rendah).
- Norwegia: Sekitar 0,27 (sangat rendah/merata).
- Brasil: Sekitar 0,489 (tinggi).

Kesimpulan, "sehat" berarti angka mendekati 0, menunjukkan pemerataan yang lebih baik, namun angka di sekitar 0,3-0,4 masih dianggap wajar untuk konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa rasio gini Indonesia menurun menjadi 0,375, menandakan adanya sedikit perbaikan dalam pemerataan pendapatan secara nasional. Angka ini merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir, namun, penurunan ini disertai dengan beberapa dinamika penting:

- Jumlah Penduduk Miskin: Meskipun persentase kemiskinan menurun menjadi 8,47% (terendah dalam sejarah), jumlah absolut penduduk miskin masih mencapai 23,85 juta orang pada Maret 2025.
- Kesenjangan di Perkotaan: Kesenjangan ekonomi justru melebar di daerah perkotaan, dengan rasio gini perkotaan tercatat sebesar 0,399. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kenaikan jumlah pekerja setengah menganggur dan kenaikan harga komoditas pangan yang memengaruhi daya beli masyarakat miskin kota.
- Kesenjangan Pengeluaran: Terdapat disparitas signifikan dalam pengeluaran, di mana 20 persen kelompok teratas menyumbang 45,56 persen dari total pengeluaran nasional.
- Perbedaan Data: Terdapat perbedaan data yang mencolok antara BPS dan Bank Dunia terkait jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Juni 2025, dengan Bank Dunia menyebutkan angka yang jauh lebih tinggi.

Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan tren positif dalam penurunan angka kemiskinan dan rasio gini secara nasional, namun tantangan besar masih ada dalam mengatasi ketimpangan di wilayah perkotaan dan daerah-daerah dengan angka kemiskinan tertinggi seperti provinsi di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Laporan lengkap mengenai prospek ekonomi Indonesia juga tersedia melalui situs Bank Dunia dan BPS.

11. PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA DAN KOMUNITAS BERKELANJUTAN

Tidak mudah membangun hunian cq kota/desa untuk negara NKRI yang seluas 50% Eropa, negara yang terdiri atas 17.500 pulau. Kita sama mafhum bahwa bahkan berbagai kota terbesar-termaju di muka bumi, misalnya London, merupakan sarang tikus, tungau-tilam, kecoa dan limbah rumah-tangga, apalagi hunian-masyarakat negara kurang-maju ekonomi. Agenda PBB untuk pembangunan kota dan komunitas berkelanjutan berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke-11, yang bertujuan menjadikan kota inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, dengan rincian mencakup perencanaan kota yang terintegrasi, peningkatan infrastruktur, ruang publik yang aman, akses terhadap layanan dasar (air, sanitasi, energi), penanganan dampak lingkungan (udara, sampah), serta ketahanan terhadap bencana melalui kebijakan yang terintegrasi dan dukungan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta pemerintah daerah, terus melakukan pembangunan dan revitalisasi tempat pelelangan ikan (TPI) sebagai bagian dari program strategis. Fokus utama saat ini adalah program Kampung Nelayan Merah Putih dan pengembangan pelabuhan perikanan terintegrasi.

Berikut adalah beberapa rencana pembangunan TPI yang teridentifikasi:

Proyek Nasional dan Regional

- Kampung Nelayan Merah Putih: KKP telah menetapkan 65 lokasi prioritas dari target 100 lokasi untuk pembangunan tahap pertama program ini, yang dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2025. Program ini bertujuan untuk mentransformasi desa-desa pesisir menjadi pusat ekonomi modern yang terintegrasi dengan fasilitas produksi dan pemasaran, termasuk TPI modern, gudang beku (*cold storage*), dan sentra kuliner.
- Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan, Bali: Pembangunan pelabuhan terintegrasi ini diproyeksikan dimulai pada November 2025. Proyek ini akan mencakup kawasan industri, area bisnis, fasilitas pengolahan ikan, pasar modern, dan dermaga. Pengembangan ini sejalan dengan program ekonomi biru (*blue economy*) KKP.
- Rencana Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan: Terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2025-2029 yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan daya saing pelabuhan di Belawan.

Proyek di Tingkat Daerah

Banyak rencana pembangunan TPI dikelola pada tingkat kabupaten/kota, yang dianggarkan melalui APBD masing-masing daerah:

- TPI Pedalen, Kebumen: Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyelesaikan pembangunan TPI ini pada tahun 2023 dan merencanakan perluasan area parkir atau landasan perahu nelayan pada tahun 2024 untuk menampung lebih banyak kapal.
- Dinas Perikanan di Berbagai Daerah: Instansi perikanan di berbagai kabupaten, seperti Serang, Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Bulungan, memiliki rencana kerja dan anggaran tahunan (RKPD/Renja) yang mencakup kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yang sudah ada, serta potensi peningkatan sarana dan prasarana.
- Informasi terperinci mengenai daftar lengkap seluruh proyek pembangunan TPI dapat ditemukan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Strategis (Renstra) di situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau melalui portal data pemerintah daerah terkait.

Berikut adalah rincian fokus utama SDG 11 dan keterkaitannya dengan tujuan SDGs lain:

1. SDG 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan

- Setiap provinsi, pemda dan walikota peduli inklusi & keamanan: Menyediakan ruang publik yang aman, inklusif, dan mudah diakses (terutama untuk perempuan, anak, lansia, disabilitas masyarakat miskin).
- Setiap provinsi, pemda dan walikota membuat perencanaan Terintegrasi: Mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan kota-terintegrasi, termasuk hunian sadar perubahan iklim, hunian efisien sumber daya, dan hunian ber-ketahanan bencana.
- Setiap provinsi, pemda dan walikota melakukan pengelolaan lingkungan: Mengurangi dampak lingkungan perkotaan (antara lain; kualitas sinar matahari, udara, penanganan limbah/sampah) dan mendukung hubungan berkelanjutan antara kota, pinggiran kota, dan pedesaan.

- Setiap provinsi, pemda dan walikota menjaga kualitas infrastruktur & tata-perumahan: Membangun infrastruktur yang tangguh dan menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin.
2. Tujuan Berkaitan (Interkoneksi SDGs)
 - SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur tangguh, industrialisasi sadar-lingkungan-hidup nan-berkelanjutan, dan menyuburkan inovasi untuk mendukung kota.
 - SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan: Memastikan kota menjadi inklusif, mengurangi ketimpangan dalam akses layanan dan sumber daya terutama bagi kelompok-miskin.
 - SDG 13: Aksi Iklim: Mengintegrasikan aksi iklim dan adaptasi dalam perencanaan kota.
 - SDG 1: Tanpa Kemiskinan & SDG 2: Tanpa Kelaparan: Mengatasi akar penyebab kemiskinan di perkotaan melalui penciptaan pekerjaan layak (SDG 8) dan layanan dasar kehidupan manusia.
 - SDG 6: Air Bersih & Sanitasi Layak: Memastikan akses air bersih dan sanitasi yang layak di perkotaan.
 - SDG 7: Energi Bersih & Terjangkau: Mendorong penggunaan energi bersih dalam pembangunan kota.
 3. Mekanisme Implementasi (Program SDG Cities PBB)
 - Dukungan Teknis & Kapasitas: UN-Habitat mendukung pembangunan kapasitas kota dalam kebijakan, perencanaan, tata kelola, dan pembiayaan.
 - Inovasi & Data: Membangun laboratorium perkotaan (Urban Labs) untuk mengembangkan solusi berbasis data dan praktik terbaik.
 - Pembiayaan: Menghubungkan inisiatif kota dengan sumber pembiayaan melalui platform investasi (Platform Investasi Kota/CIP) dan APBN/D infrastruktur

Program NKRI

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 11 PBB, yaitu "Kota dan Permukiman Berkelanjutan", melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga di Indonesia, dengan koordinasi utama berada di bawah Kementerian PPN/Bappenas. Berbagai K/L mendapat alokasi tugas berdasar program dalam SDG memiliki peran spesifik sesuai dengan target yang ingin dicapai, antara lain:

Kementerian Koordinator dan Perencanaan

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas: Berperan sebagai koordinator utama pelaksanaan SDGs di Indonesia, termasuk perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional yang mengintegrasikan target SDG 11 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Turut mendukung akselerasi pencapaian SDGs, termasuk menggalakkan investasi dalam infrastruktur berkelanjutan.

Kementerian Pelaksana Teknis

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Memiliki peran sentral dalam penyediaan akses perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, serta perbaikan kawasan kumuh (target 11.1), dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang tangguh.

- Kementerian Perhubungan: Bertanggung jawab untuk menyediakan akses ke sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan, serta meningkatkan keselamatan jalan (target 11.2).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Berperan dalam



mengurangi dampak buruk perkotaan terhadap lingkungan per kapita, termasuk perhatian khusus pada kualitas udara dan pengelolaan limbah padat kota (target 11.6).

- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) - Ditjen Bina Pembangunan Daerah: Berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan rencana terpadu menuju ketahanan terhadap bencana dan manajemen risiko bencana (target 11.b).

Lembaga Lainnya

- Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota): Merupakan pelaksana utama di lapangan yang mengadaptasi target-target SDG 11 sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal masing-masing wilayah, termasuk penyediaan ruang publik hijau yang aman dan inklusif (target 11.7).
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/D RI): Berperan dalam pengawasan pelaksanaan SDGs oleh pemerintah di tingkat nasional maupun daerah.

Setiap K/L menjalankan tugasnya melalui program dan kebijakan spesifik yang terkoordinasi untuk mewujudkan kota dan pemukiman di Indonesia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan pada tahun 2030.

Bagi negara seluas Eropa, program pembangunan komunitas secara geografis di NKRI merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan versi SDG PBB. Strategi utama ber pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial untuk memanfaatkan potensi-daerah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah geografis.

Program-program ini diimplementasikan melalui berbagai kebijakan dan inisiatif pemerintah pusat dan daerah, termasuk:

1. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas

Negara amat luas, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil dan meningkatkan aksesibilitas, yang sangat penting mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan maritim.

- Proyek Strategis Nasional (PSN): Meliputi pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, dan pelabuhan di berbagai pulau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat kegiatan ekonomi baru.
- Pembangunan Sumber Daya Air: Fokus pada pembangunan bendungan, irigasi, dan sistem penyediaan air baku untuk mendukung sektor pertanian dan kebutuhan dasar masyarakat.
- Pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan: Penyediaan Puskesmas Pembantu (Pustu) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di pedesaan, terutama di desa-desa yang secara geografis memerlukan perhatian khusus.
- Pembangunan infrastruktur produktif untuk mendorong laju-kemakmuran, antara lain keamanan, kemudahan ber-usaha dan/atau mencari nafkah-legal, berbagai sarana pokok perindustrian-perdagangan DN/LN.

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Domestik

Pemerintah provinsi bertugas mendeteksi pemda/desa dan kelompok masyarakat tidak-berdaya. Program-program ini dirancang dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dan mengoptimalkan sumber daya lokal.

- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri: Bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di tingkat pedesaan/perkotaan.
- Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah: Fokus pada komoditas spesifik wilayah, seperti pariwisata, sagu, pala, kopi, atau perikanan tangkap, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.
- Bantuan Sosial: Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kerentanan sosial masyarakat di seluruh wilayah.

Pemberdayaan ekonomi domestik adalah proses meningkatkan kapasitas dan kapabilitas ekonomi rumah-tangga atau unit ekonomi UMKM di dalam suatu negara untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik.

Tujuannya meliputi:

- Peningkatan Pendapatan: Membantu keluarga meningkatkan sumber pendapatan mereka.
- Pengembangan Keterampilan: Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja lokal atau peluang wirausaha.
- Akses ke Sumber Daya: Memfasilitasi akses ke modal usaha, bahan baku, teknologi, dan pasar.
- Ketahanan Ekonomi: Membangun kemampuan komunitas untuk bertahan dan pulih dari guncangan ekonomi.

Beberapa contoh program pemberdayaan ekonomi domestik di Indonesia meliputi:

- Program Keluarga Harapan (PKH): Memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Informasi lebih lanjut tersedia di situs web resmi Kementerian Sosial.
- UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah): Pemerintah mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan, pelatihan, dan bantuan permodalan. Panduan dan informasi terkait dapat ditemukan di portal UMKM Kementerian Koperasi dan UKM.
- Program Kredit Usaha Rakyat (KUR): Memfasilitasi pinjaman dengan bunga rendah bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Rincian lebih lanjut tersedia melalui bank-bank yang ditunjuk atau di website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Pelatihan Vokasi: Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia menawarkan berbagai pelatihan keterampilan kerja. Anda dapat menemukan jadwal dan jenis pelatihan di website Kementerian Ketenagakerjaan.

3. Penataan Ruang dan Tata-Kelola

NKRI sebuah negara seluas 50 % Eropa, strategi tata-ruang menjadi pedoman penting untuk memastikan pembangunan berjalan terencana dan berkelanjutan, mempertimbangkan sentra-sentra pengembangan wilayah, kawasan lindung, dan potensi kebencanaan.

- Sistem Informasi Geografis (GIS): Pemanfaatan teknologi GIS untuk pemetaan potensi daerah, pengelolaan tata ruang, dan pengambilan keputusan kebijakan yang lebih baik.
- Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan: Melibatkan partisipasi luas dari kelompok adat, agama, pemerintah, swasta, dan universitas untuk memperkuat rasa kepemilikan dan keberlanjutan pembangunan wilayah.

Untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, dengan pilar pemerataan pembangunan yang mengurangi kesenjangan pendapatan - wilayah, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Program pembangunan di Indonesia yang paling menonjol dan mencakup aspek-aspek kota, ibu kota, perdagangan, perindustrian, dan komunitas secara geografis saat ini antara-lain adalah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kantong-kantong industri. Program ini dirancang sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional yang lebih luas dan bertujuan untuk pemerataan pembangunan.

Program tata ruang nasional Indonesia terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) diwujudkan melalui integrasi aspek pembangunan berkelanjutan ke dalam hirarki rencana tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Integrasi SDGs dalam Penataan Ruang NKRI sbb :

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai 17 tujuan SDGs pada tahun 2030, dan penataan ruang memegang peran krusial dalam pencapaian tersebut, terutama yang berkaitan dengan:

- SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan): Ini adalah tujuan yang paling langsung terkait, berfokus pada pembangunan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Penataan ruang diarahkan untuk menjamin akses terhadap perumahan layak, pelayanan dasar, transportasi, serta penyediaan ruang terbuka hijau yang cukup.
- SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak): Rencana tata ruang berperan dalam memastikan penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang layak dan efisien, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
- SDG 15 (Ekosistem Darat): Penataan ruang mempertimbangkan aspek konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati, termasuk pemanfaatan ruang untuk pertahanan dan pengelolaan ekosistem darat secara berkelanjutan.
- SDG 2 (Tanpa Kelaparan): Tata ruang juga mendukung ketahanan pangan melalui alokasi ruang untuk pertanian berkelanjutan.

Program dan Kebijakan Utama

1. Penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Daerah (RAN/RAD SDGs): Pemerintah daerah, dikoordinasikan oleh Bappenas di tingkat nasional, menyusun rencana aksi yang mengukur dan memonitor ketercapaian target SDGs, yang di dalamnya terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Penerapan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang mengamankan pembangunan tata ruang yang efektif, efisien, dan mengintegrasikan aspek lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Mendorong Pertumbuhan Perkotaan Berkelanjutan: Melalui penyusunan RDTR berkualitas, pemerintah mendorong pertumbuhan perkotaan yang terencana untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
4. Kolaborasi Multi-pihak (5P - People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership): Pencapaian SDGs dalam tata ruang menekankan kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi untuk memastikan prinsip inklusivitas dan "tidak ada yang tertinggal" (leave no one behind).
5. Peran Kementerian PUPR: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan aktif dalam memastikan komitmen pada lingkungan dan mewujudkan amanat SDGs melalui pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana.

Secara keseluruhan, program tata ruang NKRI berfungsi sebagai pedoman spasial untuk mengimplementasikan pembangunan yang seimbang antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, selaras dengan prinsip-prinsip SDGs.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Program IKN (Ibu Kota Nusantara) sangat terkait erat dengan SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama melalui konsep "Kota Hutan" (Forest City) yang berfokus pada restorasi ekosistem, minimisasi dampak lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan SDGs No. 15 (Life on Land), serta kontribusi pada tujuan lain seperti energi bersih (SDG 13) dan kesejahteraan masyarakat lokal (SDG 1, 2, 8) melalui kemitraan multipihak dan pelaporan berkala (VLR) untuk memastikan pembangunan modern selaras dengan prinsip keberlanjutan global, seperti yang dijelaskan oleh Otorita IKN dan UNESCAP.

Hubungan Spesifik IKN dengan SDGs:

1. SDG 15 (Life on Land - Ekosistem Darat):
 - Konsep Kota Hutan: 65% wilayah IKN akan menjadi hutan tropis, restorasi ekosistem, dan ruang terbuka hijau.
 - Infrastruktur Satwa: Pembangunan jembatan satwa (wildlife crossing) di atas jalan tol untuk menjaga jalur migrasi fauna.
 - Wanagama Nusantara: Area khusus untuk pengelolaan hutan berkelanjutan.
2. SDG 13 (Climate Action - Penanganan Perubahan Iklim):
 - Kota Rendah Karbon: IKN dirancang sebagai kota yang mengurangi emisi karbon dan menggunakan energi bersih, menjadi model kota masa depan.
3. SDG 1 (No Poverty) & SDG 8 (Decent Work & Economic Growth):
 - Pemberdayaan Masyarakat: Pelatihan (upskilling) dan dukungan mata pencaharian berkelanjutan bagi warga sekitar, seperti pertanian hidroponik.
 - Kemitraan: Pelibatan aktif masyarakat lokal dan aktor non-negara untuk pembangunan yang inklusif.
4. SDG 2 (Zero Hunger):
 - Dukungan terhadap ketahanan pangan melalui program seperti pertanian mandiri dan lumbung pangan masyarakat.
5. SDG 4 (Quality Education) & SDG 6 (Clean Water & Sanitation):
 - Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan secara rinci di snippet, pembangunan kota berkelanjutan secara inheren mencakup penyediaan pendidikan berkualitas dan air bersih/sanitasi layak.

Mekanisme Implementasi & Pelaporan:

- Voluntary Local Review (VLR) Nusantara: Otorita IKN meluncurkan VLR untuk melaporkan kemajuan pencapaian SDGs di Nusantara kepada komunitas global, mencakup tantangan dan solusi.
- Peta Jalan SDGs 2030: Penyusunan peta jalan terukur dan berbasis sains untuk mencapai SDGs di IKN.
- Kemitraan Multipihak: Kolaborasi erat dengan pemerintah pusat, daerah, swasta, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan (UNESCAP, UNHABITAT, UNDP).

Secara keseluruhan, IKN bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi laboratorium pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ke dalam setiap aspek pembangunannya, menjadikannya contoh nyata komitmen Indonesia terhadap Agenda 2030 global.

IKN, yang berlokasi di Kalimantan Timur, direncanakan menjadi "Kota Dunia bagi Semua" (*World Class City for All*), sebuah kota cerdas (*smart city*) dan kota hutan (*forest city*) yang berkelanjutan dan inklusif.

Tujuan Utama:

- Pemerataan Pembangunan: Mengurangi beban kepadatan Jakarta dan pusat kegiatan ekonomi yang selama ini terpusat di Pulau Jawa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur.
- Transformasi Ekonomi: IKN menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru dan pusat kluster inovasi serta riset.
- Pembangunan Berkelanjutan: IKN modern menerapkan standar baru pembangunan yang berkualitas, adaptif, inovatif, dan berwawasan lingkungan.

Aspek-aspek Program:

- Pembangunan Kota dan Infrastruktur: Meliputi pembangunan infrastruktur utama seperti jalan, perumahan (Rusun ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri), dan fasilitas dasar lain.
- Pusat Pemerintahan: Berfungsi sebagai ibu kota politik yang direncanakan mulai beroperasi secara seremonial pada 17 Agustus 2024 dan bertahap hingga menjadi ibu kota politik paripurna pada 2028.
- Perdagangan dan Perindustrian: Meskipun IKN fokus pada fungsi pemerintahan dan kota cerdas, pengembangan perindustrian dan perdagangan diharapkan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh wilayah Indonesia dan menarik investasi, termasuk insentif pajak untuk investor.
- Pembangunan Komunitas Secara Geografis: Pembangunan melibatkan pelibatan publik, masyarakat lokal, dan pendekatan sosial-budaya yang inklusif untuk memastikan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di IKN itu sendiri.

Berdasarkan informasi terkini hingga Desember 2025, kondisi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat digambarkan sedang tumbuh dan berkembang baik, dengan kemajuan signifikan dalam penyelesaian proyek infrastruktur dan dimulainya tahap kedua pembangunan.

Berikut adalah fakta-fakta kunci mengenai kondisi IKN saat ini:

- Progres Pembangunan: Pembangunan tahap 1 secara keseluruhan telah mencapai lebih dari 71% dengan total investasi mencapai Rp 47,5 triliun, dan beberapa sumber bahkan menyebutkan tahap 1 sudah rampung 100% pada Juli 2025. Saat ini, IKN telah memasuki pembangunan tahap kedua yang fokus pada pembentukan ekosistem perkotaan yang lengkap, termasuk kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif.
- Infrastruktur dan Fasilitas:

- Jalan dan Akses: Pembangunan jalan dan jalan tol IKN terus berlangsung, dengan beberapa ruas jalan menerapkan sistem kerja tiga shift untuk mempercepat penyelesaian. Tol IKN bahkan akan dibuka gratis untuk sementara waktu selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.
- Hunian: Rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) telah tersedia dan mulai ditempati oleh CPNS, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti air siap minum, AC, dan dapur.
- Fasilitas Lainnya: Fasilitas pendukung seperti rumah sakit Kemenkes, kampus Gunadarma, dan area terbuka hijau di sekitar Bandara Nusantara juga sedang dibangun secara masif.
- Kehidupan di IKN: Kawasan IKN semakin ramai dengan kedatangan ASN, pegawai rumah sakit, hotel, serta petugas kebersihan dan keamanan. Berbagai kegiatan dan acara juga sering diadakan di sana, menandakan adanya kehidupan dan dukungan terhadap ibu kota baru.
- Komitmen Pemerintah: Pemerintah, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, secara tegas memastikan bahwa proyek IKN tetap berlanjut di era pemerintahan yang baru sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia.

Meskipun ada beberapa sorotan dari media internasional mengenai tantangan dan risiko tertentu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proyek IKN terus berjalan dengan aktivitas konstruksi yang tinggi dan fasilitas yang mulai berfungsi. Tujuan IKN sebagai ibu kota politik ditargetkan tercapai pada tahun 2028.

Program Lain

- Selain IKN, pemerintah juga memiliki program pembangunan kota perdagangan dan perindustrian di berbagai daerah di NKRI, yang dikelola oleh kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing ekonomi daerah. Contoh kota industri yang sudah berkembang pesat adalah Karawang di Jawa Barat.
 - Program pembangunan pemerintah daerah (Pemda) dan desa di Indonesia secara geografis didasarkan pada prinsip pemanfaatan potensi lokal dan penanganan tantangan spesifik wilayah untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini menekankan pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi geografis NKRI yang beragam (kepulauan, pesisir, dataran tinggi, dll.).
 - Prinsip Pembangunan Berbasis Geografis.
Perencanaan pembangunan desa dan daerah diatur dalam dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang memasukkan aspek geografis dalam tahap pengkajian keadaan desa dan identifikasi potensi.
- Pendekatan meliputi:
- Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG): Membantu Pemda dalam menggambarkan kondisi fisik wilayah, mengidentifikasi potensi, dan merencanakan tata ruang secara efektif.
 - Pendekatan Top-down dan Bottom-up: Perencanaan dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, dengan masukan dari masyarakat setempat (musrenbang) untuk memastikan relevansi program dengan kebutuhan geografis lokal.

Contoh Program Berdasarkan Kondisi Geografis

Berikut adalah program-program spesifik yang disesuaikan dengan karakteristik geografis di Indonesia:

1. Wilayah Pesisir dan Kepulauan
 - Pengembangan Infrastruktur Kelautan: Pembangunan pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan (TPI), dan *cold storage* untuk mendukung ekonomi maritim.
 - Pariwisata Bahari: Pengembangan ekowisata, konservasi terumbu karang, dan fasilitas penunjang pariwisata untuk meningkatkan pendapatan lokal.
 - Akses Air Bersih: Program desalinasi atau pipanisasi air bersih, mengingat tantangan keterbatasan sumber air tawar di beberapa pulau kecil.
2. Wilayah Pertanian (Dataran Rendah dan Tinggi)
 - Infrastruktur Irigasi: Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.
 - Pengembangan Pertanian Terpadu: Program intensifikasi pertanian, penyediaan bibit unggul, dan akses modal bagi petani untuk mengoptimalkan lahan pertanian.
 - Inovasi Teknologi Pertanian: Penggunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi panen.
3. Wilayah Pegunungan dan Pedalaman
 - Pembangunan Akses Jalan: Pembukaan dan perbaikan jalan desa untuk menghubungkan daerah terpencil dengan pusat ekonomi terdekat, mengatasi isolasi geografis.
 - Penyediaan Energi Terbarukan: Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) atau panel surya untuk menjangkau daerah yang sulit terakses jaringan listrik utama.
 - Konservasi Hutan: Program pengelolaan sumber daya alam dan konservasi hutan untuk menjaga ketersediaan sumber air dan mencegah bencana alam seperti longsor.

Secara umum, pemerintah daerah dan desa menggunakan Dana Desa dan alokasi dana lainnya untuk memprioritaskan pembangunan paling relevan dengan kondisi fisik dan sosial-ekonomi wilayahnya, dengan tujuan akhir mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Program-program utama

- Ibu Kota Nusantara (IKN): Proyek *mega* ini dirancang sebagai kota masa depan dengan konsep *smart* dan *green city*. IKN bertujuan mengintegrasikan ruang terbuka hijau yang luas, menggunakan energi terbarukan, dan menerapkan sistem transportasi umum yang efisien untuk mengurangi jejak karbon.
- National Urban Development Project (NUDP): Ini adalah platform transformasi pembangunan perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan, berbasis pada pengembangan infrastruktur perkotaan cerdas (Smart Integrated Urban Infrastructure Development Program). Proyek ini melibatkan kerja sama dengan Bank Dunia dan diharapkan dapat menarik banyak investor.
- Gerakan Menuju 100 Smart City: Smart City dirancang khusus sebagai kota bersih-sampah dan limbah, tidak dan serangga hunian-padat. Digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama kementerian terkait lain, gerakan ini membimbing pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun masterplan kota cerdas untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dan akselerasi potensi daerah. Program ini mendorong pendekatan yang berpusat pada masyarakat (*citizen centric*).
- 50 Kota Prioritas: Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029, pemerintah menetapkan 50 kota sebagai prioritas pembangunan untuk

menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh Indonesia. Salah satu fokus program ini adalah membenahan dan pembangunan layanan transportasi umum yang terpadu.

- Kota Berkelanjutan dan Inklusif: Kota berdaya-layan khusus bagi masyarakat miskin. Arah pembangunan kota juga menekankan pada prinsip inklusivitas dan keberlanjutan, memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, serta perbaikan permukiman kumuh, sejalan dengan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB.

Secara keseluruhan, program-program ini diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan perkotaan yang inovatif, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan

Program Pembangunan Kota Pesisir di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan inisiatif terpadu yang berfokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, mitigasi bencana, dan kesejahteraan masyarakat, dengan landasan hukum sbb:

- Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (yang kemudian diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014).
- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 yang memperkuat tata kelola perizinan berusaha.

Program Utama dan Strategi sbb :

Program dan proyek utama pemerintah saat ini meliputi:

- Pembangunan Terpadu Kawasan Pesisir Ibu Kota Negara (NCICD) / Giant Sea Wall: Proyek strategis nasional ini bertujuan untuk melindungi puluhan juta penduduk di pesisir utara Jawa, khususnya Jakarta, dari ancaman banjir rob yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah. Pembangunannya mencakup tanggul pantai (seperti di Segmen Asahimas dan Muara Angke) serta tanggul laut dengan skema hibrida.
- Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL): Proyek ini melibatkan reklamasi dan pengembangan kawasan pesisir terpadu di Surabaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dengan rencana pembangunan fasilitas zona perikanan dan perumahan bagi nelayan.
- Pembangunan Kota Pesisir di Pantura Jawa: Selain Jakarta dan Surabaya, pemerintah melalui Kemenko Marves mengawal proyek pengamanan pesisir di lima perkotaan lain di sepanjang Pantura Jawa untuk memperkuat ketahanan wilayah dari bencana.
- Program Konservasi dan Ekonomi Biru: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimplementasikan berbagai program berbasis ekonomi biru, termasuk proyek LAUTRA (*Lautan untuk Ketahanan*, didukung Bank Dunia) untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir yang berkelanjutan.
- Pengembangan Perikanan: Pemerintah menargetkan 65 desa pesisir pada tahap awal pembangunan untuk meningkatkan produktivitas, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana perikanan dari hulu ke hilir.

Fokus dan Tujuan Program

1. Menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman hayati ekosistem pesisir.

3. Mendorong pertumbuhan wilayah melalui pengembangan ekonomi biru yang mengintegrasikan perencanaan ruang laut dengan darat.
4. Mengatasi isu perubahan iklim dan kebencanaan dengan membangun infrastruktur mitigasi seperti tanggul laut dan perlindungan ekosistem bakau.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan, peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta adopsi teknologi.

Kerangka Hukum dan Tata Kelola

Pemerintah berupaya memastikan proses perizinan yang efisien namun tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Penggunaan aplikasi digital seperti SiAP dan *Si-Small Island Investment Application* (Pulacil.id) dirancang untuk memudahkan proses perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya secara transparan dan akuntabel.

Kementerian/Lembaga Utama yang Terlibat dalam SDG 1

Meskipun dokumen matriks spesifik tidak tersedia secara langsung dalam hasil pencarian, K/L yang umumnya terlibat dalam pencapaian SDG 11 (yang mencakup perumahan rakyat, sanitasi, transportasi, dan penataan ruang) berdasarkan mandat dan program kerja nasional antara lain meliputi:

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Berperan sentral dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, infrastruktur perkotaan, dan sanitasi.
- Kementerian Perhubungan (Kemenhub): Bertanggung jawab atas sistem transportasi yang berkelanjutan dan terjangkau di perkotaan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Terkait dengan penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan limbah, dan kualitas lingkungan perkotaan.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN): Berperan dalam penataan ruang dan perencanaan tata kota yang inklusif dan tangguh.
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Mengoordinasikan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.
- Badan Pusat Statistik (BPS): Bertanggung jawab atas penyediaan data dan statistik untuk mengukur indikator capaian SDG 11.

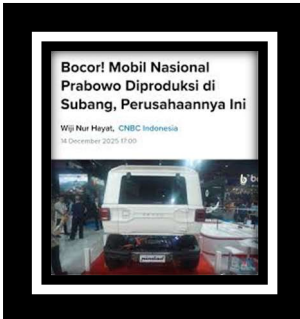
Untuk mendapatkan rincian pembagian tugas yang lebih spesifik dan terkini, pembaca dapat merujuk pada dokumen resmi "Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" dan "Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia" yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dokumen-dokumen ini tersedia untuk diakses melalui perpustakaan digital Bappenas atau portal SDGs Indonesia.

12. PROGRAM KONSUMSI & PRODUKSI NAN-BERTANGGUNG-JAWAB

Agenda PBB untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 12 berfokus pada Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, bertujuan untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan untuk masa kini dan masa depan. Tujuan ini memiliki 11 target spesifik yang mencakup berbagai aspek pengelolaan sumber daya dan limbah. Industri substitusi impor dan industri bertujuan ekspor diutamakan.

Berikut adalah rincian target utama dalam SDG 12:

- 12.1 Pelaksanaan Kerangka Kerja 10 Tahun: Menerapkan Kerangka Kerja Program 10 Tahun tentang Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, dengan negara-negara maju memimpin upaya ini.
- 12.2 Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.



- 12.3 Pengurangan Limbah Pangan: Pada tahun 2030, mengurangi separuh limbah pangan global per kapita di tingkat ritel dan konsumen, serta mengurangi kehilangan pangan di sepanjang rantai produksi dan pasokan.

- 12.4 Pengelolaan Bahan Kimia dan Limbah yang Aman: Mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua limbah secara ramah lingkungan sepanjang siklus hidupnya, dan mengurangi pelepasannya ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

- 12.5 Pengurangan Produksi Limbah: Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.

- 12.6 Mendorong Praktik Perusahaan yang Berkelanjutan: Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan ke dalam siklus pelaporan mereka.
- 12.7 Pengadaan Publik yang Berkelanjutan: Mempromosikan praktik pengadaan publik (pemerintah) yang berkelanjutan, sesuai dengan prioritas nasional.
- 12.8 Akses Informasi dan Kesadaran Gaya Hidup Berkelanjutan: Pada tahun 2030, memastikan bahwa orang di mana saja memiliki informasi dan kesadaran yang relevan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

Instrumen kebijakan

- 12.a Dukungan Kapasitas Ilmiah dan Teknologi: Mendukung negara-negara berkembang dalam memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak menuju pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.
- 12.b Pengembangan dan Penerapan Instrumen: Mengembangkan dan menerapkan instrumen untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan guna mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
- 12.c Rasionalisasi Subsidi Bahan Bakar Fosil: Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan merestrukturisasi perpajakan dan menghapus subsidi yang berbahaya tersebut.

Tujuan SDG Industrialisasi menekankan pentingnya menggunakan sumber daya secara efisien, mengurangi dampak negatif pada lingkungan, serta mendorong industri dan konsumen untuk mendaur ulang dan mengurangi sampah.

Implementasi SDG 12 di NKRI

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Dukcapil, jumlah penduduk Indonesia hingga semester I tahun 2024 mencapai

282,48 juta jiwa. Sementara data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 mencatat angka sedikit berbeda, yaitu 281,6 juta jiwa.

Sebaran Penduduk Indonesia

Sebaran penduduk di Indonesia masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang menunjukkan ketimpangan demografi yang signifikan.

Berikut adalah estimasi sebaran penduduk berdasarkan pulau utama:

- Pulau Jawa: Lebih dari separuh total populasi Indonesia, sekitar 56,10% atau 151,59 juta jiwa (data Sensus Penduduk 2020).
- Pulau Sumatra: Merupakan sebaran terbesar kedua, dengan jumlah sekitar 21,68% atau 58,56 juta orang (data Sensus Penduduk 2020).
- Pulau Lainnya: Sisanya tersebar di pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan kepulauan lainnya.

Pemerintah terus berupaya mengatasi ketimpangan sebaran penduduk ini melalui berbagai program pembangunan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan infrastruktur di luar Jawa. Data kependudukan yang lebih rinci dapat diakses melalui situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) atau Dukcapil Kemendagri

Pembangunan Industri NKRI :

Pembangunan industri produksi dan bertanggung jawab di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, mewujudkan kemandirian ekonomi, dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Program ini dijalankan melalui kebijakan yang mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Utama Program Industri NKRI

Tujuan utama program pembangunan industri produksi dan bertanggung jawab di Indonesia mencakup beberapa aspek kunci:

- Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja yang luas.
- Mewujudkan Kemandirian Bangsa: Mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan membangun struktur industri manufaktur dalam negeri yang mandiri dan berdaulat.
- Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas: Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan hasil budidaya secara optimal.
- Pengembangan Teknologi: Mendorong perkembangan teknologi dan inovasi industri untuk meningkatkan daya saing nasional.
- Penerimaan Devisa: Meningkatkan penerimaan devisa negara melalui ekspor produk industri.

Prinsip Pembangunan Bertanggung Jawab

Aspek "bertanggung jawab" dalam pembangunan industri menekankan pada penerapan prinsip-prinsip industri berkelanjutan, yang berarti:

- **Memperhatikan Keseimbangan Lingkungan:** Meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, termasuk pencegahan kerusakan dan pencemaran tanah, air, dan udara.
- **Industri Berwawasan Lingkungan:** Mengembangkan kawasan industri yang berwawasan lingkungan dan menerapkan konsep efisiensi sumber daya serta pengelolaan limbah terpadu (ekologi industri).
- **Keamanan dan Kesehatan:** Menciptakan sistem produksi yang aman dan sehat bagi karyawan, konsumen, dan masyarakat sekitar.
- **Pengelolaan Sumber Daya:** Melestarikan energi dan sumber daya alam dalam proses produksi.

Kerangka Kebijakan

Pemerintah Indonesia menggunakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) sebagai pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pengembangan industri nasional. Kebijakan terkini seperti inisiatif "Making Indonesia 4.0" juga diluncurkan untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur dengan memanfaatkan teknologi digital.

Program Konsumsi SDG antara-lain diterjemahkan menjadi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sebelumnya dikenal sebagai program makan siang gratis. Program ini merupakan inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program prioritas kabinet, memiliki alokasi anggaran yang signifikan dalam APBN, yaitu Rp 71 triliun untuk tahun 2025 dan direncanakan meningkat drastis menjadi Rp 335 triliun untuk tahun 2026.

Anggaran MBG dalam APBN

Berikut rincian mengenai anggaran program MBG:

- **APBN 2025:** Alokasi pagu anggaran untuk program MBG adalah sebesar Rp 71 triliun. Hingga 18 November 2025, realisasi penyerapan anggaran tercatat mencapai Rp 41,3 triliun, atau sekitar 58,2% dari pagu tahunan. Program ini telah melayani hampir 42 juta penerima manfaat melalui 15.369 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
- **APBN 2026:** Anggaran untuk MBG melonjak signifikan menjadi Rp 335 triliun. Program ini menjadi salah satu dari delapan fokus agenda prioritas pemerintah pada tahun 2026. Anggaran ini ditujukan untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat.



Perbandingan dan Dampak

Anggaran MBG merupakan salah satu kebijakan sosial terbesar/termahal dalam sejarah APBN Indonesia dan sebagian dananya dialokasikan dari porsi anggaran pendidikan. Anggaran harian program ini diproyeksikan mencapai Rp 1,2 triliun per hari mulai Januari 2026 untuk melayani target penerima. Program ini juga diklaim telah menyerap lebih dari setengah juta tenaga kerja dan memberdayakan UMKM lokal.

Target sasaran akhir dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Kabinet Prabowo Subianto adalah 82,9 juta penerima manfaat. Target ini direncanakan akan tercapai secara bertahap.

Berikut rincian mengenai target dan capaian program MBG:

- Target Akhir: Target penuh program ini adalah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, yang mencakup anak sekolah (PAUD hingga SMA), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
- Target Waktu: Pencapaian target 82,9 juta penerima ini diprediksi akan terealisasi sepenuhnya pada sekitar bulan Februari atau Maret 2026.
- Capaian Saat Ini (per Oktober/November 2025): Hingga akhir Oktober 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 36,7 juta penerima manfaat di seluruh 38 provinsi di Indonesia.

Program ini dijalankan secara bertahap, dengan fokus pada pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur terpusat di berbagai kecamatan di seluruh Indonesia untuk memastikan distribusi yang efektif.

Tujuan Utama Program MBG

Tujuan utama dari Program Makan Bergizi Gratis sejalan dengan visi "Sehat Cerdas NKRI", yaitu:

- Mengatasi Malnutrisi dan Stunting: Program ini menargetkan kelompok rentan seperti balita, anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui untuk memastikan asupan gizi seimbang, yang krusial dalam pencegahan stunting dan gizi buruk.
- Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul: Dengan memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup sejak dini, pemerintah bertujuan untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan.
- Meningkatkan Konsentrasi Belajar: Asupan gizi yang baik terbukti dapat meningkatkan kehadiran dan konsentrasi siswa di sekolah, mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif.
- Mendorong Perubahan Pola Konsumsi: Program ini juga berfungsi sebagai sosialisasi intensif untuk membiasakan pola makan sehat dan bergizi seimbang di kalangan masyarakat luas.

Pelaksanaan dan Dampak

Program MBG mulai diimplementasikan secara bertahap pada Januari 2025 di 190 titik di 26 provinsi di Indonesia. Pelaksanaannya melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah, dengan pengawasan ahli gizi untuk memastikan menu yang disajikan memenuhi standar nutrisi. Sistem MBG adalah utama, untuk mencegah KKN dan keracunan konsumen MBG.

Selain MBG, terdapat juga program-program pendukung lainnya seperti:

- Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN): Program di tingkat daerah, seperti di Jawa Tengah, yang mendorong konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani kaya omega-3 untuk mendukung pertumbuhan otak anak.
- Program Gizi di Puskesmas: Layanan konseling gizi untuk ibu hamil, balita, dan kelompok lainnya yang tersedia di fasilitas kesehatan primer di seluruh Indonesia.

13. PROGRAM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM BUMI

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi perubahan iklim dunia secara spesifik tercantum dalam Tujuan 13: Aksi Iklim. Tujuan ini menyerukan tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, yang juga terkait erat dengan 16 tujuan lainnya.

Berikut adalah rincian target-target utama di bawah payung Tujuan 13 SDG:

- 13.1 Meningkatkan ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
- 13.2 Mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional.
- 13.3 Meningkatkan pendidikan, peningkatan kesadaran, serta kapasitas manusia dan institusional dalam mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak, dan sistem peringatan dini.
- 13.4 Mengimplementasikan komitmen berdasarkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), termasuk mobilisasi pendanaan iklim sebesar 100 miliar dolar AS per tahun dari negara maju kepada negara berkembang, dan mengoperasikan Green Climate Fund secepat mungkin.
- 13.5 Mempromosikan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan terkait perubahan iklim yang efektif di negara-negara kurang berkembang dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang, dengan fokus pada perempuan, pemuda, dan masyarakat lokal serta marjinal.

Melalui target-target ini, PBB mendorong setiap negara untuk membuat rencana aksi nasional masing-masing untuk mencapai tujuan mengantisipasi dampak-buruk perubahan iklim-global, sejalan dengan Perjanjian Paris yang bertujuan membatasi kenaikan suhu global hingga jauh di bawah 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri.

Kinerja NKRI:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki beberapa program unggulan yang secara langsung mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 13:

Aksi Iklim. Program-program ini berfokus pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta penguatan ketahanan masyarakat di tingkat tapak.

Program Utama KLHK untuk SDG Iklim

Berikut adalah program-program utama KLHK terkait SDG Iklim:

- Program Kampung Iklim (ProKlim): Ini adalah inisiatif kunci yang mendorong komunitas masyarakat di tingkat desa/kelurahan untuk secara aktif melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. ProKlim berkontribusi signifikan terhadap SDG 13 serta beberapa SDG lainnya, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan kehidupan sehat (SDG 3).
- Indonesia's FOLU Net Sink 2030: KLHK telah menetapkan kebijakan ini melalui Keputusan Menteri LHK Nomor 168 tahun 2022 sebagai target nasional untuk pengendalian perubahan iklim. Program ini berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, dengan tujuan mencapai serapan bersih (net sink) karbon pada tahun 2030.
- Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan REDD+: Melalui kerja sama internasional, seperti program Forest and Climate (FORCLIME) dengan Jerman, KLHK mengimplementasikan strategi konservasi hutan dan pengelolaan hutan lestari untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).
- Perdagangan Karbon: KLHK menyosialisasikan dan mengembangkan mekanisme perdagangan karbon di sektor kehutanan, yang bertujuan untuk memberikan insentif finansial bagi upaya pengurangan emisi dan peningkatan cadangan karbon.

- Pengembangan Generasi Peduli Iklim: Melalui inisiatif seperti "Climate Generation Summit", KLHK berupaya mencetak generasi muda yang memiliki pengetahuan dan semangat untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan dan aksi iklim.
- Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) KLHK memiliki mandat untuk mengimplementasikan program ketahanan bencana dan perubahan iklim sebagai bagian dari rencana strategis mereka.

Program-program ini menunjukkan pendekatan multi-sektor dan berbasis komunitas yang diterapkan oleh KLHK untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan mencapai target SDG 13 di Indonesia. Informasi lebih detail dapat diakses melalui situs resmi Kementerian LHK atau Ditjen PPI.

Kinerja terbaru NKRI dalam mengatasi perubahan iklim masih pada posisi “sangat tidak memadai”, namun menunjukkan adanya peningkatan ambisi target dan berbagai kebijakan baru, meskipun masih menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi dan pencapaian target energi terbarukan.

Komitmen dan Kebijakan Utama

- Peningkatan Target NDC (Nationally Determined Contribution): Indonesia telah meningkatkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam dokumen *Enhanced NDC* (2022) menjadi 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional. Pemerintah berencana mengajukan *Second NDC* pada awal 2025 dengan target yang lebih ambisius dan selaras dengan skenario 1,5°C Persetujuan Paris, menggunakan tahun inventarisasi 2019 sebagai patokan.
- Target *Net Sink* Sektor FOLU (Forestry and Other Land Use) 2030: Indonesia berkomitmen mencapai penyerapan bersih karbon (carbon net sink) di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030, yang menjadi pilar penting dalam strategi iklim nasional.
- Pajak Karbon dan Perdagangan Emisi: Pemerintah telah mengimplementasikan skema perdagangan karbon untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara sejak tahun 2024, dengan rencana untuk memperluas cakupan pajak karbon ke sektor industri lainnya secara bertahap mulai tahun 2025.
- Transisi Energi: Meskipun menghadapi tantangan, pemerintah memprioritaskan transisi energi bersih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Presiden Prabowo Subianto pada KTT G20 November 2024 mengumumkan komitmen untuk memensiunkan PLTU batu bara dalam 15 tahun ke depan dan membangun 75 GW kapasitas energi terbarukan.

Kesimpulan:

- Peringkat Kinerja Iklim: Menurut *Climate Action Tracker* (CAT), kinerja iklim Indonesia secara keseluruhan masih diklasifikasikan dalam kategori "Sangat Tidak Memadai" karena beberapa kebijakan, seperti ketergantungan pada batu bara dan deforestasi, belum sepenuhnya selaras dengan target global 1,5°C.
- Target Energi Terbarukan: Indonesia masih jauh dari target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, dengan realisasi saat ini sekitar 14%.
- Pendanaan Iklim: Pencairan dana iklim internasional yang dijanjikan, seperti dari skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP), berjalan lambat, meskipun Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menyetujui pinjaman kebijakan senilai \$500 juta pada September 2024.

Secara ringkas, Indonesia menunjukkan niat politik yang meningkat dan kerangka kebijakan yang berkembang, namun kecepatan dan efektivitas implementasi masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target ambisiusnya.

Program terbaru NKRI untuk perubahan iklim berfokus pada penguatan target pengurangan emisi melalui dokumen *Second Nationally Determined Contribution* (SNDC) dan implementasi berbagai inisiatif di tingkat nasional dan lokal.

Inisiatif dan program utama tersebut meliputi:

- *Second Nationally Determined Contribution* (SNDC) Indonesia telah menyampaikan dokumen SNDC kepada UNFCCC, yang menegaskan kembali komitmen untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dokumen ini menguraikan upaya yang lebih kuat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai sektor, termasuk kehutanan, energi, pertanian, industri, dan pengelolaan limbah.
- Indonesia *Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 Rencana operasional ini bertujuan mencapai tingkat emisi minus dari sektor kehutanan dan tata guna lahan pada tahun 2030, yang merupakan pilar penting dalam target iklim nasional.
- Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengenai penyelenggaraan instrumen NEK dan pengendalian emisi gas rumah kaca secara nasional. Regulasi ini menjadi payung hukum untuk perdagangan karbon dan mekanisme ekonomi berbasis iklim lainnya.
- Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) Terbaru KLHK meluncurkan SRN PPI versi terbaru untuk memperkuat transparansi aksi iklim dan implementasi NEK di Indonesia.
- Program Kampung Iklim (ProKlim) Ini adalah inisiatif akar rumput yang mendorong aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak/desa, dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
- *Climate Innovation Generation Program* (CIGPRO) 2024 Program ini berfokus pada inovasi iklim lintas generasi untuk menjembatani inovasi teknologi dan memobilisasi investasi dalam ketahanan iklim.
- Pengembangan Energi Terbarukan Pemerintah mendorong transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan, termasuk implementasi B40 yang ramah lingkungan dan penghentian pembangkit listrik berbahan bakar fosil secara bertahap.

Program-program tersebut menunjukkan pendekatan komprehensif Indonesia yang mencakup kebijakan makro, mekanisme pasar, hingga tindakan di tingkat komunitas untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

14. PROGRAM KEHIDUPAN DALAM AIR

Luas benua Eropa sekitar 10,5 juta km persegi, luas total wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sekitar 5,19 juta km², terdiri dari daratan sekitar 1,92 juta km² dan perairan lebih dari 3,25 juta km², menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000+ pulau, dan wilayahnya mencakup daratan, perairan, dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya sesuai UU No. 43 Tahun 2008.

Wilayah perairan Indonesia lebih dari 3,25 juta km², sekitar 70% dari total wilayah dan terbagi menjadi beberapa zona utama:

- Perairan Pedalaman (di dalam garis dasar),
- Laut Teritorial (12 mil laut dari garis dasar),
- Perairan Kepulauan (antar pulau),
- Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis dasar dengan hak berdaulat atas sumber daya
- Landas Kontinen (dasar laut di bawah 200 meter).
- Selain itu, terdapat juga Zona Tambahan (12-24 mil laut).

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kehidupan bawah air yang lestari dikenal sebagai SDG 14: Kehidupan di Bawah Air (*Life Below Water*). Tujuan utamanya adalah "Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan samudra, laut, dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan".

Agenda ini memiliki 10 target spesifik yang harus dicapai, sebagian besar pada tahun 2030, dan beberapa di antaranya sudah lewat tenggat waktu (2020).

Rincian Target SDG 14

Berikut adalah rincian target utama dalam SDG 14:

- Target 14.1 - Mengurangi Polusi Laut: Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis polusi laut, khususnya dari aktivitas berbasis lahan, termasuk puing-puing laut dan polusi nutrien.

Indonesia berada di peringkat bervariasi sebagai penyumbang polusi laut global, tergantung pada sumber dan tahun data, umumnya berkisar antara peringkat kedua hingga kelima sebagai penghasil sampah plastik di laut.

Berikut rincian mengenai peringkat NKRI dalam polusi laut global:

- Peringkat Kedua: Berdasarkan studi klasik Jambeck et al. (2015) yang sering dikutip, Indonesia menempati peringkat kedua setelah Tiongkok dalam hal sampah plastik yang dibuang ke laut, dengan perkiraan 1,29 juta ton per tahun. Data dari Program Lingkungan PBB (UNEP) juga mendukung posisi ini.
- Peringkat Ketiga: Studi yang lebih baru, termasuk laporan dari World Bank's Atlas of Sustainable Development Goals 2023, menempatkan Indonesia di peringkat ketiga penghasil polusi plastik terbesar di dunia, setelah Tiongkok dan Amerika Serikat.
- Peringkat Kelima: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia, mengutip data terbaru, menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil menurunkan posisinya dari peringkat kedua menjadi peringkat kelima dunia sebagai penghasil sampah plastik terbesar di laut.

Penurunan peringkat negara penyumbang polutan ke laut tersebut di atas mengindikasikan adanya upaya dan program pemerintah dalam pengelolaan sampah, meskipun masalah polusi laut akibat sampah plastik tetap menjadi tantangan serius bagi Indonesia.

- Target 14.2 - Melindungi Ekosistem Laut dan Pesisir: Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari

dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanan mereka, dan mengambil tindakan untuk memulihkannya guna mencapai lautan yang sehat dan produktif.

Indonesia memiliki peringkat yang sangat tinggi dalam hal keanekaragaman hayati laut, menempati posisi teratas atau terdekat dengan puncak secara global. Namun, dalam aspek kesehatan ekosistem laut secara keseluruhan, Indonesia menghadapi tantangan signifikan dengan skor yang relatif rendah dalam beberapa indeks.

Peringkat Berdasarkan Keanekaragaman Hayati

- Pusat Keanekaragaman Hayati: Indonesia merupakan bagian penting dari "Segitiga Terumbu Karang" dunia dan diakui sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia.
- Spesies Terumbu Karang: Indonesia adalah rumah bagi sekitar 76% spesies terumbu karang di dunia, membentang lebih dari 51 ribu kilometer persegi, menjadikannya pemilik terumbu karang terbesar secara global.
- Keanekaragaman Ikan: Negara ini menjadi habitat bagi lebih dari 3.000 spesies ikan, yang merupakan bagian vital dari keanekaragaman hayati global.
- Produsen Perikanan: Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai produsen ikan (baik perikanan tangkap maupun budidaya) berdasarkan laporan FAO, dan juga sebagai produsen rumput laut terbesar kedua di dunia.

Meskipun kaya akan sumber daya, Indonesia menghadapi masalah-besar dalam menjaga kesehatan ekosistem lautnya secara keseluruhan:

- Indeks Kesehatan Laut (Ocean Health Index/OHI): Laut Indonesia dinilai "sedang tidak sehat" berdasarkan skor Indeks Kesehatan Laut yang relatif rendah. Sebagai contoh, skor penyediaan pangan (Food Provision) berada di angka 25, dan pariwisata/rekreasi juga dinilai belum optimal.
- Spesies Terancam Punah: Pada tahun 2018, Indonesia berada di peringkat kelima secara global untuk jumlah spesies ikan yang terancam punah, menunjukkan adanya tekanan besar pada ekosistem.
- Ancaman Polusi dan Kerusakan: Ekosistem laut menghadapi ancaman seperti polusi sampah, penangkapan ikan berlebihan, dan perusakan terumbu karang, yang semuanya mempengaruhi peringkat kesehatan ekosistem secara keseluruhan.

Kondisi ekosistem laut rusak berat. Secara ringkas, peringkat NKRI dalam ekosistem laut sangat tinggi dalam potensi dan **keanekaragaman hayati, tetapi sedang menghadapi masalah besar dalam hal kesehatan dan keberlanjutan pengelolaan.** Pemerintah Indonesia telah menyusun Peta Jalan Ekonomi Biru untuk mengatasi isu-isu ini dan mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.

- Target 14.3 - Mengatasi Pengasaman Laut: Meminimalkan dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui peningkatan kerja sama ilmiah di semua tingkatan.
 - Indeks Kesehatan Laut (Ocean Health Index - OHI): Indonesia berada di peringkat **181 dari 220** wilayah yang dinilai dalam kurun waktu 2012-2022, dengan skor 63 dari 100. Skor ini lebih rendah dari rata-rata global (sekitar 69), menunjukkan kondisi laut Indonesia yang rapuh berdasarkan 10 indikator, salah satunya adalah keasaman laut.

- Tren Keasaman: Tingkat keasaman di perairan Indonesia bervariasi secara musiman (dipengaruhi oleh musim barat dan timur) dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal dan global. Laporan global menunjukkan bahwa keasaman laut telah meningkat secara signifikan (sekitar 40% lebih asam dibanding masa pra-industri) secara umum, yang mengancam ekosistem terumbu karang yang melimpah di perairan Indonesia.
- Target 14.4 - Mengelola Perikanan Berkelanjutan: Pada tahun 2020, secara efektif mengatur penangkapan ikan dan mengakhiri penangkapan ikan berlebihan, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), serta praktik penangkapan ikan yang merusak, dan menerapkan rencana pengelolaan berbasis sains untuk memulihkan stok ikan.
 - Laporan dan indeks internasional mengindikasikan bahwa Indonesia menghadapi **tantangan signifikan** dalam pelestarian sumber daya perikanan lautnya, dengan beberapa sumber menyebutkan peringkat kesehatan laut Indonesia yang relatif rendah dibandingkan rata-rata
 - Menurut *Ocean Health Index* (OHI), Indonesia berada di peringkat 181 dari 220 wilayah dalam kurun waktu 2012-2022, dengan skor rata-rata 63 (dari skala 100), di bawah rata-rata global 69. Penurunan ini lebih terkait dengan kondisi sumber daya yang terdegradasi dan tantangan pengelolaan daripada penurunan peringkat administratif NKRI di forum internasional.

Faktor-faktor Penyebab Degradasi kandungan ikan di wilayah NKRI :

- Penangkapan Ikan Berlebih (*Overfishing*): Banyak stok ikan di Indonesia berada pada tingkat eksploitasi penuh, dan beberapa di antaranya mengalami penangkapan ikan berlebih (*overfishing*). Diperkirakan lebih dari 50% populasi ikan liar di Indonesia mengalami penangkapan ikan berlebih.
- Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*): Masih tingginya aktivitas pencurian ikan oleh kapal asing maupun domestik menjadi masalah keamanan laut dan kerugian ekonomi yang signifikan.
- Penggunaan Alat Tangkap yang Merusak: Penggunaan metode penangkapan ikan yang dilarang seperti bahan peledak, racun, dan pukat harimau menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem vital seperti terumbu karang dan padang lamun.
- Kerusakan Ekosistem Pesisir: Degradasi lingkungan akibat reklamasi, pertambangan di wilayah pesisir, dan pencemaran limbah industri telah merusak habitat ikan dan keanekaragaman hayati laut.
- Keterbatasan Infrastruktur dan SDM: Kurangnya infrastruktur perikanan yang memadai, teknologi maritim yang belum optimal, dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi hambatan dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan.
- Perubahan Iklim: Perubahan iklim diprediksi akan mengurangi hasil perikanan di Indonesia hingga 20-30%.

Upaya Pemerintah :

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah berupaya meningkatkan pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi biru, penetapan kawasan konservasi perairan, dan kerja sama internasional, seperti dengan Marine Stewardship Council (MSC) untuk sertifikasi perikanan berkelanjutan.

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi masih besar, dan efektivitas kebijakan di lapangan perlu ditingkatkan untuk memastikan kelestarian sumber daya perikanan laut bagi generasi mendatang.

- Target 14.5 - Mengkonservasi Area Pesisir dan Laut: Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

Kondisi kelestarian pesisir laut Indonesia menghadapi tantangan serius akibat berbagai faktor, yang mengindikasikan adanya penurunan tingkat kelestarian di beberapa wilayah meskipun ada upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak.

Gambaran Umum Penurunan Tingkat Kelestarian Pesisir NKRI

- Kerusakan Ekosistem Pesisir: Sekitar 82% wilayah terumbu karang di Indonesia terancam rusak, dengan hanya kurang dari 30% yang berada dalam kondisi baik. Degradasi ekosistem mangrove juga terjadi hampir merata di seluruh kawasan pesisir Indonesia.
- Pencemaran: Laut Indonesia tergolong sangat tercemar di banyak area (75% tercemar sangat parah). Data dari BRIN pada September 2024 menyebutkan bahwa lebih dari 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahunnya, meskipun ada laporan adanya sedikit penurunan jumlah sampah laut secara umum pada tahun 2024.
- Abrasi dan Erosi: Abrasi pantai merupakan masalah signifikan, terutama di pantai utara Jawa, yang menyebabkan hilangnya daratan hingga ratusan meter dalam satu dekade terakhir di beberapa titik seperti Demak dan Semarang.

Faktor-faktor Penyebab Penurunan Kualitas Pesisir NKRI:

- Aktivitas Manusia:
 - Eksploitasi Berlebihan: Pemerintah tak mampu mengendalikan penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) dan eksploitasi sumber daya alam lainnya tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
 - Pencemaran Limbah: Kementerian KLH dan kementerian Perindustrian tak mampu mengatasi pembuangan limbah industri, limbah domestik, dan sampah plastik langsung ke laut dan sungai.
 - Perubahan Tata Ruang: Reklamasi pantai, penambangan pasir, dan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir tanpa izin dan perencanaan tata-ruang yang tepat.
 - Manajemen K/L terkait yang Belum Optimal: Pengelolaan wilayah pesisir seringkali bersifat parsial dan kurang terkoordinasi antar instansi, serta kurang melibatkan partisipasi masyarakat lokal secara efektif.
- Faktor Alam dan Iklim:
 - Perubahan Iklim: Kenaikan suhu laut menyebabkan pemutihan karang, dan kenaikan permukaan air laut memperparah abrasi dan intrusi air laut. Pemutihan karang adalah kondisi stres pada terumbu karang di mana polip karang mengeluarkan alga simbiosisnya (*zooxanthellae*) yang memberi warna dan makanan, menyebabkan karang tampak putih karena kerangkanya terlihat jelas, dan menjadi rentan kelaparan serta penyakit, terutama akibat suhu air laut yang terlalu panas akibat perubahan iklim. Karang yang memutih tidak langsung mati, tetapi bisa mati jika stres berlanjut, meskipun ada harapan pemulihan jika suhu kembali normal dan alga kembali. Upaya pelestarian dan

tantangan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan lebih dari 28 juta hektar wilayah laut sebagai kawasan konservasi dan menjalankan berbagai kebijakan untuk mengelola perikanan berkelanjutan dan mengendalikan pencemaran. Namun, upaya ini menghadapi tantangan seperti tumpang tindih regulasi, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten.

- Target 14.6 - Menghentikan Subsidi Perikanan Ilegal: Pada tahun 2020, menghapuskan bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi pada penangkapan ikan berlebihan, dan menahan diri untuk memperkenalkan subsidi baru yang serupa.

Subsidi perikanan ilegal merujuk pada bantuan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mendukung kegiatan **penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing)**, serta kegiatan yang berkontribusi terhadap **penangkapan ikan berlebih (overfishing) dan kelebihan kapasitas** armada penangkapan.

Menurut kerangka hukum internasional dan nasional (seperti UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Indonesia), subsidi dianggap ilegal jika memfasilitasi aktivitas yang melanggar hukum perikanan. Perjanjian Subsidi Perikanan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang juga diratifikasi oleh Indonesia, melarang jenis-jenis subsidi tertentu.

Bentuk-bentuk subsidi yang berpotensi dianggap ilegal atau merugikan meliputi:

- Dukungan untuk Kapal Asing Ilegal: Bantuan yang memungkinkan kapal asing tanpa izin beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
- Subsidi Bahan Bakar yang Salah Sasaran: Pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran atau dinikmati oleh kapal-kapal besar yang melakukan penangkapan berlebih, bukan nelayan kecil yang berhak.
- Bantuan Pembangunan Kapal Berlebih: Subsidi untuk pembangunan atau modernisasi kapal yang meningkatkan kapasitas penangkapan secara berlebihan, melebihi kemampuan reproduksi stok ikan.
- Dukungan Penangkapan Ikan di Laut Lepas yang Tidak Diatur: Subsidi untuk aktivitas penangkapan ikan di area di luar yurisdiksi nasional yang tidak diatur oleh organisasi pengelolaan perikanan regional.

Subsidi perikanan ilegal mengancam keberlanjutan ekosistem laut, merugikan nelayan kecil tradisional, dan menyebabkan kerugian ekonomi negara yang signifikan.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan instansi terkait, telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi baik *illegal fishing* maupun subsidi yang merugikan, antara lain:

- Penegakan Hukum: Melakukan patroli, penangkapan, dan penenggelaman kapal ikan ilegal (baik asing maupun domestik).
- Regulasi Ketat: Menerapkan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap dan pengetatan sistem perizinan untuk mengontrol kapasitas tangkap.
- Kerja Sama Internasional: Mendukung dan meratifikasi perjanjian global, seperti Perjanjian Subsidi Perikanan WTO, untuk menciptakan standar global yang melarang subsidi perikanan yang merusak.
- Pemberdayaan Nelayan Kecil: Mengalokasikan subsidi yang sah dan tepat sasaran untuk nelayan kecil, yang umumnya tidak terlibat dalam *overfishing*.

- Target 14.7 - Meningkatkan Manfaat Ekonomi dari Sumber Daya Laut: Meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara-negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, akuakultur, dan pariwisata berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia menjalankan berbagai program untuk memanfaatkan sumber daya laut secara optimal demi pembangunan ekonomi nasional. Program-program ini berfokus pada lima pilar utama, yang dikenal sebagai "Lima Pilar Kebijakan Pembangunan Kelautan Indonesia":

1. Kedaulatan Maritim (Sovereignty): Memperkuat keamanan laut, memberantas penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing), dan melindungi kedaulatan wilayah perairan NKRI.
2. Ekonomi Biru (Blue Economy): Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya laut, seperti perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata bahari, energi terbarukan laut, dan industri maritim.
3. Konektivitas Maritim (Connectivity): Membangun dan meningkatkan infrastruktur maritim, termasuk pelabuhan dan armada pelayaran, untuk memperlancar arus logistik dan distribusi barang antar pulau (Tol Laut).
4. Tata Kelola Maritim (Governance): Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan menyusun regulasi yang mendukung pengelolaan sumber daya laut yang efektif dan berkelanjutan.
5. Sumber Daya Manusia dan Iptek (Human Resources and Science & Technology): Mengembangkan kapasitas SDM kelautan dan meningkatkan penelitian serta inovasi di sektor kelautan dan perikanan.

Beberapa inisiatif spesifik di bawah pilar-pilar tersebut meliputi:

- Peningkatan Produksi Perikanan: Pemerintah menargetkan peningkatan produksi ikan melalui intensifikasi budidaya perikanan di tambak dan keramba jaring apung, serta pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
- Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT): Membangun pusat-pusat kegiatan ekonomi kelautan di pulau-pulau terluar untuk menggerakkan perekonomian daerah dan memperkuat kedaulatan pangan.
- Restorasi Ekosistem Pesisir: Melakukan rehabilitasi terumbu karang dan hutan bakau untuk menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
- Penyederhanaan Perizinan: Mempermudah investasi di sektor maritim dan perikanan untuk menarik lebih banyak pelaku usaha dan modal.

Dimensi Target

- Target 14.a - Meningkatkan Pengetahuan Ilmiah dan Riset Kelautan: Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan mentransfer teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan Kriteria dan Pedoman Transfer Teknologi Kelautan (Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology/CGTTM) Komisi Oseanografi Antarpemerintah.

Tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kelautan Indonesia secara umum masih berada di bawah negara-negara maju dan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, meskipun memiliki potensi sumber daya laut yang luar biasa besar.

Perbandingan Tingkat Ilmu Pengetahuan Kelautan

- Secara Global: Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati laut yang diakui dunia, seperti terumbu karang dan spesies ikan, yang menjadikannya "surga" bioteknologi kelautan kelas dunia. Namun, kemampuan riset, inovasi, dan penguasaan teknologinya masih menghadapi tantangan. Dalam Global Innovation Index (GII), peringkat inovasi Indonesia secara keseluruhan masih berfluktuasi dan berada di peringkat menengah ke bawah secara global.
- Secara Regional (Asia Tenggara): Indonesia pernah menjadi yang terbaik di Asia Tenggara dalam hal kelautan pada tahun 1980-an, namun performa riset dan teknologi saat ini dinilai tertinggal. Dalam hal daya saing ekspor perikanan, misalnya, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kalah efisiensi dari negara tetangga seperti Vietnam, yang lebih unggul dalam diversifikasi produk dan pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas. Negara-negara seperti Singapura dan Tiongkok memiliki infrastruktur dan investasi riset kelautan yang jauh lebih maju.
- Pemanfaatan Potensi: Meskipun memiliki potensi ekonomi maritim yang sangat besar (mencapai ribuan triliun rupiah per tahun), pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan dalam penerapan iptek. Banyak sumber daya yang mengalami degradasi akibat pengelolaan yang belum optimal dan minimnya pertimbangan daya dukung lingkungan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat iptek kelautan NKRI dibandingkan negara lain meliputi:

- Infrastruktur Riset: Keterbatasan fasilitas penelitian, kapal riset modern, dan laboratorium yang memadai untuk eksplorasi laut dalam. APBN Belanja sarana riset kelautan dan alih teknologi riset kelautan harus di perbesar.
- Sumber Daya Manusia (SDM): Tenaga ahli kelautan, jumlah dan kompetensi SDM kelautan masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Menraker membuat cetak biru kebutuhan SDM kelautan, Menteri Kebudayaan membangun budaya maritim nan gagah-berani.
- Investasi dan Kebijakan: Pemerintah harus membangun/mendorong perkembangan industrialisasi kemaritiman. Investasi untuk riset dan pengembangan (R&D) di sektor sarana industri-kelautan masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain yang menjadikan sektor maritim sebagai prioritas utama dengan dukungan dana besar.
- Integrasi Industri: Kurangnya integrasi antara hasil riset ilmiah dengan aplikasi industri kelautan secara langsung.

Secara ringkas, Indonesia tak berbudaya kelautan kaya-raya akan sumber daya alam laut, namun masih perlu mengakselerasi industri-kelautan, melakukan patok duga kepada negara-negara berekonomi kelautan seperti Inggris dan Benelux, pemerintah wajib membangun budaya-kelautan dan penguasaan iptek kelautan untuk memaksimalkan potensi alam-tersebut tersebut secara berkelanjutan dan kompetitif. Pemerintah telah menyusun Peta Jalan Ekonomi Biru untuk mengatasi isu-isu ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kelautan, yang sebaiknya dipandu oleh pakar dari negara-negara ekonomi-kelautan

- Target 14.b - Mendukung Nelayan Skala Kecil: Menyediakan akses bagi nelayan skala kecil tradisional terhadap sumber daya laut dan pasar..

Strategi pengembangan budaya laut dalam dan peningkatan kemampuan nelayan pesisir di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Strategi ini harus fokus pada keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat kelautan lokal.

Berikut adalah beberapa pilar strategi yang dapat diterapkan:

1. Peningkatan Pengetahuan bangsa Indonesia tentang kelautan dan Keterampilan Nelayan
 - Menteri pendidikan menjamin bahwa seluruh pendidikan formal sejak sekolah dasar harus berisi kurikulum ekonomi kelautan dan industri kelautan.
 - Menteri Perindustrian mengembangkan industrialisasi ekonomi-kelautan.
 - Pelatihan Teknik Penangkapan Ikan Modern: Memberikan pelatihan mengenai metode penangkapan ikan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, termasuk penggunaan teknologi navigasi dan deteksi ikan yang canggih untuk akses ke wilayah laut dalam.
 - Pendidikan Konservasi Laut: Mengajarkan praktik perikanan berkelanjutan, pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang, dan pemahaman tentang kuota penangkapan ikan untuk mencegah penangkapan berlebih.
 - Literasi Keuangan dan Manajemen Usaha: Melatih nelayan dalam pengelolaan keuangan, akses permodalan, dan manajemen rantai pasokan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
2. Modernisasi Infrastruktur dan Teknologi
 - Penyediaan Sarana Prasarana: Industri kelautan memfasilitasi akses nelayan terhadap kapal yang lebih kuat dan aman untuk operasi laut dalam, serta alat tangkap yang inovatif.
 - Pengembangan Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Modern: Membangun atau merenovasi PPI dengan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan memperpanjang masa simpan.
 - Akses Informasi Pasar: Memanfaatkan teknologi digital (aplikasi, SMS gateway) untuk memberikan informasi harga pasar terkini, cuaca, dan kondisi laut.
3. Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan
 - Pemberdayaan Kelompok Nelayan: Mendorong pembentukan dan penguatan kelompok usaha bersama (KUB) atau koperasi nelayan untuk meningkatkan posisi tawar dalam pemasaran dan pengadaan modal.
 - Penyusunan Kebijakan yang Mendukung: Menerapkan regulasi yang berpihak pada nelayan kecil, memfasilitasi perizinan yang mudah, dan mengalokasikan dana khusus untuk pengembangan sektor perikanan.
 - Kemitraan Multipihak: Membangun kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi non-pemerintah dalam implementasi program-program pemberdayaan.
4. Pengembangan Budaya Bahari dan Wisata Pesisir
 - Promosi Warisan Budaya Maritim: Menteri Kebudayaan bertugasmembangun budaya-bahari, antara lain mengangkat-kembali tradisi-bahari NKRI serta pengetahuan lokal nelayan menjadi pengetahuan modern dan global dalam mengelola sumber daya laut.
 - Pengembangan Ekowisata Bahari: Mengintegrasikan aktivitas nelayan dengan paket wisata (misalnya, memancing bersama nelayan, kunjungan ke desa nelayan) untuk diversifikasi pendapatan dan meningkatkan apresiasi terhadap profesi nelayan.
 - Pendidikan Generasi Muda: Pembangunan generasi-muda akrab-kelautan, mengintegrasikan pendidikan-bahari ke dalam kurikulum sekolah dan PT.

Dibutuhkan Kabinet yang mampu mentransformasi NKRI menjadi negara-ekonomi kelautan.

- Target 14.c - Menerapkan Hukum Laut Internasional: Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan mengimplementasikan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam UNCLOS (Konvensi Hukum Laut PBB).

Pembentukan dan Penegakan Hukum Laut NKRI

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan lembaga terkait lainnya, telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk mencapai target SDG 14:

- Pemberantasan IUUF: Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas IUUF melalui berbagai kebijakan dan penegakan hukum yang berdampak positif pada sektor kelautan. Strategi ini mencakup peningkatan koordinasi lintas sektor dan lembaga.
- Pengelolaan Sampah Laut: Indonesia memiliki Rencana Aksi Nasional untuk memerangi sampah laut dan telah mampu mengurangi kebocoran sampah hingga 28,5 persen dalam tiga tahun terakhir. Program "Bulan Cinta Laut" juga melibatkan partisipasi nelayan dalam pengumpulan sampah.
- Kawasan Konservasi Perairan: Proporsi rata-rata Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama Laut (Marine Key Biodiversity Areas/KBAs) yang dicakup oleh kawasan lindung meningkat signifikan dari 7,4% pada tahun 2000 menjadi 25,9% pada tahun 2024, menunjukkan kemajuan dalam konservasi.
- Harmonisasi Peraturan: Terdapat upaya analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait kewenangan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia untuk mengatasi kompleksitas yurisdiksi.

Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mendukung SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air) melalui program konservasi ekosistem laut dan perairan, pengendalian pencemaran dari daratan (limbah domestik dan industri), pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), restorasi kualitas air sungai, penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, serta perlindungan keanekaragaman hayati perairan, dengan target mengurangi polusi dan memastikan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan untuk kesejahteraan

Program dan Arah Kebijakan Utama Kementerian LHK :

1. Pengendalian Pencemaran: Mengatasi limbah padat dan cair dari industri serta domestik yang mencemari sungai dan laut, serta menetapkan pedoman pembuangan air yang ramah lingkungan.
2. Restorasi dan Konservasi Ekosistem: Melakukan upaya restorasi kualitas air sungai dan melindungi ekosistem air tawar serta laut, termasuk terumbu karang dan keanekaragaman hayati.
3. Pengelolaan Sumber Daya Air: Mengeluarkan kebijakan seperti penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional (SK MenLHK No. 297/2019) untuk perencanaan pembangunan yang menjaga kelestarian air.
4. Pengelolaan DAS: Mengembangkan strategi pengelolaan Daerah Aliran Sungai untuk menjaga kualitas air dan mencegah kerusakan lingkungan.
5. Perlindungan Spesies: Melakukan penetapan kembali status perlindungan biota perairan, seperti yang tercermin dalam konsultasi publik terkait Permen LHK Nomor P.106 Tahun 2018.

6. Ekonomi Sirkular: Meningkatkan pemanfaatan sampah dan limbah untuk mendukung ekonomi sirkular, yang berdampak pada pengurangan pencemaran lingkungan perairan.



Hubungan dengan SDG 14:

- Pengurangan Polusi (Target 14.1): Berfokus pada pencegahan masuknya polutan ke laut dari daratan.
- Konservasi Ekosistem (Target 14.2, 14.5): Melindungi keanekaragaman hayati dan habitat alami pesisir dan laut.
- Pengelolaan Berkelanjutan (Target 14.7): Meningkatkan manfaat ekonomi dari sumber daya laut melalui pengelolaan perikanan dan akuakultur yang berkelanjutan.

Institusi Terkait di bawah KLHK:

- Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL): Bertanggung jawab langsung dalam pemantauan dan pengendalian pencemaran air.

Secara keseluruhan, KLHK berkontribusi dalam mencapai SDG 14 melalui regulasi, program pengelolaan sumber daya air dan laut, serta upaya restorasi lingkungan untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan dan laut Indonesia

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengimplementasikan berbagai program kelestarian laut yang berfokus pada ekonomi biru, konservasi, dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Inisiatif-inisiatif ini didukung oleh target nasional dan kolaborasi multi-pihak.

Program-program utama tersebut meliputi:

1. Strategi Ekonomi Biru (*Blue Economy*).

Strategi ini bertujuan untuk menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut untuk kesejahteraan masyarakat sambil menjaga kelestarian lingkungan. Lima strategi prioritas dalam kerangka ini mencakup:

- Perluasan Kawasan Konservasi Perairan: Target ambisius Indonesia adalah memiliki kawasan konservasi laut seluas 79,5 juta hektare (setara 30% dari wilayah perairan) pada tahun 2045 untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem melalui pelestarian kualitas air-laut dan terumbu-karang dan hutan-bakau pesisir sebagai RS bersalin biota-laut.
- Penangkapan Ikan Terukur (PIT): Pengelolaan perikanan yang berbasis kuota dan zona penangkapan untuk mencegah penangkapan ikan berlebihan (overfishing) dan memastikan keberlanjutan stok ikan.
- Pengembangan Budidaya Perikanan Berkelanjutan: Mendorong budidaya (seperti rumput laut dan tambak) yang ramah lingkungan sebagai alternatif mata pencaharian dan sumber pangan.
- Pengelolaan Sampah Laut: Menerapkan skema penanganan sampah laut melalui Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) dan program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) dengan menggerakkan nelayan untuk membersihkan laut.
- Perlindungan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil: Melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir, termasuk pengembangan kawasan mangrove nasional, untuk ketahanan terhadap perubahan iklim.

2. Program Konservasi Khusus

- COREMAP-CTI (Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative): Upaya penyelamatan, rehabilitasi, dan pengelolaan ekosistem terumbu karang terbesar di Indonesia.
 - Program LAUTRA: Mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan, konservasi terumbu karang, dan peningkatan mata pencaharian di sekitar Kawasan Konservasi Perairan (KKP).
3. Kerangka Kebijakan Nasional
- Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025-2045: Dokumen kebijakan yang mencakup perlindungan ekosistem perairan dan daratan untuk generasi mendatang.
 - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 14): Indonesia berkomitmen pada tujuan global untuk melestarikan dan memanfaatkan lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
- Program-program tersebut memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan mitra internasional untuk memastikan kelestarian laut NKRI.

Hutan Bakau NKRI

Tidak ada data resmi yang tersedia mengenai luas hutan bakau Indonesia secara spesifik pada tahun 1945. Data historis yang tersedia biasanya dimulai dari tahun 1950-an dan menunjukkan penurunan signifikan luas hutan bakau dibandingkan dengan data saat ini (sekitar tahun 2025), meskipun angka pastinya bervariasi tergantung sumber dan metode pengumpulan data.

Berikut adalah perbandingan estimasi berdasarkan data historis dan terkini:

- Tahun 1945: Tidak ada data pasti yang tersedia dari sumber yang diteliti. Data terawal yang ditemukan adalah estimasi sekitar 2,5 juta hektare pada tahun 1950.
- Tahun 2025 (data terkini): Berdasarkan Peta Mangrove Nasional (PMN) yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021, total luas ekosistem mangrove di Indonesia adalah sekitar 3,36 hingga 4,12 juta hektare (termasuk potensi habitat). Sumber lain menyebutkan angka sekitar 3,44 juta hektare, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan hutan bakau terluas di dunia.

Tren Perubahan

Secara umum, tren historis menunjukkan adanya degradasi atau penyusutan luas hutan bakau di Indonesia luar-biasa selama beberapa dekade akibat alih-fungsi lahan menjadi tambak, pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur dan hunian.

Namun, data terbaru dari KLHK dan instansi terkait pada tahun-tahun belakangan ini (mendekati 2025) menunjukkan upaya pemutakhiran data yang lebih akurat dan potensi penambahan luas melalui program rehabilitasi dan penanaman kembali di beberapa lokasi, oleh Kabinet sadar-hutan.

15. PROGRAM KEHIDUPAN DARAT

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB ke-15, yang dikenal sebagai "Kehidupan di Darat" (Life on Land), bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan. Program dan target dari SDG 15 bersifat global dan diimplementasikan melalui kebijakan nasional serta inisiatif lokal.

Tujuan SDG ini memiliki 12 target spesifik (beberapa dengan tenggat waktu 2020 dan lainnya 2030) dan 14 indikator untuk mengukur kemajuan.

Rincian Target SDG 15

Berikut adalah rincian target-target utama di bawah SDG 15:

- 15.1 Konservasi Ekosistem (Target 2020): Melestarikan dan memulihkan ekosistem darat serta perairan darat sesuai perjanjian internasional.
- 15.2 Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Target 2020): Meningkatkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, dan merestorasi hutan yang rusak.
- 15.3 Memerangi Penggurunan (Target 2020): Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan yang terdegradasi, dan mencapai dunia yang bebas dari degradasi lahan.
- 15.4 Konservasi Ekosistem Pegunungan (Target 2030): Memastikan konservasi ekosistem pegunungan dan keanekaragaman hayatinya.
- 15.5 Melindungi Keanekaragaman Hayati (Target 2020): Mengambil tindakan untuk mengurangi degradasi habitat, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, dan mencegah kepunahan spesies.
- 15.6 Akses Sumber Daya Genetik: Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan mendorong akses yang tepat.
- 15.7 Memerangi Perdagangan Spesies Liar Ilegal: Mengakhiri perburuan dan perdagangan ilegal spesies dilindungi serta mengatasi permintaan produk ilegal.
- 15.8 Mengendalikan Spesies Invasif (Target 2020): Mencegah masuknya dan mengurangi dampak spesies asing invasif.
- 15.9 Mengarusutamakan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati (Target 2020): Mengintegrasikan nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan pembangunan.
- 15.a Mobilisasi Sumber Daya Finansial: Meningkatkan sumber daya finansial untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.
- 15.b Pendanaan dan Kapasitas (Target 2020): Memobilisasi sumber daya dan menyediakan insentif untuk pengelolaan hutan berkelanjutan.
- 15.c Dukungan Global Memerangi Perburuan Liar: Meningkatkan dukungan global untuk memerangi perburuan liar dan perdagangan ilegal.

Contoh Program Implementasi (Lokal dan Global)

Program implementasi bervariasi, meliputi:

- Konservasi dan Restorasi Hutan: Program reforestasi dan aforestasi.
- Pengembangan Kawasan Lindung: Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi.
- Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lahan dan hutan berkelanjutan.
- Penelitian dan Kajian Akademik: Mendukung kebijakan konservasi berbasis bukti ilmiah.
- Pencegahan Degradasi Lahan: Menerapkan praktik pertanian berkelanjutan.
- Penegakan Hukum: Memerangi perdagangan satwa liar ilegal.

NKRI adalah sebuah negara di berkahi Allah. Data dari berbagai sumber, termasuk Badan Informasi Geospasial, menyebutkan luas daratan Indonesia adalah sekitar 1.919.440 km² dan terdiri dari 17.508 pulau dan hanya sekitar 95 hingga 96 juta hektar hutan primer. Dari sekitar 17.000 hingga 17.508 pulau di Indonesia, diperkirakan hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Berdasarkan sumber Land

Portal, sekitar 33,2% dari total daratan digunakan untuk pertanian. Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat luas Lahan Baku Sawah (LBS) pada tahun 2019 sebesar 7.463.948 hektare (sekitar 74.639 km²).

SDG (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) PBB untuk kehidupan darat yang lestari adalah Tujuan 15, yang berfokus pada melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan.

Tujuan ini mencakup pengelolaan hutan-primer secara lestari, memerangi konversi hutan-lestari, penggurunan, menghentikan degradasi lahan hutan-primer, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber/mata air bersih.

Berikut adalah rincian target-target utama dalam Agenda SDG 15 di NKRI :

15.1 Konservasi Ekosistem Darat dan Air Tawar: Menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya hutan, lahan basah, pegunungan, dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional pada tahun 2020 (target yang sudah lewat waktu).

Luas dan kualitas daratan NKRI :

Berikut adalah gambaran umum berdasarkan data yang tersedia, terutama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Pusat Statistik (BPS):

Gambaran Luas Lahan di Indonesia (Estimasi Terbaru)

- Total Luas Daratan: Indonesia memiliki total luas daratan sekitar 1.922.570 km² atau sekitar 192,26 juta hektar.
- Luas Daratan Berhutan: Berdasarkan pemantauan hutan Indonesia tahun 2024, luas lahan berhutan di seluruh daratan Indonesia mencapai sekitar 95,5 juta hektar (51,1% dari total daratan). Sekitar 87,8 juta hektar berada di dalam kawasan hutan.
- Luas Lahan Pertanian: Total luas lahan pertanian di Indonesia pada tahun 2019 mencapai sekitar 36,8 juta hektar, yang terdiri dari 29,35 juta hektar lahan non-sawah dan 7,46 juta hektar lahan sawah.
- Luas Hutan Primer dan Sekunder:
 - Hutan primer tropis adalah ekosistem hutan yang paling kaya karbon dan keanekaragaman hayati. Indonesia mengalami laju kehilangan hutan primer yang signifikan di masa lalu.
 - Hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh kembali setelah gangguan alami atau manusia. Data resmi mengategorikan tutupan hutan secara umum, termasuk hutan primer dan sekunder.
- Daratan Gundul/Rusak (Degradasi Lahan):
 - Degradasi lahan merupakan salah satu fokus utama SDG 15.
 - Data menunjukkan adanya area yang luas dari lahan terdegradasi yang berpotensi untuk direstorasi. Diperkirakan pada tahun 2013, lahan yang terdegradasi berat mencapai 24,3 juta hektar.
 - Upaya restorasi terus dilakukan, contohnya melalui program restorasi gambut untuk 2,4 juta hektar lahan gambut yang terdegradasi.

Keterkaitan dengan SDG PBB 15 (Kehidupan di Darat)

Program SDG 15 bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, memerangi penggurunan, serta menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Data-data di atas digunakan oleh pemerintah Indonesia, PBB di Indonesia, dan berbagai organisasi nirlaba untuk memantau kemajuan pencapaian target SDG 15, terutama:

- Target 15.1: Menjamin konservasi, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat dan perairan darat.
- Target 15.2: Mengelola semua jenis hutan secara lestari dan menghentikan deforestasi.
- Target 15.3: Memerangi penggurunan, memulihkan lahan terdegradasi, termasuk lahan yang terkena dampak penggurunan dan kekeringan.

Informasi lebih detail mengenai data sektoral dapat diakses melalui portal resmi Badan Pusat Statistik (BPS) atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kondisi Sumber Daya Alam Air Bersih NKRI :

Indonesia memiliki potensi sumber daya-air terbarukan yang besar, mencapai sekitar 2.018,7 kilometer kubik per tahun (km^3/tahun) pada tahun 2020, menjadikannya salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Sumber air bersih utama di Indonesia meliputi mata air, air tanah, air permukaan (sungai dan danau), air hujan, dan air laut (melalui desalinasi). Perusahaan Air Minum (PDAM) mengambil air dari berbagai sumber, dengan proporsi sekitar 60% dari sungai/danau, 25% dari mata air, dan 15% dari air tanah untuk didistribusikan kepada pelanggan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), cakupan akses air minum layak di Indonesia terus meningkat, mencapai 92,64% pada tahun 2024. Meskipun potensi air melimpah, tantangannya terletak pada distribusi dan pengelolaan untuk memastikan semua wilayah mendapatkan akses air bersih yang aman dan berkelanjutan. Data spesifik mengenai jumlah pasti "mata air" alami yang bersih tidak tersedia dalam database statistik publik yang umum diakses, karena jumlahnya yang sangat banyak dan dinamis.

Tugas kementerian/lembaga (K/L) Indonesia untuk pemeliharaan ekosistem darat, yang tertuang dalam SDG 15: Kehidupan di Daratan, berfokus pada perlindungan, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bertindak sebagai koordinator pelaksana SDGs di tingkat nasional, sementara implementasinya melibatkan kolaborasi berbagai K/L terkait.

Tugas utama K/L terkait (terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah) mencakup hal-hal berikut:

Tugas dan Fokus K/L Berdasarkan Target SDG 15:

- Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatkan pengelolaan hutan, menghentikan deforestasi dan degradasi, serta meningkatkan reforestasi. KLHK memegang peran penting dalam aspek ini.
- Konservasi Keanekaragaman Hayati: Mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan melindungi spesies terancam punah melalui pendirian dan pengelolaan kawasan konservasi. Penegakan hukum terhadap perburuan ilegal juga termasuk di dalamnya.

- Restorasi Lahan Kritis: Menghentikan penggurunan dan memulihkan lahan serta tanah yang terdegradasi.
- Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Memastikan pelestarian dan pemanfaatan ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya secara berkelanjutan sesuai perjanjian internasional.
- Integrasi Nilai Ekosistem: Melestarikan ekosistem pegunungan dan keanekaragaman hayatinya, serta mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati dalam perencanaan pembangunan.
- Peningkatan Kapasitas dan Pendanaan: Memobilisasi sumber daya finansial untuk pengelolaan hutan berkelanjutan dan meningkatkan dukungan global untuk melawan perburuan ilegal dan perdagangan spesies dilindungi.
- Kolaborasi Lintas Sektor: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah berkolaborasi dalam pencapaian SDGs di tingkat lokal, termasuk pengelolaan ekosistem darat.

Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan pelaporan pencapaian target-target SDG 15 dan kolaborasi antar K/L dalam Rencana Aksi Nasional SDGs Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk pada Portal Monitoring SDGs DPR RI.

- 15.2 Mengelola Hutan secara Berkelanjutan: Mendorong pengelolaan hutan lestari dari segala jenis, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi, dan secara signifikan meningkatkan reforestasi serta penghijauan secara global pada tahun 2020 (target yang sudah lewat waktu).

Kondisi NKRI :

Data dari berbagai sumber, termasuk Badan Informasi Geospasial, menyebutkan luas daratan Indonesia adalah sekitar 1.919.440 km² dan terdiri dari 17.508 pulau dan hanya sekitar 95 hingga 96 juta hektar hutan primer.

Tugas kementerian/lembaga (K/L) Indonesia untuk pemeliharaan hutan dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDG), khususnya SDG 15: Ekosistem Daratan, dikoordinasikan dan diimplementasikan secara utama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Berikut adalah rincian tugas dan peran K/L terkait:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Sebagai K/L utama, KLHK memiliki tanggung jawab menyeluruh:

- Perumusan dan Penetapan Kebijakan: Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang sejalan dengan target SDG 15.
- Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Mengimplementasikan pengelolaan hutan lestari (melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH) yang mencakup tata hutan, pemanfaatan, rehabilitasi, dan perlindungan hutan.
- Konservasi Keanekaragaman Hayati: Melindungi dan mengelola keanekaragaman hayati dan ekosistem, termasuk mengurangi ancaman kepunahan spesies.
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan: Melaksanakan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul serta mengelola daerah aliran sungai.
- Pengendalian Kerusakan Lingkungan: Menerapkan sistem tebang pilih, melarang penebangan sewenang-wenang, dan melakukan patroli lapangan untuk mencegah kejahatan kehutanan.
- Mitigasi Perubahan Iklim: Mengelola hutan untuk berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim, seperti melalui program Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berperan dalam aspek perencanaan dan koordinasi kebijakan:

- Koordinasi Perencanaan Nasional: Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, termasuk target SDG 15, ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan dalam kerangka pencapaian SDGs di tingkat nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam memastikan pembangunan ekonomi tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan:

- Integrasi Pembangunan Berkelanjutan: Memastikan komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi, dengan menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya dengan pelestarian lingkungan.

Kementerian/Lembaga Lain yang berkontribusi sesuai fungsi spesifiknya:

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Mendukung program pelestarian hutan melalui kebijakan dan program di tingkat desa.
- Pemerintah Daerah (Dinas LHK Provinsi/Kabupaten): Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional ke dalam implementasi di tingkat lokal, termasuk edukasi dan kesadaran lingkungan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, upaya pemeliharaan hutan versi SDG di Indonesia memerlukan kolaborasi lintas instansi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat hingga masyarakat sipil, untuk mencapai pengelolaan ekosistem daratan yang berkelanjutan. Deforestasi dan degradasi daratan cenderung makin cepat.

- 15.3 Memerangi Penggurunan: Memerangi penggurunan, memulihkan tanah dan lahan yang terdegradasi, termasuk lahan yang terkena dampak penggurunan, kekeringan, dan banjir, serta berupaya mencapai dunia yang netral terhadap degradasi lahan pada tahun 2030.

Data deforestasi (perubahan fungsi hutan menjadi non-hutan) di Indonesia menunjukkan angka yang luar-biasa besarnya.

Laju deforestasi bruto tahunan pada periode 2021-2022 mencapai 106,4 ribu hektare, atau sekitar *1.064 km² per tahun*. Angka deforestasi neto (total kehilangan hutan dikurangi pertumbuhan kembali) antara tahun 2015 dan 2020 diperkirakan sekitar 650 ribu hektare (6.500 km²) **per tahun**, menurut FAO. Lahan gambut, yang kaya akan humus, sangat rentan terhadap kerusakan akibat penebangan dan drainase yang mengikutinya. Data menunjukkan bahwa sekitar 206.935 hektare (sekitar 2.069 km²) lahan gambut di Indonesia dikategorikan rusak sangat berat. Bahkan ada perkiraan bahwa **83 persen ekosistem gambut di Indonesia telah rusak**. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga berperan besar dalam kerusakan humus, dengan luas area yang terbakar mencapai **1.161.192,9 hektare (sekitar 11.612 km²) pada tahun 2023 saja**. *Penebangan hutan menyebabkan hilangnya lapisan humus secara bertahap akibat erosi, paparan sinar matahari, dan perubahan hidrologi, yang sering kali mendahului deforestasi total atau kebakaran*. Data spesifik mengenai "kerusakan lapisan humus" sangat sulit diukur dan dilacak secara terpisah dari data deforestasi umum atau kerusakan ekosistem gambut.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 15: Ekosistem Daratan (Life on Land). Target spesifik (Target 15.3) adalah memerangi penggurunan dan berupaya mencapai dunia yang netral terhadap degradasi lahan pada tahun 2030.

Kementerian/Lembaga Utama dan Perannya

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Memimpin upaya konservasi hutan, rehabilitasi lahan kritis, pencegahan kebakaran hutan, dan pengelolaan keanekaragaman hayati. KLHK bertanggung jawab langsung atas banyak program mitigasi degradasi lahan.
- Kementerian Pertanian: Berfokus pada praktik pertanian berkelanjutan yang mencegah erosi tanah dan degradasi lahan pertanian, serta memulihkan lahan yang terkena dampak penggurunan melalui teknik agrikultur yang tepat.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Terlibat dalam pengelolaan sumber daya air terpadu, termasuk pembangunan infrastruktur (seperti bendungan dan irigasi) yang mendukung ketersediaan air di daerah rawan kekeringan, yang secara tidak langsung membantu menahan penggurunan.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Bertindak sebagai koordinator utama untuk implementasi SDGs di Indonesia. Bappenas mengintegrasikan tujuan pencegahan penggurunan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mengawasi kemajuan pencapaian target 15.3 secara nasional.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): Menyediakan data iklim dan peringatan dini terkait kekeringan dan perubahan iklim, yang sangat penting untuk perencanaan strategi adaptasi dan mitigasi penggurunan.
- Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota): Memiliki kewajiban untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan dan rencana pembangunan di tingkat lokal, termasuk pengelolaan sumber daya lahan.

Tugas-tugas K/L di bawah SDG 15:

- Target 15.3: Pada tahun 2030, memerangi penggurunan, memulihkan lahan dan tanah yang terdegradasi (termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan, dan banjir), serta berupaya mencapai dunia yang netral terhadap degradasi lahan.
- Target 15.1 dan 15.2: Memastikan konservasi, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan dan pedalaman, khususnya hutan, sesuai dengan kewajiban internasional.
- 15.4 Konservasi Ekosistem Pegunungan: Menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan manfaat penting bagi pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

Indonesia memiliki sekitar 400 gunung, 100 di antaranya aktif. Banyak gunung di Indonesia, terutama yang besar dan terkenal, telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, sering kali dalam bentuk Taman Nasional (TN).

Beberapa contoh gunung yang termasuk dalam kawasan konservasi (Taman Nasional) meliputi Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Taman Nasional Gunung Ciremai, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Merapi (memiliki beberapa zona konservasi di dalamnya). APBN cq Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengelola lebih dari 560 unit kawasan konservasi di seluruh Indonesia, mencakup area darat dan perairan. Sebagian besar kawasan ini mencakupi ekosistem pegunungan.

Tugas utama kementerian/lembaga (K/L) di Indonesia untuk ekosistem pegunungan dikoordinasikan terutama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Berikut adalah tugas-tugas spesifik K/L terkait ekosistem pegunungan:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

- Konservasi Keanekaragaman Hayati: Melindungi spesies tumbuhan dan satwa khas pegunungan (baik *in-situ* maupun *ex-situ*) serta menjaga keanekaragaman genetiknya.
- Pengelolaan Kawasan Konservasi: Mengelola dan menetapkan status kawasan seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan Taman Wisata Alam yang sering kali berada di wilayah pegunungan.
- Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan: Melakukan upaya pencegahan bencana alam seperti erosi dan tanah longsor di lereng gunung dengan pengelolaan hutan yang tepat, serta mengendalikan kebakaran hutan.
- Pemanfaatan Jasa Lingkungan: Mengatur pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan, seperti potensi ekowisata, sumber air, dan penelitian, dengan tetap menjaga fungsi ekologisnya.
- Edukasi dan Penyuluhan: Meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan pendaki tentang pentingnya menjaga ekosistem pegunungan melalui program penyuluhan dan pendidikan lingkungan.

Kementerian Lain dan Lembaga Terkait

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Menyusun Rencana Aksi Nasional yang mengintegrasikan pengelolaan ekosistem pegunungan (seperti pengembangan *geopark*) ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Terlibat dalam penetapan pedoman Geopark Nasional dan pengelolaan sumber daya geologi di kawasan pegunungan.
 - Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota): Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pengelolaan ekosistem pegunungan di tingkat lokal, mengacu pada kebijakan nasional.
 - Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi: Melakukan penelitian dan pengembangan terkait ekosistem pegunungan, seperti studi agroforestri di lereng gunung, untuk mendukung kebijakan berbasis ilmiah.
- 15.5 Menghentikan Hilangnya Keanekaragaman Hayati: Mengambil tindakan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, dan melindungi spesies yang terancam punah pada tahun 2020 (target yang sudah lewat waktu).

Sejarah kehilangan keanekaragaman hayati dan hutan primer di Indonesia terkait erat dengan aktivitas manusia yang telah berlangsung selama berabad-abad, meningkat pesat sejak era kolonial hingga modern. Faktor-faktor utama meliputi perubahan penggunaan lahan, eksploitasi berlebihan, dan perubahan iklim.

Sebelum tahun 1900-an, Indonesia sebagian besar merupakan negara yang dipenuhi hutan lebat, dengan hutan mencakup sekitar 84 persen dari total luas daratan. Masyarakat adat secara tradisional mengelola hutan dengan sistem hukum adat yang berkelanjutan. Periode ini menandai titik balik signifikan.

Kekuatan kolonial, seperti Belanda dengan kebijakan tanam paksa pada 1830, mulai menganggap hutan sebagai sumber daya ekonomi untuk keuntungan komersial. Hutan di Pulau Jawa secara besar-besaran diubah menjadi perkebunan komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Proses ini menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan dan hilangnya keanekaragaman hayati di tingkat lokal.

Pada era Pasca-Kemerdekaan dan Orde Baru, deforestasi meningkat tajam pada tahun 1970-an dan terus berlanjut setelahnya, didorong oleh kebijakan pemerintah yang berfokus pada pembangunan ekonomi melalui industri ekstraktif.

Luas hutan Indonesia menyusut drastis dari sekitar 193 juta hektar pada tahun 1950 menjadi sekitar 82 juta hektar pada tahun 2013. Penyebab hilangnya hutan primer dan keanekaragaman hayati di Indonesia bersifat kompleks dan saling terkait:

- Perubahan Penggunaan Lahan: Faktor pendorong terbesar adalah konversi hutan primer menjadi lahan pertanian skala besar (terutama untuk perkebunan kelapa sawit), pertambangan, dan urbanisasi telah menghancurkan habitat alami.
- Eksploitasi Berlebihan: Penebangan liar dan pembalakan kayu secara besar-besaran untuk kebutuhan industri kayu telah menyebabkan degradasi dan fragmentasi habitat.
- Kebakaran Hutan dan Lahan: Kebakaran yang sering terjadi, baik disengaja untuk pembukaan lahan maupun akibat kondisi iklim, mempercepat hilangnya hutan dan spesies.
- Perburuan Liar: Eksploitasi berlebihan untuk makanan, obat-obatan, dan perdagangan hewan peliharaan mengancam spesies endemik seperti harimau sumatera dan orangutan.
- Krisis Ekonomi dan Politik: Ketidakstabilan ekonomi dan politik terkadang mengarah pada pengelolaan sumber daya alam yang kurang efektif dan penegakan hukum yang lemah.
- Perubahan Iklim: Meskipun dampaknya lebih bertahap, perubahan iklim mengubah pola iklim dan habitat, membuat ekosistem tidak ramah bagi spesies tertentu.
- Indonesia merupakan negara dengan *kehilangan hutan primer tropis terluas kedua di dunia* setelah Brasil, dengan sekitar 10,7 juta hektar hilang antara tahun 2002 dan 2024. Hilangnya keanekaragaman hayati ini berdampak pada penurunan populasi spesies, risiko kepunahan, dan peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dalam beberapa tahun terakhir, ada laporan yang menunjukkan penurunan laju deforestasi tahunan, diklaim sebagai yang terendah dalam dua dekade terakhir berkat berbagai upaya dan kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, tantangan dalam merehabilitasi lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan masih sangat besar.

Tugas kementerian/lembaga (K/L) Indonesia terkait keanekaragaman hayati dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), terutama berfokus pada

Tujuan 15: Ekosistem Daratan dan target spesifiknya, dikoordinasikan melalui berbagai kebijakan dan rencana aksi nasional.

Beberapa K/L memiliki peran sentral, yang tugasnya diselaraskan dalam dokumen Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati Indonesia (Indonesia Biodiversity Strategic and Action Plan/IBSAP) yang terbaru (2025-2045):

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Bertindak sebagai otoritas nasional yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan konservasi, termasuk penetapan kawasan konservasi (taman nasional, cagar alam, dll.), penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar, serta memastikan keberlanjutan fungsi ekosistem.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L terkait pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan secara terencana dan terpadu, terutama untuk aspek maritim/kelautan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Bertanggung jawab mengintegrasikan isu keanekaragaman hayati ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta mendorong tata kelola berkelanjutan.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN): Ditugaskan untuk melakukan penelitian dan inovasi terkait pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik dan keanekaragaman hayati.
- Kementerian Pertanian/Kelautan dan Perikanan (tergantung konteks): Berperan dalam pengelolaan sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian serta pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Tugas Umum K/L dalam SDGs

Secara umum, tugas K/L dalam konteks SDGs (terutama Tujuan 15: Ekosistem Daratan, dan juga relevan dengan Tujuan 14: Ekosistem Lautan) meliputi:

1. Pengarusutamaan Kebijakan: Mengintegrasikan aspek keanekaragaman hayati ke dalam rencana strategis dan program kerja masing-masing K/L di tingkat nasional dan daerah.
2. Perlindungan Habitat: Membentuk dan mengelola kawasan lindung untuk mencegah degradasi habitat alami dan kepunahan spesies.
3. Penegakan Hukum: Menerapkan regulasi yang ketat untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya alam dan perdagangan ilegal.
4. Riset dan Data: Mendukung riset ilmiah dan menyediakan data terkini mengenai status keanekaragaman hayati sebagai dasar kebijakan (melalui BRIN dan KLHK).
5. Edukasi dan Partisipasi Publik: Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak.
6. Pelaporan Global: Berkontribusi pada pelaporan berkala terkait implementasi target keanekaragaman hayati global dan SDGs.

Upaya ini ditekankan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan di Tingkat Nasional dan Daerah.

- 15.6 Akses Adil Sumber Daya Genetik: Mempromosikan pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan mempromosikan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut. Akses yang adil terhadap sumber daya genetik mengacu pada prinsip-prinsip dalam Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDG), khususnya SDG 15 yang berfokus pada kehidupan di darat, yang menyatakan bahwa semua negara harus mendapat manfaat dari penggunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, dengan dimensi:

- Pembagian Keuntungan (Benefit-Sharing): Ketika sumber daya genetik dari suatu negara, misalnya tumbuhan obat dari hutan hujan, digunakan untuk tujuan komersial atau penelitian (misalnya, untuk mengembangkan obat baru oleh perusahaan multinasional), negara asal sumber daya tersebut dan masyarakat lokal yang melestarikannya harus menerima bagian keuntungan yang adil. Keuntungan ini bisa berupa uang, teknologi, pengetahuan ilmiah, atau transfer keahlian.
- Persetujuan Berdasarkan Informasi Awal (Prior Informed Consent/PIC): Akses terhadap sumber daya genetik hanya bisa terjadi setelah ada persetujuan penuh dan jelas dari negara penyedia, yang diberikan berdasarkan informasi yang lengkap dan transtetif tentang tujuan penggunaan sumber daya tersebut.
- Kedaulatan Negara: Setiap negara memiliki hak berdaulat atas sumber daya alamnya sendiri, termasuk sumber daya genetiknya, dan berhak mengatur akses dan penggunaannya.
- Prinsip-prinsip ini diatur dalam perjanjian internasional seperti Protokol Nagoya, yang dirancang untuk memastikan konservasi keanekaragaman hayati dan penggunaan komponen-komponennya secara berkelanjutan, bertujuan mencegah "biopiracy" (penggunaan sumber daya genetik tanpa izin atau pembagian keuntungan yang adil) dan memastikan bahwa kekayaan genetik global bermanfaat bagi seluruh umat manusia secara merata.

Tugas kementerian/lembaga (K/L) di Indonesia untuk memastikan akses adil sumber daya genetik (SDG) terkait erat dengan implementasi Protokol Nagoya dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), khususnya Tujuan 15 (Ekosistem Daratan).

Tugas utama K/L dikoordinasikan melalui kerangka kebijakan nasional seperti Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Tugas K/L Utama

1. Merumuskan Kebijakan dan Regulasi: K/L, dikoordinasikan oleh Bappenas dan melibatkan KLHK, Kementan, dan lainnya, bertugas merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur akses terhadap SDG dan pembagian manfaat yang adil dan seimbang (ABS - Access and Benefit Sharing). Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya melalui UU No. 11 Tahun 2013.
2. Menjamin Kedaulatan Negara: Menegaskan hak berdaulat negara atas SDG dan pengetahuan tradisional terkait, serta memastikan pemanfaatan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan nasional untuk mencegah biopiracy (pencurian keanekaragaman hayati).
3. Membangun Kerangka Kelembagaan: Mendirikan dan mengoperasikan kerangka kelembagaan yang efektif, termasuk Komisi Nasional Sumber Daya Genetik (Komnas SDG) dan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia, sebagai pusat informasi dan mekanisme pemantauan.
4. Memfasilitasi Akses dan Pembagian Manfaat:
 - Menciptakan prosedur yang jelas untuk memperoleh akses (Prior Informed Consent/PIC) dan negosiasi syarat-syarat yang disepakati bersama (Mutually

Agreed Terms/MAT) antara penyedia sumber daya (pemerintah, masyarakat adat, pemilik lahan) dan pengguna (peneliti, industri).

- Memastikan manfaat yang timbul dari pemanfaatan (baik moneter maupun non-moneter, seperti alih teknologi) dibagi secara adil dan merata, terutama dengan masyarakat adat dan lokal yang memegang pengetahuan tradisional terkait.
- 5. Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan: Mengintegrasikan pengelolaan akses dan manfaat SDG ke dalam strategi yang lebih luas untuk konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan komponennya secara berkelanjutan (Tujuan SDG 15: Ekosistem Daratan).
- 6. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan penataan terhadap ketentuan Protokol Nagoya dan peraturan nasional, serta menangani kasus ketidaktaatan atau pelanggaran.

Keterlibatan K/L NKRI untuk mentransformasi komitmen global Protokol Nagoya dan SDG menjadi tindakan nyata NKRI di tingkat nasional dan daerah, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan memberikan kontribusi pada sasaran global.

- 15.7 Menghentikan Perdagangan Spesies Liar Ilegal: Mengambil tindakan segera untuk mengakhiri perburuan liar dan perdagangan spesies flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk satwa liar ilegal. Negara-negara yang paling banyak terlibat dalam perdagangan spesies alam liar melibatkan baik negara pengekspor (sumber) maupun pengimpor (tujuan akhir) utama, baik dalam perdagangan legal maupun ilegal.

Perdagangan satwa liar global didorong oleh ketidaksetaraan kekayaan/kemakmuran bangsa dan teknologi, di mana negara-negara kaya menjadi importir terbesar, dan produknya berasal dari negara-negara miskin yang kaya keanekaragaman hayati.

Pengekspor Utama (Sumber), berdasarkan data perdagangan legal global, beberapa negara pengekspor produk satwa liar terbesar meliputi Indonesia, Jamaika dan Honduras, tercatat sebagai salah satu eksportir produk satwa liar terbesar di dunia.

Negara-negara di Asia Tenggara dan Afrika sering menjadi sumber dan titik transit utama untuk satwa liar yang ditangkap atau dipanen secara ilegal.

Pengimpor Utama (Tujuan) baik secara legal maupun (sering kali) ilegal adalah

- Amerika Serikat adalah tujuan utama dunia untuk satwa liar dan produk satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal, didorong oleh permintaan tinggi akan hewan peliharaan eksotis dan produk komersial,
- Tiongkok adalah pembeli terbesar untuk perdagangan satwa liar ilegal, terutama produk-produk seperti cula badak dan tulang harimau, serta obat-obatan tradisional,
- Negara-negara maju lainnya seperti Prancis, Italia, dan Jepang juga merupakan importir utama produk satwa liar legal dan
- Uni Eropa secara keseluruhan sebagai pusat utama perdagangan satwa liar global, dengan 86% barang sitaan ditujukan untuk pasar UE.

"Segitiga Emas" yang terdiri dari Laos, Thailand, dan Myanmar dikenal sebagai pusat global untuk perdagangan dan penyelundupan satwa liar ilegal. Negara-negara ini berfungsi sebagai sumber, transit, dan pasar konsumsi. Perdagangan

satwa liar ilegal adalah salah satu bisnis kriminal terbesar di dunia, menempati peringkat keempat setelah perdagangan narkoba, manusia, dan senjata api.

Tugas kementerian/lembaga (K/L) Indonesia dalam mencegah perdagangan spesies liar alami NKRI yang dilindungi, dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 15: Ekosistem Daratan, meliputi berbagai upaya kolaboratif yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional.

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK adalah *leading sector* dalam konservasi keanekaragaman hayati. Tugasnya mencakup:
 - Perlindungan Habitat: Mendirikan dan mengelola kawasan konservasi seperti taman nasional, suaka margasatwa, dan cagar alam sebagai tempat perlindungan satwa liar.
 - Regulasi dan Kebijakan: Menerapkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, yang merupakan turunan dari UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - Penegakan Hukum: Melakukan operasi penangkapan dan pembongkaran jaringan perdagangan ilegal satwa liar bekerja sama dengan aparat hukum lain. Polisi hutan (Polhut) berada di bawah koordinasi KLHK.
 - Penelitian dan Pemantauan: Melakukan penangkaran satwa dan memantau populasi spesies dilindungi.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan. Kedua lembaga ini berperan dalam sistem peradilan pidana:
 - Penyidikan dan Penuntutan: Melakukan penyidikan terhadap kasus perburuan dan perdagangan satwa liar, serta menuntut pelakunya di pengadilan.
 - Peningkatan Efek Jera: Menerapkan hukum yang tegas dan memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP memiliki wewenang dalam konservasi jenis ikan dan biota perairan, berkoordinasi dengan KLHK untuk menghindari tumpang tindih wewenang. Tugasnya meliputi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan penegakan hukum di wilayah laut.
4. Badan Karantina Indonesia (Barantin) (sebelumnya di bawah Kementan/KKP) bertanggung-jawab atas pengawasan lalu lintas tumbuhan dan satwa liar di pintu masuk dan keluar negara (bandara, pelabuhan, pos lintas batas) untuk mencegah penyelundupan.
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) - Kementerian Keuangan, melakukan pengawasan kepabeanan untuk mencegah penyelundupan spesies liar melintasi batas negara.
6. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), melakukan pemantauan dan pemblokiran akun atau konten daring yang digunakan untuk perdagangan ilegal satwa liar di media sosial dan platform jual beli.

Keterkaitan dengan SDG 15

Tugas-tugas K/L tersebut secara langsung mendukung SDG 15, khususnya target 15.7, yang bertujuan untuk mengambil tindakan segera untuk menghentikan perburuan dan perdagangan spesies yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk satwa liar ilegal. Upaya ini terintegrasi dalam dokumen perencanaan seperti IBSAP (Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia) 2025-2045.

15.8 Mencegah Spesies Invasif: Memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuk dan secara signifikan mengurangi dampak spesies asing invasif pada ekosistem darat dan air tawar serta mengontrol atau memberantas spesies prioritas pada tahun 2020 (target yang sudah lewat waktu).

Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB, spesies invasif merujuk pada spesies asing (tumbuhan, hewan, patogen, dan organisme lain) yang diperkenalkan ke lingkungan baru oleh aktivitas manusia dan menyebabkan kerusakan ekologis atau ekonomi yang signifikan.

Isu spesies invasif secara khusus ditangani dalam SDG 15: Kehidupan di Darat (*Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss*), di bawah Target 15.8, yaitu "Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak-negatif spesies-asing-invasif pada ekosistem darat dan air, dan mengendalikan atau memberantas spesies prioritas" (Diterjemahkan dari teks asli PBB).

Spesies ini mampu beradaptasi, berkembang biak, dan menyebar dengan cepat, mengungguli spesies asli dan mengubah ekosistem secara drastis, sehingga membahayakan keanekaragaman-hayati dan fungsi ekosistem penting.

Pengendalian spesies invasif merupakan bagian integral dari upaya global untuk melestarikan keanekaragaman hayati sebagaimana digariskan dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) PBB.

Contoh Spesies Invasif dalam Konteks SDG adalah:

- Eceng Gondok (*Eichhornia crassipes*): Tanaman air asli Amazon ini telah menyebar ke seluruh dunia dan menyumbat saluran air, irigasi, dan danau di lebih dari 50 negara. Di Danau Victoria, Afrika, infestasi eceng gondok telah menghalangi rute pelayaran dan aktivitas penangkapan ikan, berdampak pada jutaan orang dan mengancam ketahanan pangan (SDG 2).
- Ulat Grayak (*Spodoptera frugiperda*)/Fall Armyworm: Hama serangga ini diperkenalkan ke sub-Sahara Afrika pada tahun 2016 dan menyebar dengan cepat, menyebabkan kerugian hasil panen jagung lebih dari 40% bagi petani kecil, yang secara langsung berdampak pada ketahanan pangan (SDG 2) dan pengentasan kemiskinan (SDG 1).
- Zebra Mussel (*Dreissena polymorpha*): Hewan asli Laut Kaspia dan Laut Hitam ini menyebabkan kerusakan pada perikanan, keanekaragaman hayati moluska, dan sistem pasokan air industri/pertanian dengan menyumbat filter dan pipa.
- Mink Amerika (*Neovison vison*): Mamalia kecil ini mengancam spesies asli yang dilindungi, seperti cerpelai Eropa, yang terancam punah karena predasi dan persaingan.
- Manusia perusak alam.
- Lantana (*Lantana camara*): Semak berduri yang tahan kekeringan ini telah menginvasi padang rumput di India dan Australia, meracuni ternak dan mengurangi produktivitas lahan (SDG 15).
- Parthenium (*Parthenium hysterophorus*): Gulma ini dapat menyebabkan masalah pernapasan dan dermatitis pada manusia (SDG 3), serta mengurangi hasil panen secara drastis.
- Spesies-spesies ini disebutkan dalam laporan dan publikasi dari organisasi yang bekerja sama dengan PBB karena dampak signifikan yang ditimbulkannya terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan manusia, yang secara langsung

menggagalkan upaya pencapaian berbagai SDG, terutama SDG 15. Spesies manusia sebagai species perusak alam paling- hebat dikendalikan/diatur oleh hukum positif masing-masing negara, misalnya hukum positif penebangan-hutan oleh korporasi.

Tugas kementerian/lembaga Indonesia dalam mencegah spesies invasif perusak berbahaya terkait erat dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya

Tujuan 15 (Ekosistem Darat), dengan target spesifik Target 15.8 yang bertujuan untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak spesies asing invasif terhadap ekosistem darat dan laut pada tahun 2020 (meskipun target global telah lewat, Indonesia tetap mengimplementasikan aksi nasional).

Kementerian/Lembaga Utama dan Perannya:

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK):
 - Berperan sebagai otoritas nasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati).
 - Memimpin penyusunan Strategi Nasional dan Arahan Rencana Aksi Pengelolaan Jenis Asing Invasif (Stranas JAI).
 - Bertanggung jawab dalam perlindungan ekosistem darat dan konservasi sumber daya alam hayati.
 - Mengeluarkan regulasi untuk mencegah masuknya spesies asing invasif yang merusak keanekaragaman hayati.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP):
 - Bertanggung jawab atas pengelolaan kehati dan sumber daya ikan di ekosistem perairan/laut.
 - Mengeluarkan peraturan terkait larangan pemasukan jenis ikan berbahaya atau invasif dari luar negeri ke wilayah Indonesia, seperti Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2009.
 - Menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai SDG 14 (Ekosistem Lautan), yang juga mencakup penanganan spesies invasif di lingkungan laut.
- Seluruh K/L dan Pemda mewaspadai risiko kebersihan al. Limbah/sampah, penyebaran penyakit (misalnya muntaber, demam berdarah, pandemi) dan penularan penyakit bawaan hewan-invasif, seperti hama-tikus, kecoa dan seangga infasif lain.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas):
 - Mengintegrasikan upaya pengelolaan keanekaragaman hayati ke dalam rencana pembangunan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
 - Mengkoordinasikan penyusunan *Indonesia Biodiversity Strategic and Action Plan* (IBSAP) yang diselaraskan dengan kerangka kerja global dan SDGs.

Upaya pencegahan spesies-invasif secara langsung mendukung beberapa target SDGs:

1. SDG 15 (Kehidupan di Darat): Target 15.8 secara spesifik menargetkan pencegahan spesies invasif seperti hama tikus-sawah dan wereng. Implementasinya mencakup pengelolaan hutan dan pertanian berkelanjutan, perlindungan ekosistem penting, dan penghentian hilangnya keanekaragaman hayati.
2. SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air): Penanganan spesies invasif di ekosistem laut sangat penting untuk konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.
3. SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan): Memastikan perdagangan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak memasukkan atau menyebarkan spesies invasif secara tidak sengaja.

- **15.9 Mengintegrasikan Nilai Ekosistem:**
 - Mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan lokal, proses pembangunan, dan strategi pengurangan kemiskinan pada tahun 2020 (target yang sudah lewat waktu).
 - Nilai-nilai utama terkait ekosistem dan keanekaragaman hayati dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDG) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertuang secara spesifik dalam Tujuan 14 (Kehidupan Bawah Air) dan Tujuan 15 (Kehidupan di Darat).
 - Nilai-nilai tersebut mencakup aspek konservasi, pemulihan, dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam untuk menjamin kesejahteraan saat ini dan masa depan.
 - Tujuan 14: Ekosistem Lautan (Life Below Water), nilai utama dalam tujuan ini berfokus pada pentingnya samudra, laut, dan sumber daya laut bagi kehidupan manusia, termasuk peran vitalnya dalam perekonomian, ketahanan pangan, dan mitigasi perubahan iklim. Target-target spesifiknya antara lain mengurangi dan mencegah polusi laut secara signifikan, terutama dari aktivitas berbasis darat, melindungi ekosistem laut dan pesisir yang rentan untuk menghindari dampak buruk, termasuk melalui pengelolaan kawasan lindung, mengelola perikanan secara berkelanjutan untuk mencegah penangkapan ikan berlebihan dan memulihkan stok ikan dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara-negara berkembang dari pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.
 - Tujuan 15: Ekosistem Darat (Life on Land) menekankan nilai intrinsik dan fungsional ekosistem darat, hutan, dan keanekaragaman hayati bagi keberlanjutan kehidupan di Bumi. Nilai-nilai yang diangkat mencakup perlindungan dan pemulihan ekosistem darat dan pedalaman, seperti hutan, lahan basah, pegunungan, dan lahan kering, pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan menghentikan deforestasi, memerangi penggurunan dan memulihkan lahan serta tanah yang terdegradasi, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan melindungi spesies yang terancam punah dan meningkatkan mobilisasi sumber daya untuk mendanai pengelolaan hutan lestari dan konservasi keanekaragaman hayati.

Implementasi SDG 15 di Indonesia

- Indonesia, sering disebut sebagai "paru-paru dunia", memberikan kontribusi signifikan terhadap iklim dan oksigen global melalui pengelolaan hutan tropisnya yang luas dan berbagai kebijakan mitigasi perubahan iklim. Fungsi Utama bagi Oksigen dan Iklim adalah sebagai penyedia oksigen dari hutan tropis Indonesia, melalui fotosintesis, secara efisien menyerap karbon dioksida (CO₂) dan melepaskan oksigen kembali ke atmosfer, menjadikannya penghasil oksigen vital bagi planet ini, penyerap polutan-udara cq karbon alami: Hutan dan lahan gambut berfungsi sebagai penyerap karbon (*carbon sink*) raksasa, menyimpan miliaran metrik ton CO₂ dan membantu menstabilkan iklim global dengan mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.
- Sumbangan dan Komitmen Indonesia sbb :
 - Komitmen Internasional: Indonesia adalah penandatangan Perjanjian Paris, berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri pada tahun 2030, dan akan meningkatkannya dengan dukungan internasional.
 - *FOLU Net Sink 2030*: Indonesia meluncurkan Rencana Operasional *Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030, yang menargetkan tercapainya emisi

bersih nol atau bahkan minus dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030.

- Restorasi Ekosistem: Upaya besar dilakukan untuk merehabilitasi 12 juta hektar lahan gambut dan hutan yang terdegradasi, serta mengelola dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
- Pengembangan Energi Terbarukan: Pemerintah mendorong transisi ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang merupakan penyebab utama emisi karbon.
- Perdagangan Karbon: Indonesia menjadi pelopor dalam meluncurkan transaksi karbon berbasis teknologi pertama di bawah Perjanjian Paris, menciptakan mekanisme pasar untuk memberikan nilai ekonomi pada upaya pengurangan emisi.
- Pendanaan Iklim: Indonesia menerima pendanaan dari Green Climate Fund (GCF) sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan pengurangan emisi, yang digunakan untuk mendukung aksi iklim di berbagai provinsi.
- Laju deforestasi NKRI amat tinggi sbb : Tidak ada data resmi yang pasti mengenai luas hutan primer Indonesia secara spesifik pada tahun 1945. Data kehutanan yang komprehensif dan sistematis baru mulai tersedia beberapa dekade setelah kemerdekaan. Namun, perkiraan umum menyebutkan bahwa pada tahun 1950, total luas wilayah hutan di Indonesia mencapai sekitar 193 juta hektar, hilang lebih dari separuh luas hutan atau sebesar 100 juta hektar hutan hilang-lenyap dalam periode 1950 sampai 2025.

Pada awal kemerdekaan, sebagian besar dari jumlah hutan tersebut diyakini masih berupa hutan primer, lebih dari separuh hilang oleh deforestasi, terutama didorong oleh industri penebangan kayu dan ekspansi perkebunan skala besar. Untaian Jamrud Khatulistiwa telah hilang dari muka bumi. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, luas lahan berhutan di Indonesia tercatat sekitar 95,5 juta hektare dari total daratan, menunjukkan penurunan drastis selama beberapa dekade terakhir. Hingga tahun 2025, Indonesia terus mengalami kehilangan hutan primer yang signifikan, kehilangan sekitar 10,7-11 juta hektare antara tahun 2002 hingga 2024, menjadikan Indonesia **negara kedua di dunia dengan kehilangan hutan primer terbesar**, terutama disebabkan ekspansi perkebunan, pertambangan, dan konversi lahan, yang berdampak besar pada keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Data terbaru 2025 menunjukkan hutan primer basah menyusut 11% dari tahun 2002, dan kehilangan tutupan pohon di hutan alam masih tinggi, mengancam ekosistem dan meningkatkan risiko bencana ekologis seperti banjir.

Data dan Fakta Kunci (Hingga 2025) sbb:

- Hutan NKRI menjadikan Indonesia peringkat kedua di dunia setelah Brasil.
- Tahun 2024: Sekitar 260 ribu hektare hutan primer hilang. Penyebab Utama hutan primer lenyap: Ekspansi perkebunan (sawit, kayu), pertambangan, pembalakan, dan pembangunan infrastruktur.
- Dampak: Ancaman bagi keanekaragaman hayati, sumber obat-obatan dunia, menyusutnya habitat satwa liar, penurunan kemampuan penyerapan karbon, dan peningkatan risiko bencana ekologis (banjir, kekeringan).
- Data 2025 Terbaru (Global Forest Watch): 57% kehilangan tutupan pohon di Indonesia antara 2021-2024 terjadi di hutan alam, menunjukkan degradasi terus berlanjut.
- Kondisi Terkini: Data terbaru dari Global Forest Watch (GFW) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan Kalimantan Timur (Kaltim) saja kehilangan puluhan ribu hektare hutan dalam periode 2023-2024.

Angka deforestasi (netto) di Indonesia bervariasi setiap tahunnya. Berdasarkan data terbaru yang tersedia, deforestasi di Indonesia pada periode tahun 2021-2022 saja adalah sebesar 1.040 kilometer persegi (104 ribu hektare).

Sebagai perbandingan, berikut adalah beberapa data deforestasi lainnya:

- Pada tahun 2024, Kementerian Kehutanan mencatat deforestasi hutan RI mencapai 1.754 kilometer persegi (175,4 ribu hektare).
- Data dari Global Forest Watch (GFW) mengindikasikan bahwa rata-rata tingkat deforestasi di Indonesia antara tahun 2015 hingga 2020 mencapai sekitar 6.500 kilometer persegi per tahun (650 ribu hektare per tahun).
- Laporan dari Auriga mencatat deforestasi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 2.573,84 kilometer persegi (257.384 hektare).
- Di Indonesia, upaya pencapaian SDG 15 diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah, seperti pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan industri untuk menjaga kelestarian dan kualitas udara, serta inisiatif pengelolaan hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan. Upaya ini juga mencakup pengembangan konsep "forest city" dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tugas kementerian/lembaga (K/L) di Indonesia untuk mengintegrasikan unsur-unsur ekosistem dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs) mencakup koordinasi kebijakan, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan program spesifik, dan pelaporan yang terukur. Integrasi ini dilakukan melalui kerangka kerja nasional yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Nasional (TKN) SDGs.

Mekanisme dan Tugas Utama K/L :

Implementasi SDGs di Indonesia didasarkan pada prinsip integrasi, inklusivitas, dan memastikan tidak ada yang tertinggal (*leave no one behind*).

1. Perencanaan dan Penyusunan Rencana Aksi: K/L bertugas menyelaraskan target SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Hal ini diwujudkan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs, yang mencakup program, kegiatan, dan indikator yang terukur.
2. Pelaksanaan Program Spesifik: Setiap K/L mengimplementasikan program dan kegiatannya yang terkait dengan tujuan SDGs yang relevan, termasuk yang berfokus pada ekosistem (Tujuan 15: Ekosistem Darat, dan juga Tujuan 14: Ekosistem Laut). Contohnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
3. Sinergi Lintas Sektor: K/L harus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan pendekatan yang holistik dalam pengelolaan ekosistem.
4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan: K/L berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyediakan data dan informasi capaian implementasi SDGs. Laporan ini digunakan untuk memantau progres dan mengevaluasi efektivitas program pemerintah.

Contoh K/L Terkait Integrasi Ekosistem

Beberapa K/L utama yang terlibat dalam integrasi unsur ekosistem meliputi:

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Memimpin upaya untuk melindungi, memulihkan, dan mendukung pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, serta mengelola hutan dan keanekaragaman hayati.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Berfokus pada pengelolaan ekosistem laut dan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.
- Kementerian Pertanian (Kementan): Menggalakkan pertanian berkelanjutan yang meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem darat dan air.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Bertanggung jawab atas koordinasi perencanaan pembangunan nasional yang mengarusutamakan agenda SDGs, termasuk aspek ekosistem, ke dalam dokumen perencanaan.

Secara keseluruhan, tugas K/L adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial berjalan selaras dengan perlindungan dan pemulihan lingkungan dan ekosistem, sesuai dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan global.

16. PROGRAM PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN BERKEMANUSIAAN NAN-ADIL BERADAB

NKRI ber peradaban tinggi karena UUD dan Falsafah Negara nan-mulia. Agenda PBB untuk pembangunan institusi berkualitas dan tangguh dirinci dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke-16, yang berfokus pada "perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh" (Peace, Justice, and Strong Institutions). Tujuan ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang damai, inklusif, dan adil dengan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan.

Rincian agenda SDG 16 dijabarkan melalui beberapa target utama:

- Mengurangi segala bentuk kekerasan di mana saja secara signifikan, termasuk mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan, dan semua bentuk kekerasan serta penyiksaan terhadap perempuan dan anak-anak.
- Mempromosikan supremasi hukum-positif pada tingkat nasional dan internasional serta memastikan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua warga-negara tanpa SARA.
- Memerangi kejahatan terorganisir dan aliran keuangan serta senjata terlarang secara signifikan, termasuk mengurangi korupsi dan penyuapan secara substansial dalam segala bentuknya.
- Mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan melalui kerja sama internasional.
- Memastikan pengambilan keputusan pemerintahan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif pada semua tingkatan.
- Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam lembaga tata kelola global.
- Memastikan akses informasi publik dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan undang-undang nasional dan perjanjian internasional.
- Memperkuat lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerja sama internasional, untuk mencegah kekerasan dan memerangi terorisme serta kejahatan.

Tujuan ini menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai dalam masyarakat yang damai dan inklusif, di mana hak asasi manusia dihormati dan individu merasa aman tanpa memandang latar belakang mereka.

SDG 16 di NKRI sbb :

Tugas Kementerian/Lembaga (K/L) di Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 16, yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, diatur melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs. Berbagai K/L memiliki peran spesifik sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Tujuan 16 berfokus pada pembangunan masyarakat yang damai dan inklusif nir-SARA, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, serta membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Berikut adalah pembagian peran K/L utama berdasarkan fokus area (target) SDG 16:

1. Mengurangi Kekerasan dan Menjamin Rasa Aman

Area ini melibatkan penegakan hukum dan perlindungan warga negara.

- Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA): Bertanggung jawab dalam menguatkan sistem perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan niretis lainnya. Kebahagiaan janda mendapat perhatian khusus.
- Kepolisian Republik Indonesia (Polri): Berperan dalam penegakan hukum, menjaga keamanan nasional, dan mengurangi segala bentuk kekerasan serta angka kematian terkait kejahatan.

2. Menjamin Akses Keadilan dan Supremasi Hukum

Fokus pada penguatan sistem peradilan yang adil dan merata.

- Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham): Bertugas menggalakkan negara berdasarkan hukum (rule of law) di tingkat nasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan nir-SARA bagi semua, termasuk melalui bantuan hukum dan layanan peradilan yang efektif.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM): Memantau dan mengadvokasi pemenuhan hak asasi manusia sebagai bagian dari akses keadilan.

3. Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif, mencakupi tata kelola pemerintahan yang baik dan antikorupsi.

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB): Berperan dalam membangun institusi pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Secara spesifik bertugas mengurangi korupsi dan penyuapan secara substansial dalam segala bentuknya (Target 16.5).
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi, dan monitoring pencapaian seluruh target SDGs di tingkat nasional, termasuk SDG 16, melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs.

4. Menjamin Akses Informasi dan Partisipasi Publik, dengan fokus pada transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo): Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional.
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Mendorong pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di tingkat daerah, termasuk penguatan tata kelola pemerintahan desa (BUMDesa).

Peringkat spesifik Indonesia untuk SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat) tidak tersedia sebagai peringkat tunggal yang terpisah dalam laporan global yang

umum dirilis. Namun, performa Indonesia untuk SDG 16 termasuk dalam peringkat keseluruhan Indeks SDGs global.

Secara keseluruhan, peringkat Indeks SDGs (yang mencakup semua 17 tujuan, termasuk SDG 16) untuk Indonesia telah menunjukkan perbaikan yang signifikan:

- Peringkat Global 2024: Indonesia menduduki peringkat ke-77 dari 167 negara.
- Tren: Peringkat ini naik dari posisi ke-102 pada tahun 2019, menunjukkan kemajuan yang progresif dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan secara umum.

Pencapaian SDG 16 di Indonesia melibatkan upaya untuk mendorong masyarakat yang damai dan inklusif, menyediakan akses terhadap keadilan, serta membangun kelembagaan yang efektif dan akuntabel di semua tingkatan, dengan kolaborasi dari berbagai pihak seperti perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Untuk informasi lebih rinci mengenai metrik spesifik SDG 16 di Indonesia, Anda dapat merujuk pada laporan resmi dari *SDG Transformation Center* atau situs PBB di Indonesia.

Kinerja terbaru Indonesia untuk program perdamaian berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 16 PBB menunjukkan kemajuan yang stabil dalam indikator tata kelola pemerintahan dan komitmen kuat terhadap operasi pemeliharaan perdamaian global, meskipun masih menghadapi tantangan domestik terkait hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan.

Kinerja dan Kontribusi Utama Indonesia

- Penyumbang Pasukan Perdamaian: Indonesia secara konsisten menjadi salah satu kontributor terbesar untuk pasukan penjaga perdamaian PBB (Pasukan Garuda) di antara negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, yang menjalankan misi tidak hanya untuk menjaga keamanan tetapi juga mendukung pemulihan stabilitas politik dan sosial di wilayah konflik.
- Peran dalam Forum Multilateral: Indonesia aktif berpartisipasi dalam diskusi tingkat tinggi PBB, termasuk menjadi salah satu perumus dokumen utama *Action for Peacekeeping* (A4P) yang bertujuan meningkatkan efektivitas mandat misi perdamaian. Indonesia juga menegaskan pentingnya menjaga relevansi dan efektivitas operasi perdamaian PBB di tengah tantangan global.
- Skor SDG Meningkat: Menurut *Sustainable Development Report 2025*, skor SDG Indonesia secara keseluruhan membaik menjadi 70,2 dari 100, mencerminkan adanya kemajuan umum dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk kemajuan dalam indikator tata kelola pemerintahan.
- Akses Terhadap Keadilan dan Tata Kelola: PBB di Indonesia, melalui badan seperti UNDP dan UNODC, bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat sistem peradilan yang akuntabel dan melawan ekstremisme kekerasan. Ada peningkatan signifikan dalam tingkat pelaporan polisi untuk penyerangan fisik, dari 2,0% pada tahun 2018 menjadi 61,0% pada tahun 2022, yang menunjukkan perbaikan akses terhadap keadilan dalam beberapa aspek.

Tantangan yang Masih Ada sbb: Meskipun ada kemajuan, laporan menunjukkan tantangan yang terus berlanjut terkait perlindungan hak sipil dan politik. Isu-isu seperti praktik hukuman mati, dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat penegak hukum di daerah konflik (seperti Papua), dan laporan penyiksaan masih menjadi perhatian. Sektor peradilan juga masih menghadapi masalah akuntabilitas yang memerlukan perbaikan sistemik.

Secara keseluruhan, Indonesia menunjukkan komitmen dan kemajuan dalam kontribusi perdamaian internasional dan beberapa indikator tata kelola domestik, sambil terus berupaya menangani isu-isu keadilan dan hak asasi manusia di dalam negeri.

Indonesia dianggap PBB sebagai salah satu negara paling progresif dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk dalam aspek keadilan sosial. Secara keseluruhan, Indonesia telah mencapai sekitar 62,5% dari target indikator SDGs pada akhir 2024.

Kinerja NKRI untuk Keadilan Sosial (SDG PBB) :

Keadilan sosial dalam kerangka SDGs PBB mencakup beberapa tujuan, terutama:

- SDG 1 (Tanpa Kemiskinan)
- SDG 10 (Mengurangi Kesenjangan)
- SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat)

Berikut adalah kinerja terkini Indonesia di bidang tersebut:

- Peringkat Global Meningkat: Berdasarkan *Sustainable Development Report 2024*, peringkat global Indonesia naik signifikan ke posisi 77 dari 167 negara, dengan skor indeks 70,22.
- Efisiensi Perlindungan Sosial: Indonesia telah meningkatkan efisiensi sistem perlindungan sosialnya melalui pendaftaran sosial yang lebih baik, sebagai bagian dari reformasi sistemik pasca-pandemi.
- Penurunan Kemiskinan (Pra-Pandemi): Angka kemiskinan nasional sempat turun dari 11,13% (2015) menjadi 9,22% (2019) sebelum terdampak pandemi.
- Kesetaraan Gender (SDG 5): PBB menilai capaian Indonesia dalam kesetaraan gender juga menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan kinerja tahunan negara lain.
- Akses Keadilan: Tingkat pelaporan polisi untuk kekerasan fisik meningkat pesat dari 2,0% (2018) menjadi 61,0% (2022), menunjukkan perbaikan akses terhadap keadilan formal.

Tantangan dan Area Stagnan:

- Meskipun banyak indikator mencapai kemajuan, beberapa area terkait keadilan sosial masih menghadapi tantangan:
- Kesenjangan: SDG 10 (mengurangi ketimpangan) termasuk dalam sembilan tujuan yang perkembangannya dinilai masih stagnan. Rasio Gini sempat naik kembali menjadi 0,385 pada tahun 2020 akibat pandemi.
- Indikator "Off-track": Sekitar 29,5% dari total indikator SDGs di Indonesia masih "keluar jalur" atau memerlukan perhatian khusus untuk mencapai target 2030.
- Pembiayaan: Terdapat kesenjangan pembiayaan yang tinggi untuk mencapai target SDGs, mendorong PBB untuk mendorong kemitraan publik-swasta yang lebih kuat.

Secara ringkas, Indonesia dipandang positif dalam komitmen dan kemajuan umum, namun masih harus bekerja keras, terutama dalam mengatasi ketimpangan dan memastikan semua indikator keadilan sosial berada di jalur yang benar menuju 2030. Laporan lengkap mengenai hasil tahunan PBB di Indonesia dapat diakses melalui situs resmi PBB di Indonesia.

Peran Bappenas :

- Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) mengoordinasikan implementasi SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat di Indonesia sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs. Tujuan ini berfokus pada pembangunan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan dengan kelembagaan yang efektif dan akuntabel di semua tingkatan.
- Bappenas memiliki peran sentral dalam memastikan tujuan SDG 16 terintegrasi ke dalam kebijakan dan program pembangunan nasional melalui beberapa cara:

- Penyusunan Rencana Aksi: Bappenas menyusun pedoman dan matriks Rencana Aksi TPB/SDGs yang mengaitkan target SDG 16 dengan kebijakan pembangunan nasional, program, kegiatan, dan sumber daya pendukungnya.
- Koordinasi dan Fasilitasi: Bappenas memfasilitasi dialog dan koordinasi antar kementerian/lembaga, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk mencapai target SDG 16.
- Pengukuran dan Pelaporan: Bappenas bertugas mengawasi dan menilai pelaksanaan pencapaian target, termasuk indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index), yang dilakukan melalui survei komunitas, wawancara ahli, dan pengumpulan data administratif.
- Inovasi dan Solusi: Bappenas mendorong solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam implementasi SDG 16, seperti masalah korupsi dan penegakan hukum.
- Meningkatkan Tata Kelola: Salah satu fokus Bappenas dalam SDG 16 adalah penguatan tata kelola yang baik, yang dianggap sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan.
- Peringkat spesifik Indonesia untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat) tidak tersedia secara terpisah dalam sumber terbaru yang ditemukan. Namun, laporan menunjukkan bahwa kemajuan Indonesia secara umum untuk SDG 16 saat ini dalam kondisi stagnan. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai status SDG 16 di Indonesia:
 - Status Kemajuan: Menurut laporan *Sustainable Development Report 2025* yang dirilis oleh *UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN)*, ***SDG 16 adalah salah satu dari sembilan tujuan yang kemajuannya stagnan di Indonesia.***
 - Peringkat Global (Keseluruhan SDGs): Indonesia secara keseluruhan berada di peringkat ke-77 dari 167 negara dalam Indeks SDG Global tahun 2024 (dengan data yang diperbarui pada tahun 2025), dengan skor 70,2 dari 100.
 - Tantangan Utama: Tantangan dalam mencapai SDG 16 termasuk isu-isu seperti korupsi dan penegakan hukum yang belum memadai. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbaikan, seperti penurunan angka insiden penyuapan yang dialami oleh perusahaan.
 - Indikator Positif: Beberapa indikator menunjukkan perbaikan, misalnya tingkat pembunuhan yang disengaja per 100.000 populasi relatif rendah (0,3 pada tahun 2022), proporsi anak di bawah 5 tahun yang akte kelahirannya telah terdaftar mencapai 85,1% pada tahun 2024.
 - Laporan global terbaru tahun 2024 mengenai SDG 16 secara spesifik mencatat bahwa kemajuan global untuk tujuan ini berjalan sangat lambat, dan dalam beberapa kasus bahkan bergerak ke arah yang salah atau sebaliknya, sehingga disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara lain.

17. PROGRAM KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA

Salah satu cara akselerasi ber SDG adalah membangun kolaborasi program SDG antar negara sahabat. "Program kemitraan yang bertujuan baik" dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB secara spesifik merujuk pada Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*). Tujuan ini adalah tentang menghidupkan kembali dan memperkuat kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, mengakui bahwa semua 17 tujuan hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang kuat dan efektif.

Rincian agenda Tujuan 17 mencakup beberapa area utama:

1. Keuangan (Finance). Fokusnya adalah memobilisasi sumber daya keuangan yang memadai, terutama untuk negara-negara berkembang. Target: Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, meningkatkan bantuan pembangunan resmi (ODA), dan memobilisasi sumber daya keuangan tambahan dari berbagai sumber..
2. Teknologi (Technology). Tujuannya adalah memfasilitasi akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Target: Meningkatkan kerja sama ilmiah dan akses pada teknologi bersih, serta membangun kapasitas teknologi di negara-negara berkembang.
3. Peningkatan Kapasitas (Capacity Building). Fokus ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang. Target: Mendukung pelaksanaan rencana nasional untuk mencapai semua tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama internasional, termasuk penyediaan pelatihan guru di negara-negara berkembang.
4. Perdagangan (Trade). Tujuannya adalah mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, non-diskriminatif, dan adil. Target: Meningkatkan ekspor negara-negara berkembang dan membantu memastikan realisasi akses pasar bebas bea dan kuota untuk semua negara kurang berkembang.
5. Isu Sistemik (Systemic Issues). Area ini mencakup koherensi kebijakan dan kemitraan multi-pemangku kepentingan. Target: Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, memperkuat koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan, serta menghormati kepemilikan nasional atas rencana implementasi. Hal ini juga mendorong dan mempromosikan kemitraan publik, swasta, dan masyarakat sipil yang efektif.

Secara ringkas, "program kemitraan yang bertujuan baik" dalam konteks SDGs PBB adalah inisiatif yang spesifik, terukur, dapat dicapai, berbasis sumber daya, dan terikat waktu yang menyatukan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk berkolaborasi dalam mencapai Agenda 2030.

Peringkat keseluruhan Indonesia dalam Indeks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG Index) global pada tahun 2024 adalah peringkat ke-77 dari 193 negara, dengan skor 70,22 dari 100. Namun, sumber yang tersedia tidak memberikan peringkat spesifik untuk SDG 17 ("Kemitraan untuk Mencapai Tujuan") secara terpisah.

Meskipun peringkat spesifik SDG 17 tidak tersedia dalam hasil pencarian, ada beberapa informasi terkait:

- Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan secara keseluruhan dalam pencapaian SDGs, naik dari peringkat 102 pada tahun 2019 menjadi 77 pada tahun 2024.
- Capaian target SDGs Indonesia mencapai 62,5% dari total indikator, jauh di atas rata-rata global yang hanya sekitar 17%.
- Pemerintah Indonesia mendorong percepatan target SDGs global dan diakui PBB sebagai salah satu negara paling progresif dalam pencapaian SDGs dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk informasi lebih rinci mengenai metrik spesifik SDG 17, Anda bisa merujuk pada Sustainable Development Report 2025 yang diterbitkan oleh UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

Kinerja Indonesia untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 17, yang berfokus pada kemitraan global, dinilai progresif oleh PBB dan ditunjukkan melalui berbagai inisiatif kerja sama internasional, khususnya Kerjasama Selatan-Selatan.

Berikut adalah rincian kinerja teranyar NKRI terkait SDG 17:

- Peringkat dan Capaian Umum: Indonesia menduduki peringkat ke-77 secara global pada Indeks SDG 2024 dan dinilai PBB sebagai salah satu negara berpenghasilan menengah ke atas yang paling progresif dalam pencapaian target SDGs secara keseluruhan. Secara umum, 61,4% indikator SDG Indonesia telah terpenuhi hingga Agustus 2025.
- Kerjasama Internasional: Indonesia secara aktif meningkatkan kerja sama internasional untuk mencapai target SDGs. Ini termasuk peran aktif dalam forum bilateral dan multilateral, serta berbagi pengalaman dalam perencanaan dan pembangunan.
- Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (SSTC): Indonesia menggunakan diplomasi *soft power* melalui SSTC sebagai strategi utama untuk memperkuat peran dan pengaruhnya sebagai aktor pembangunan global di antara negara-negara berkembang.
- Inovasi Pembiayaan: Pemerintah Indonesia telah berhasil mengumpulkan pendanaan sebesar \$1,7 miliar melalui mekanisme pembiayaan inovatif (*blended finance*) dari pasar domestik dan global untuk mendukung pencapaian SDGs.
- Kemitraan Multistakeholder: Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga akademik (seperti FEB Unpad dan FIA UI), organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk mempercepat pencapaian SDGs.
- Kerangka Kerjasama PBB: Indonesia dan PBB telah memperbarui kerangka kerja sama mereka melalui Indonesia-UN Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2026-2030, yang berfokus pada penguatan koordinasi dan mobilisasi sumber daya.

Informasi lebih detail mengenai kerangka kerja sama PBB di Indonesia dapat dilihat di situs resmi United Nations in Indonesia dan laporan pembangunan berkelanjutan melalui SDG Transformation Center.

Inilah usulan konstruktif penulis yang mungkin, seabgain atau seluruhnya, telah direalisasi Bappenas. Terdapat 17 butir utama SDG yang diperinci menjadi 169 program SDG, semua K/L diasumsikan terkait langsung (utama) atau tidak-langsung (tidak utama) kepada 17 butir-utama SDG dan 169 program SDG, sehingga Bappenas perlu membuat matriks 169 program SDG vs K/L Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia melibatkan kolaborasi multisektor, dengan tugas utama dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Bappenas bertugas membuat matriks 169 program SDG vs 53 K/L. Sekretariat Negara membagikan seluruh program SDG, yaitu 169 program SDG, kepada tiap Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait program tersebut dan/atau sesuai misi/tupoksi K/L tersebut, sehingga LAKIP tiap K/L melaporkan peran spesifik sesuai dengan target/program SDG yang relevan dengan tupoksi masing-masing K/L. Setiap K/L wajib dan dipastikan memiliki sub-organisasi SDG (mungkin sebuah Direktorat) untuk memudahkan koordinasi K/L cq rapat SDG bulanan Bappenas atau rapat berkala Kabinet, Bappenas dibantu BPKP membuat kompilasi Laporan Pelaksanaan SDG Tahunan NKRI. Laporan tahunan SDG Auditan BPK disajikan dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia untuk suplemen LAKIP Kabinet, dan versi Bahasa Inggris untuk laporan kepada PBB.

Berikut adalah pembagian tugas utama K/L dalam kerjasama internasional untuk penerapan SDGs di Indonesia:

1. Koordinator Utama dan Perencanaan

- Kementerian PPN/Bappenas: Berperan sebagai koordinator utama perencanaan dan pengarusutamaan SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional (RPJMN) dan daerah (RPJMD). Tugasnya meliputi:
 - Merumuskan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan memfasilitasi Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan.
 - Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan capaian SDGs secara berkala.
 - Meningkatkan koherensi kebijakan antar K/L untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
 - Mewakili Indonesia dalam forum internasional terkait pembangunan berkelanjutan, seperti High-Level Political Forum (HLPF) PBB.

2. Pelaksana Teknis Sektor

Setiap K/L bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang mendukung target SDGs dalam lingkup tugasnya. Beberapa contoh peran spesifik meliputi:

- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu): Memainkan peran kunci dalam diplomasi dan negosiasi kerja sama internasional, termasuk Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, untuk berbagi pengalaman dan sumber daya dalam pembangunan.
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Bertanggung jawab dalam mengelola aspek pendanaan, termasuk inovasi pembiayaan seperti penerbitan obligasi SDGs (Green Sukuk) dan penandaan anggaran (SDGs budget tagging) untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan.
- Kementerian Kesehatan: Fokus pada pencapaian SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), termasuk kerja sama global dalam ketahanan kesehatan, penuaan, dan penyakit tidak menular.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Berkontribusi pada SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui inisiatif global seperti "Pendidikan untuk Semua" dan peningkatan literasi.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo): Mendukung diseminasi informasi dan transformasi digital untuk mencapai tujuan SDGs.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa): Menerapkan program SDGs Desa yang menurunkan target nasional ke tingkat desa, berfokus pada pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di perdesaan.

3. Peran Lembaga Lainnya

- Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP DPR RI): Berperan dalam pengawasan (oversight) terhadap pelaksanaan SDGs oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.
- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMV Kemenkeu): Melalui platform SDG Indonesia One, terlibat dalam pembiayaan infrastruktur yang sejalan dengan 16 dari 17 target SDGs.

Secara keseluruhan, penerapan SDGs di Indonesia didasarkan pada prinsip partisipasi inklusif yang melibatkan pemerintah, parlemen, akademisi, pakar, filantropi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil, dengan Bappenas sebagai nexus koordinasi utama.

STUDI KASUS SDG VERSI UNI-EROPA

Tinjauan Sukarela Uni Eropa pertama tentang Implementasi Agenda 2030 (EUVR) menunjukkan bagaimana prioritas Komisi, seperti Kesepakatan Hijau Eropa, membantu mendorong transformasi yang diperlukan di dalam negeri dan secara global untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), tanpa meninggalkan siapa pun di belakang. Prioritas-prioritas ini saling terkait dengan lima P – Manusia, Planet, Kemakmuran, Perdamaian, Kemitraan – dalam pembukaan Agenda 2030.

Uni Eropa (UE) mengimplementasikan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB melalui integrasi ke dalam kebijakan internal dan eksternalnya, seperti

European Green Deal dan strategi investasi global Global Gateway. Rencana aksi ini mencakup seluruh 17 tujuan global yang disesuaikan dengan konteks dan prioritas UE.

Rincian Pendekatan Uni Eropa terhadap SDGs

Uni Eropa tidak hanya mengadopsi 17 tujuan tersebut, tetapi juga *menerjemahkannya ke dalam kerangka kebijakan konkret*. Pendekatan utamanya meliputi:

- Integrasi Kebijakan Internal: UE memasukkan agenda SDGs ke dalam prioritas internal seperti *European Green Deal* (yang berfokus pada iklim dan lingkungan) dan proses *European Semester* (koordinasi kebijakan ekonomi). Hampir seluruh anggaran UE memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDGs.
- Aksi Global: UE dan negara anggotanya adalah donor bantuan pembangunan resmi (ODA) terbesar di dunia. Melalui inisiatif seperti Global Gateway Strategy, UE berinvestasi dalam infrastruktur berkelanjutan (transportasi, energi, digitalisasi, kesehatan, dan pendidikan) di negara-negara mitra untuk memajukan SDGs secara global.
- Pelaporan dan Pemantauan: UE secara rutin memantau kemajuannya melalui laporan pemantauan SDG tahunan. Laporan terbaru (edisi 2025) menggunakan 102 indikator yang disesuaikan dengan konteks UE untuk mengukur kemajuan di setiap tujuan.
- Keterlibatan Multi-pihak: Implementasi SDGs di UE melibatkan pemerintah daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan media, memastikan pendekatan yang inklusif dan menyeluruh.

Laporan pemantauan UE menunjukkan kemajuan signifikan pada tujuan seperti SDG 10 (mengurangi kesenjangan) dan SDG 8 (pekerjaan layak), namun masih menghadapi tantangan pada SDG 14 (kehidupan di bawah air) dan SDG 15 (kehidupan di darat).

Uni Eropa (UE) secara kolektif memimpin dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, dengan negara-negara anggotanya seperti Finlandia, Swedia, dan Denmark **sering menempati peringkat teratas** secara individu dalam Laporan Pembangunan Berkelanjutan (SDSR) tahunan, menunjukkan kemajuan signifikan dalam implementasi agenda SDGs di tingkat nasional dan internasional, meskipun masih menghadapi tantangan pada beberapa target spesifik seperti konsumsi berkelanjutan dan aksi iklim.

Peringkat Kolektif & Individu UE:

- Pemimpin Global: Negara-negara Eropa, terutama Nordik (Finlandia, Swedia, Denmark), terus memimpin indeks SDGs secara global, menjadi yang terdepan dalam kemajuan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Kontribusi Terbesar: Sebagai entitas, Uni Eropa dan negara anggotanya merupakan kontributor bantuan pembangunan resmi (ODA) terbesar di dunia, mendukung agenda SDGs secara global.

- Inisiatif: UE mendukung SDGs melalui inisiatif seperti Global Gateway, menginvestasikan miliaran euro untuk pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, dan menilai kemajuan mereka dalam tinjauan sukarela.

Tantangan dan Fokus:

- Pola Konsumsi: Meskipun maju, negara-negara UE menghadapi tantangan besar dalam mencapai target seperti SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab), SDG 13 (Aksi Iklim), dan SDG 15 (Kehidupan di Daratan).
- Sinergi antar-SDGs: Analisis menunjukkan sinergi yang kuat antar SDGs di UE (misalnya, Kesetaraan Gender - SDG 5), tetapi juga trade-off tertentu, dengan energi bersih (SDG 7) tidak selalu berkorelasi kuat dengan tujuan lain.

Sumber Data:

- Sustainable Development Report (SDR): Laporan tahunan dari Sustainable Development Center dan Katadata Green mengukur kemajuan negara-negara di seluruh dunia, menempatkan UE di puncak.
- THE Impact Rankings: Times Higher Education (THE) memeringkat universitas berdasarkan kontribusi mereka terhadap SDGs, seringkali menyoroti universitas Eropa yang berkinerja tinggi di berbagai tujuan.

Secara ringkas, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya berada di garis depan dalam mendukung dan mencapai SDGs, meskipun mereka masih berjuang dengan dampak konsumsi dan produksi mereka sendiri.

PERIHAL SDG DAN OKI

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) *tidak secara keras menentang* Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, melainkan mendukung dan mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam program aksi internal mereka, sambil terus menyuarakan isu-isu politik yang menjadi prioritas, terutama masalah Palestina.

Peringkat negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam Indeks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB bervariasi, dengan negara-negara di kawasan Eropa dan Asia Tengah umumnya memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di sub-Sahara Afrika atau negara-negara yang dilanda konflik

Sikap dan Respons OKI terhadap SDGs PBB

- Penyelarasan Program Aksi: OKI menyadari banyak area dalam Program Aksi OKI 2025 yang memiliki keterkaitan erat dengan SDGs PBB, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan pendidikan berkualitas. Negara-negara anggota disarankan untuk menyelaraskan program nasional mereka dengan target global ini.
- Komitmen Pembangunan: OKI telah berjanji untuk mencapai SDGs pada tahun 2030, sejalan dengan visi dan tujuan organisasi untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat Muslim di seluruh dunia.
- Fokus pada Isu Sosial dan Ekonomi: Laporan internal OKI, seperti yang dibuat oleh Komite Kerjasama Ekonomi dan Komersial (COMCEC), menyoroti tantangan yang dihadapi negara-negara anggotanya dalam mencapai target SDGs tertentu, seperti mengakhiri kelaparan (SDG 2) dan mengurangi kemiskinan (SDG 1). Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kerja sama dan investasi di bidang-bidang tersebut.
- Kemitraan untuk Pelaksanaan: OKI menekankan pentingnya kemitraan global (SDG 17) dan kerja sama di antara negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan

pembangunan berkelanjutan, misalnya dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

SDG 5 tentang Kesetaraan Gender, berupaya mengatasi diskriminasi gender dengan menetapkan target global dan mendukung program-program di tingkat lokal. Pada berbagai negara Islam konservatif seperti Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban, upaya ini menghadapi tantangan signifikan dari kebijakan domestik yang membatasi hak-hak perempuan secara sistematis.

Secara umum, kerangka kerja SDG 5 mencakup target-target spesifik untuk:

- Mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di mana saja.
- Menjamin partisipasi penuh dan efektif perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan publik.
- Menghilangkan praktik-praktik berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini, dan paksa.
- Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi.
- Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama kepada perempuan atas sumber daya ekonomi, seperti tanah dan properti.

Implementasi dan Tantangan di Afghanistan.

Di Afghanistan, penerapan SDG 5 dilakukan melalui berbagai inisiatif oleh PBB, berbagai organisasi internasional, dan LSM lokal, meskipun dalam situasi yang sangat sulit, terutama sejak Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, antara lain.

- Pendidikan dan Pelatihan: Organisasi seperti *Afghanaid* dan UN Women menjalankan program literasi dan pelatihan kejuruan (misalnya, pengolahan susu, menjahit) untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi, seringkali melalui kelompok swadaya lokal.
- Advokasi Global dan Tekanan Diplomatik: PBB dan komunitas internasional secara konsisten menggunakan tekanan diplomatik dan seruan global agar rezim Taliban mencabut larangan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan.
- Dukungan Kemanusiaan dan Akses Layanan: Organisasi PBB mengintegrasikan perlindungan perempuan dan anak perempuan ke dalam bantuan kemanusiaan dan memastikan akses terhadap layanan kesehatan esensial, meskipun perempuan seringkali membutuhkan pendamping pria (*mahram*) untuk mengaksesnya.

Pencapaian SDG 5 di Afghanistan saat ini sangat terancam dan mengalami kemunduran signifikan:

- Larangan Sistematis: Pemerintah Taliban telah mengeluarkan lebih dari 80 dekrit yang secara efektif mengecualikan perempuan dari kehidupan publik, termasuk melarang pendidikan menengah dan tinggi bagi anak perempuan, melarang perempuan bekerja di sebagian besar sektor, dan membatasi pergerakan mereka.
- Kerangka Hukum yang Kaku: Interpretasi Syariah yang ketat oleh rezim berkuasa sering kali bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip universal kesetaraan gender dalam SDG, menciptakan "apartheid gender" secara de facto.
- Krisis Ekonomi: Situasi kemanusiaan yang parah memperburuk ketidaksetaraan, di mana rumah tangga yang dikepalai perempuan hampir 100% menghadapi kerawanan pangan yang parah.

Singkatnya, SDG menyediakan kerangka kerja dan tujuan ideal untuk kesetaraan gender, tetapi penerapannya di lingkungan yang sangat represif seperti Afghanistan menghadapi

hambatan politik dan ideologis yang sangat besar, mengandalkan upaya gigih dari aktivis lokal dan organisasi internasional untuk mempertahankan harapan dan mendukung perempuan Afghanistan secara diam-diam.

Berikut adalah ringkasan beberapa pembatasan utama terkait gender yang diterapkan pemerintahan Taliban:

Pendidikan sbb :

- Larangan Sekolah Menengah dan Atas: Anak perempuan dilarang mengenyam pendidikan di sekolah menengah (setelah kelas 6).
- Larangan Universitas: Perempuan dilarang mengikuti ujian masuk dan perkuliahan di universitas swasta maupun negeri.
- Pemisahan Gender: Di institusi yang masih mengizinkan pendidikan (sebelum larangan total), diterapkan pemisahan ketat pintu masuk dan ruang kelas berdasarkan gender, serta hanya boleh diajar oleh dosen perempuan atau pria tua.
- Larangan Studi Gender: Taliban melarang studi gender dan menghapus buku-buku karya perempuan dari kurikulum universitas.

Pekerjaan dan Kehidupan Publik sbb :

- Larangan Bekerja di Sebagian Besar Sektor: Perempuan dilarang bekerja di kantor pemerintahan dan sebagian besar bidang pekerjaan lainnya. Beberapa pekerjaan yang masih diizinkan sangat terbatas, seperti memetik bunga safron.
- Wajib Cadar/Burqa: Perempuan diwajibkan menutup wajah mereka di tempat umum, dengan burqa biru sebagai penutup wajah ideal yang direkomendasikan.
- Larangan Bepergian Tanpa Wali Laki-laki (Mahram): Perempuan tidak diizinkan bepergian jarak jauh tanpa ditemani oleh kerabat laki-laki dekat.
- Pembatasan Kebebasan Bergerak: Perempuan diperintahkan untuk tinggal di rumah dan hanya keluar "jika diperlukan".
- Larangan Fasilitas Umum: Perempuan dilarang menggunakan fasilitas umum tertentu, seperti taman, pemandian umum, dan pusat kebugaran.

Hukum dan Pernikahan sbb :

- Sistem Hukum yang Direstrukturisasi: Taliban merombak sistem hukum dan melarang perempuan terlibat dalam proses peradilan.
- Dekrit tentang Pernikahan: Dekrit-dekrit secara sistematis membatasi hak dan kebebasan perempuan, yang oleh para ahli PBB digambarkan sebagai perlakuan yang bisa dikategorikan sebagai "apartheid gender". Namun terdapat sebuah dekrit menyatakan bahwa perempuan tidak boleh dianggap sebagai properti dan harus menyetujui pernikahan mereka (tidak boleh dinikahkan secara paksa), meskipun banyak pembatasan lain yang meniadakan kemampuan mereka untuk hidup mandiri, yang di abaikan.

Selain Afghanistan, yang disebut PBB sebagai negara paling represif di dunia bagi perempuan, beberapa negara lain juga dikenal memiliki tingkat diskriminasi dan kesenjangan gender yang sangat tinggi berdasarkan berbagai laporan global. Negara-negara ini sering kali berada di peringkat terbawah dalam indeks kesetaraan gender.

Berdasarkan laporan dari berbagai sumber seperti PBB dan World Economic Forum (WEF) pada tahun 2024/2025, negara-negara dengan situasi hak perempuan yang paling memprihatinkan meliputi:

- Guinea
- Mali
- Haiti

- Guinea-Bissau
- Liberia
- Chad
- Somalia
- Nigeria
- Yaman
- Pakistan
- Iran
- Sudan

Negara-negara tersebut menghadapi tantangan besar dalam memastikan hak-hak dasar perempuan, sering kali akibat konflik yang berkepanjangan, hukum yang membatasi, atau norma budaya yang mengakar kuat.

Laporan Kesenjangan Gender Global dari WEF secara spesifik menyoroti bahwa negara-negara seperti Guinea, Iran, Chad, Pakistan, dan Sudan adalah yang paling jauh dari kesetaraan gender penuh di antara negara-negara yang dianalisis. Di beberapa negara Timur Tengah lainnya seperti Arab Saudi, UEA, Bahrain, Oman, dan Kuwait, terdapat pula nisbah ketimpangan gender dalam dinamika sosial dan ketenagakerjaan tertentu, adalah metrik yang berbeda dari penindasan hak-perempuan secara langsung.

KESIMPULAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah meningkatkan kehidupan jutaan orang selama satu dekade terakhir, namun kemajuan masih belum cukup, temuan laporan PBB Siaran Pers PBB, 15 Juli 2025, berjudul Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah meningkatkan kehidupan jutaan orang selama satu dekade terakhir, namun kemajuan masih belum cukup, temuan laporan PBB, menyajikan informasi sebagai berikut.

Satu dekade setelah diadopsinya Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini merilis edisi ke-10 dari laporan tahunan *The Sustainable Development Goals Report 2025*. Laporan ini memberikan penilaian yang tegas dan seruan kuat untuk bertindak.

Meskipun jutaan kehidupan telah membaik melalui peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan, energi, dan konektivitas digital, laju perubahan masih belum cukup untuk mencapai Tujuan pada tahun 2030. Data terbaru menunjukkan bahwa hanya 35 persen target yang berada di jalur yang tepat atau mengalami kemajuan sedang, sementara hampir separuh bergerak terlalu lambat dan 18 persen justru mengalami kemunduran.

“Kita sedang menghadapi keadaan darurat pembangunan,” kata Sekretaris Jenderal PBB António Guterres. “Tetapi laporan ini bukan sekadar gambaran hari ini. Ini adalah kompas yang menunjukkan arah kemajuan. Laporan ini menunjukkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan masih dapat dicapai. Namun hanya jika kita bertindak—dengan segera, bersama-sama, dan dengan tekad yang kuat.”

Kemajuan di tengah tantangan bagi PBB

Terlepas dari berbagai tantangan global yang terus terjadi, laporan ini mencatat pencapaian global yang signifikan:

- Infeksi HIV baru menurun hampir 40 persen sejak 2010.
- Pencegahan malaria telah mencegah 2,2 miliar kasus dan menyelamatkan 12,7 juta jiwa sejak tahun 2000.

- Perlindungan sosial kini menjangkau lebih dari setengah populasi dunia, meningkat secara signifikan dari satu dekade lalu.
- Sejak 2015, 110 juta anak dan remaja tambahan telah bersekolah.
- Pernikahan anak mengalami penurunan, semakin banyak anak perempuan yang tetap bersekolah dan perempuan mendapatkan tempat di parlemen di seluruh dunia.
- Pada tahun 2023, 92 persen populasi dunia memiliki akses ke listrik.
- Penggunaan internet meningkat dari 40 persen pada 2015 menjadi 68 persen pada 2024, membuka akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sipil.
- Upaya konservasi telah menggandakan perlindungan ekosistem kunci, berkontribusi pada ketahanan keanekaragaman hayati global.

Fakta pahit dan risiko sistemik versi PBB

Di sisi lain, laporan ini juga menyoroti tantangan yang masih menghambat kemajuan pembangunan berkelanjutan:

- Lebih dari 800 juta orang masih hidup dalam kemiskinan ekstrem.
- Miliaran orang masih belum memiliki akses ke air minum yang aman, sanitasi, dan layanan kebersihan.
- Perubahan iklim menjadikan tahun 2024 sebagai tahun terpanas dalam sejarah, dengan suhu 1,55°C di atas tingkat pra-industri.
- Konflik menyebabkan hampir 50.000 kematian pada 2024. Pada akhir tahun itu, lebih dari 120 juta orang terpaksa mengungsi.
- Negara-negara berpendapatan rendah dan menengah menghadapi biaya pembayaran utang tertinggi dalam sejarah, sebesar \$1,4 triliun pada tahun 2023.

Peta jalan untuk percepatan jalan kemakmuran bersama

Laporan ini menyerukan tindakan di enam area prioritas yang dapat memberikan dampak transformatif: sistem pangan, akses energi, transformasi digital, pendidikan, pekerjaan dan perlindungan sosial, serta aksi iklim dan keanekaragaman hayati.

Laporan ini juga mendorong pemerintah dan mitra untuk mengimplementasikan *Medellín Framework for Action*, sebuah peta jalan yang diadopsi pada *UN World Data Forum 2024*, guna memperkuat sistem data yang penting untuk kebijakan yang responsif.

Berbagai kisah sukses menunjukkan bahwa tujuan dapat dicapai

Rata-rata global dapat menyamarkan kemajuan signifikan yang dicapai banyak negara di berbagai Tujuan. Misalnya, 45 negara telah mencapai akses listrik universal dalam satu dekade terakhir dan 54 negara telah mengeliminasi setidaknya satu penyakit tropis terabaikan hingga akhir 2024. Keberhasilan nasional dan lokal ini, didorong oleh kebijakan yang kuat, institusi yang tangguh, dan kemitraan yang inklusif, membuktikan bahwa percepatan kemajuan tidak hanya mungkin, tetapi juga sedang berlangsung.

Lima tahun terakhir menuju 2030 adalah peluang penting untuk memenuhi janji Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Agenda 2030 bukan sekadar aspirasi; ia adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar.

“Ini bukan saatnya untuk putus asa, tetapi untuk bertindak dengan tekad,” kata Li Junhua, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial. “Kita memiliki pengetahuan, alat, dan kemitraan untuk mendorong transformasi. Yang kita butuhkan sekarang adalah multilateralisme yang mendesak—komitmen ulang terhadap tanggung jawab bersama dan investasi berkelanjutan.”

Fakta dan angka penting tambahan pendorong semangat ber SDG dunia :

Kemajuan

- Antara 2012 dan 2024, prevalensi stunting pada anak di bawah usia 5 tahun menurun dari 26,4 persen menjadi 23,2 persen.
- Harapan hidup sehat meningkat lebih dari lima tahun antara 2000 dan 2019. Namun, COVID-19 membalikkan beberapa capaian ini, menurunkan harapan hidup sebesar 1,8 tahun.
- Angka kematian ibu secara global turun dari 228 per 100.000 kelahiran hidup pada 2015 menjadi 197 pada 2023. Kematian balita menurun menjadi 37 per 1.000 kelahiran hidup pada 2023, penurunan 16 persen dari 44 pada 2015.
- Hingga akhir 2024, 54 negara telah mengeliminasi setidaknya satu penyakit tropis terabaikan.
- Antara 2019 dan 2024, 99 reformasi hukum positif diterapkan untuk menghapus hukum diskriminatif dan menetapkan kerangka kerja kesetaraan gender.
- Per 1 Januari 2025, perempuan memegang 27,2 persen kursi di parlemen nasional, naik 4,9 poin persentase dari tahun 2015.
- Energi terbarukan kini menjadi sumber energi dengan pertumbuhan tercepat dan diperkirakan akan melampaui batu bara sebagai sumber listrik utama pada 2025.
- Broadband seluler 5G kini menjangkau 51 persen populasi global.

Kemunduran

- Tanpa percepatan upaya yang signifikan, 8,9 persen populasi dunia masih akan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2030 berdasarkan garis kemiskinan internasional yang diperbarui.
- Hampir 1 dari 11 orang di dunia menghadapi kelaparan pada 2023.
- Pada 2023, 272 juta anak dan remaja masih tidak bersekolah.
- Perempuan melakukan 2,5 kali lebih banyak pekerjaan rumah tangga dan perawatan yang tidak dibayar dibandingkan laki-laki.
- Pada 2024, 2,2 miliar orang tidak memiliki akses air minum yang aman, 3,4 miliar tanpa sanitasi yang dikelola dengan aman, dan 1,7 miliar tidak memiliki layanan kebersihan dasar di rumah.
- Populasi pengungsi global meningkat menjadi 37,8 juta pada pertengahan 2024.
- Di seluruh dunia, 1,12 miliar orang tinggal di permukiman kumuh atau tidak resmi tanpa layanan dasar.
- Bantuan pembangunan resmi turun 7,1 persen pada 2024 setelah lima tahun pertumbuhan, dan diperkirakan akan mengalami pemotongan lebih lanjut pada 2025.

Raihan NKRI sbb :

Diluar laporan PBB tersebut diatas, berbagai sumber menyatakan berbagai informasi sbb :

1. **No Poverty (Tanpa Kemiskinan).** Tujuan pertama dari 17 butir SDGs ini adalah untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia. Fokus dari tujuan ini terutama memberdayakan individu yang hidup dalam kondisi rentan. Pembaca nan-arif selalu mencari lembaga lain yang lebih kompeten daripada sekedar sumber yang ditemukan penulis makalah ini. Versi Bank Dunia: Menggunakan standar garis kemiskinan global yang lebih tinggi, yaitu USD 6,85 (atau USD 8,30 setelah penyesuaian pada Juni 2025) per orang per hari untuk negara berpendapatan menengah ke atas. Menurut laporan Bank Dunia April 2025, berdasarkan standar tersebut, sekitar 60,3% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada 2024. Proyeksi Bank Dunia untuk persentase ini di tahun 2025 diperkirakan menurun menjadi sekitar 58,7%. Pada peringkat dunia, Indonesia tidak termasuk dalam daftar 10 negara termiskin di dunia jika dilihat dari PDB per kapita, di mana negara-negara

Afrika seperti Sudan Selatan dan Burundi menempati posisi teratas. Namun, dalam konteks jumlah absolut penduduk miskin dengan standar Bank Dunia, Indonesia menempati posisi keempat secara global.

2. **Zero Hunger (Tanpa Kelaparan).** Pada tujuan SDGs kedua adalah untuk menghilangkan kelaparan dan mencapai ketahanan pangan. Selain itu, juga menekankan upaya perbaikan gizi, peningkatan nutrisi, serta pertanian yang berkelanjutan. Komitmen ini dapat tercapai dengan adanya ketersediaan akses atas makan-makanan yang sehat, cukup, dan seimbang bagi semua orang. Pembaca nan-arif selalu mencari lembaga lain yang lebih kompeten daripada sekedar sumber yang ditemukan penulis makalah ini. Peringkat dan skor spesifik Indonesia dalam Indeks Kelaparan Global (Global Hunger Index/GHI) 2025 adalah peringkat 70 dari 123 negara yang datanya tersedia, dengan skor GHI 14,6, diklasifikasikan sebagai "moderat". Laporan GHI 2025 secara resmi dirilis pada Oktober 2025, dan datanya mencakup periode 2020 hingga 2024.
3. **Good Health and Well-being (Kehidupan Sehat dan Sejahtera).** Fokus utama tujuan SDG ini adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan secara keseluruhan. Upaya itu, mulai dari penguatan sistem kesehatan, penurunan angka kematian, dan pengendalian penyebaran penyakit menular, serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan terjangkau. Dengan demikian, memastikan kehidupan secara sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua di segala usia. Pembaca nan-arif selalu mencari lembaga lain yang lebih kompeten daripada sekedar sumber yang ditemukan penulis makalah ini. Peringkat dan indeks kesehatan Indonesia di dunia untuk tahun 2025 bervariasi tergantung pada indeks yang digunakan, namun beberapa laporan terbaru memberikan gambaran umum. Peringkat Global (Bervariasi): Indonesia menempati peringkat ke-109 dari 197 negara dalam salah satu peringkat kesehatan global dengan skor 68,84. Indeks Layanan Kesehatan: Dalam hal layanan kesehatan, Indonesia berada di peringkat ke-39 secara global dengan skor 42,99. Peringkat Regional (Asia Tenggara): Di Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-6 untuk Indeks Layanan Kesehatan (Healthcare Index) 2025, setelah Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Global Flourishing Index: Menariknya, Indonesia menempati posisi pertama dalam Global Flourishing Index pada tahun 2025, yang mengukur kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, melampaui negara-negara yang lebih kaya.
4. **Quality Education (Pendidikan Berkualitas).** Inti dari SDGs Edukasi adalah untuk menyediakan akses pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua orang. Hal ini memerlukan upaya peningkatan kualitas dan penjaminan mutu pendidikan hingga pemberdayaan tenaga pengajar. Dengan demikian, dapat mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Pembaca nan-arif selalu mencari lembaga lain yang lebih kompeten daripada sekedar sumber yang ditemukan penulis makalah ini. Berikut adalah beberapa peringkat relevan terbaru yang tersedia. Indeks Kualitas Pendidikan Global (berdasarkan laporan UNESCO dan BPS 2024): Indonesia berada di peringkat 72 dari 140 negara. Global Innovation Index (GII) 2025 (oleh WIPO): Indonesia menempati peringkat 55 dari 139 negara. Pendidikan merupakan salah satu komponen pendukung dalam indeks inovasi ini. Global Education Futures Readiness Index 2025: Dalam survei global yang menilai sistem pendidikan publik, kemungkinan orang mengikuti universitas, dan kualitas pendidikan, Indonesia berada di peringkat 56 secara global. Human Development Index (HDI) 2025 (oleh BPS): Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 75,90 (kategori "tinggi"), meningkat dari tahun sebelumnya.. Komponen pendidikan adalah bagian integral dari perhitungan IPM.

5. **Gender Equality (Kesetaraan Gender).** Kesetaraan dan pemberdayaan gender juga menjadi target krusial dalam SDGs global. Penekanan pada poin ini tidak hanya mencakup penghapusan diskriminasi gender, tetapi juga penghapusan kekerasan berbasis gender, memastikan akses ke pendidikan dan pekerjaan yang layak, serta khususnya mendorong partisipasi penuh dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial yang turut melibatkan perempuan dan anak perempuan dalam segala bidang. Pembaca nan-arif selalu mencari lembaga lain yang lebih kompeten daripada sekedar sumber yang ditemukan penulis makalah ini. Berdasarkan Laporan Kesenjangan Gender Global (Global Gender Gap Report) 2025 yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF), Indonesia berada di peringkat ke-97 dari total 148 negara. Indonesia memperoleh skor paritas gender keseluruhan sebesar **0,692** (skala 0 hingga 1, di mana 1 menunjukkan kesetaraan penuh). Peringkat Indonesia naik tiga posisi dibandingkan tahun 2024, dan skornya meningkat dari 0,686 menjadi 0,692. Secara regional di Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ketujuh, di belakang Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Timor Leste, dan Laos. Data lengkap dan analisis mendalam dapat ditemukan dalam *Global Gender Gap Report 2025* yang diterbitkan oleh WEF.
6. **Clean Water and Sanitation (Air Bersih dan Sanitasi Layak).** SDGs 6 menargetkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, berfokus pada pengelolaan-penyediaan air yang berkelanjutan, pengendalian polusi air, dan mencapai kualitas lingkungan yang bersih dan sehat. Tidak ada peringkat global tunggal yang disebut "indeks air bersih" yang secara konsisten melacak semua negara setiap tahunnya. Peringkat akses dan kualitas air biasanya dinilai melalui laporan berkala, seperti Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB, yang datanya dapat bervariasi tergantung pada metodologi dan tahun pelaporan. Pembaca nan-arif selalu mencari lembaga lain yang lebih kompeten daripada sekedar sumber yang ditemukan penulis makalah ini. Data yang tersedia untuk Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan tantangan dan upaya yang sedang berlangsung: Akses Air Bersih: Pada pertengahan tahun 2025, dilaporkan bahwa sekitar 28 juta penduduk Indonesia masih mengalami kesulitan mengakses air bersih. Kualitas Air: Kualitas air di beberapa sungai di Indonesia dilaporkan membaik, namun lebih dari 50 persen sumber air masih terancam pencemaran. Peringkat Global: Indonesia menduduki peringkat ke-151 dalam Global Sustainability Index, yang mencakup aspek pengelolaan sumber daya alam, pada laporan tahun 2020 (data terbaru yang tersedia dalam indeks tersebut). Peringkat pastinya pada tahun 2025 untuk indeks spesifik ini tidak tersedia, tetapi fokus pemerintah Indonesia melalui Program Nasional Air Bersih 2025 adalah pada perbaikan infrastruktur. Potensi Sumber Daya: Indonesia memiliki cadangan air terbesar ke-7 di dunia, namun ironisnya masih menghadapi kelangkaan air bersih karena masalah distribusi dan infrastruktur yang belum memadai. Pemerintah Indonesia sedang berupaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke-6, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua, melalui berbagai program nasional dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Data indikator SDG yang lebih rinci untuk Indonesia pada tahun 2025 dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia pada akhir Desember 2025. Hingga akhir tahun 2025, Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait air bersih dan sanitasi, dengan laporan terbaru yang menempatkannya sebagai salah satu negara dengan kondisi lingkungan terburuk secara global. Peringkat Negara Terkotor: Sebuah laporan dari Ultimate Kilimanjaro (2025) menempatkan Indonesia di peringkat ke-10 dari 150 negara terkotor di dunia. Peringkat ini didasarkan pada kualitas udara, air, pengelolaan limbah, dan kebersihan

lingkungan. Untuk aspek kualitas air, Indonesia mencatat skor 55 dari 100. Akses Sanitasi: Menurut data WHO dan Pemerintah Indonesia sepanjang tahun 2025, lebih dari 30 juta masyarakat Indonesia masih belum memiliki akses terhadap sanitasi yang dikelola dengan aman. Pada tahun 2024, hanya 10,2% rumah tangga yang memiliki toilet yang memisahkan limbah manusia dari lingkungan dengan aman. Peringkat EPI (Data Sebelumnya): Meskipun data Environmental Performance Index (EPI) untuk tahun 2025 belum tersedia, laporan EPI tahun 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat 125 untuk air minum dan 121 untuk sanitasi dari total negara yang disurvei, menunjukkan posisi yang masih rendah secara global.

7. **Affordable and Clean Energy (Energi Bersih dan Terjangkau).** Pembaca nan-arif selalu mencari lembaga lain yang lebih kompeten daripada sekedar sumber yang ditemukan penulis makalah ini. Tidak ada indeks tunggal "indeks energi bersih NKRI 2025 di dunia" yang diakui secara universal. Peringkat Indonesia dalam transisi energi bersih diukur melalui berbagai laporan global, dan kinerjanya menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap konsolidasi, dengan kemajuan yang terbatas. Berikut adalah gambaran umum mengenai posisi Indonesia berdasarkan laporan-laporan utama yang dirilis sekitar tahun 2025. Peringkat Global: Berdasarkan *Climate Change Performance Index (CCPI) 2026* (yang datanya mencakup periode hingga tahun 2025), Indonesia berada di peringkat ke-43, dinilai sebagai negara dengan performa rendah secara keseluruhan dalam upaya mitigasi perubahan iklim, termasuk energi bersih. Target vs. Realisasi: Target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia untuk tahun 2025 adalah 23%, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Namun, realisasi hingga semester I-2025 baru mencapai 16%. Laporan *Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2025* dari IESR mencatat bahwa target ini mungkin telah diturunkan menjadi 17-19% dalam revisi kebijakan terbaru, menunjukkan tantangan signifikan dalam pencapaian target ambisius tersebut. Tantangan Utama: Laporan IETO 2025 menyoroti ketergantungan Indonesia yang terus berlanjut pada batu bara, yang menghambat transisi menuju masa depan rendah karbon. Selain itu, terdapat tantangan dalam kerangka kebijakan, mobilisasi keuangan, dan integrasi energi terbarukan ke dalam pasar listrik lokal. Peluang: Meskipun peringkatnya rendah, Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya EBT seperti surya, panas bumi, dan bioenergi. Laporan *Climatescope 2025* menempatkan Indonesia di peringkat ke-35 di antara pasar berkembang (emerging markets) dan ke-15 di kawasan Asia-Pasifik dalam hal daya tarik investasi dan peluang energi bersih. Secara ringkas, peringkat dan kemajuan Indonesia dalam indeks energi bersih global untuk tahun 2025 masih mencerminkan status "performa rendah" dan menghadapi tantangan besar dalam implementasi praktis.
8. **Decent Work and Economic Growth (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).** SDGs 8 bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif hingga memastikan pekerjaan yang produktif dan layak bagi semua orang. Pentingnya poin ini juga memberikan kesempatan kerja secara adil. Pembaca nan-arif selalu mencari lembaga lain yang lebih kompeten daripada sekedar sumber yang ditemukan penulis makalah ini. Tingkat Pengangguran Indonesia 2025 Tertinggi di ASEAN, Capai 4,76%.
9. **Industry, Innovation, and Infrastructure (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur).** Hingga tahun 2030, target tujuan SDGs ke-9 ini adalah untuk membangun infrastruktur yang kokoh, meningkatkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong perkembangan inovasi. Pembaca nan-arif selalu mencari lembaga lain yang lebih kompeten daripada sekedar sumber yang ditemukan penulis makalah

ini. Indonesia menunjukkan kinerja yang meningkat dalam indeks inovasi global, menempati peringkat ke-54 dalam Global Innovation Index (GII) 2024 yang dirilis oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Dalam aspek industri, Indonesia termasuk dalam 12 besar negara manufaktur dunia. Peringkat Indonesia dalam GII telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir: **2021:** Peringkat 87, **2022:** Peringkat 75, **2023:** Peringkat 61, **2024:** Peringkat 54 (dari 133 negara) dan **2025 (proyeksi/awal):** Peringkat 55 (dari 139 negara, sedikit turun 1 peringkat). Peningkatan ini mencerminkan upaya bersama dalam memperbaiki ekosistem riset dan inovasi nasional, meskipun posisinya masih di bawah beberapa negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Pemerintah Indonesia menargetkan peringkat 49 pada tahun 2029. Beberapa kekuatan utama Indonesia dalam GII 2025 meliputi institusi (peringkat 39) dan kecanggihan pasar (peringkat 50), sementara kelemahan berada pada sumber daya manusia dan penelitian (peringkat 92) serta infrastruktur (peringkat 71). Di bidang industri, Indonesia telah mencapai tonggak penting: **12 Besar Manufaktur Dunia:** Berdasarkan data dari The Global Economy dan World Bank, Indonesia resmi masuk dalam daftar 12 besar negara manufaktur dunia pada tahun 2023. Nilai Tambah Manufaktur (MVA): MVA Indonesia mencapai rekor tertinggi sebesar USD 255,96 miliar pada tahun 2023, jauh melampaui negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Vietnam. Daya Saing Global: Dalam World Competitiveness Ranking (WCR) 2024 yang dirilis oleh International Institute for Management Development (IMD), Indonesia menempati peringkat ke-27 dari 67 negara, menjadikannya tiga besar di kawasan Asia Tenggara setelah Singapura. Sektor manufaktur tetap menjadi kontributor terbesar bagi PDB nasional, menunjukkan struktur industri yang semakin mendalam dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

- 10. Reduced Inequalities (Berkurangnya Ketimpangan).** Pembaca nan-arif selalu mencari lembaga lain yang lebih kompeten daripada sekedar sumber yang ditemukan penulis makalah ini. Indeks Senjang Kemiskinan (**Poverty Gap Index**) Indonesia di tingkat global tidak tersedia dalam satu peringkat tunggal yang komprehensif, karena lembaga internasional seperti Bank Dunia dan BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan metodologi dan ambang batas yang berbeda untuk perbandingan. Namun, berdasarkan data Bank Dunia terbaru (April-Juni 2025) menggunakan standar internasional, beberapa gambaran dapat diberikan. **Peringkat Kemiskinan Relatif:** Menurut laporan Bank Dunia April 2025, Indonesia menempati peringkat ke-4 dalam persentase penduduk miskin di antara negara-negara berpenghasilan menengah ke atas (upper-middle-income countries). **Persentase Penduduk Miskin (Standar Bank Dunia):** Sekitar 60,3% populasi Indonesia dikategorikan miskin pada tahun 2024, berdasarkan ambang batas Bank Dunia sebesar US\$6,85 per kapita per hari (PPP 2017). Angka ini digunakan untuk perbandingan global, bukan untuk kebijakan domestik. **Persentase Kemiskinan Ekstrem:** Menggunakan ambang batas kemiskinan ekstrem internasional yang lebih rendah (US\$2,15 per hari), sekitar 5,4% penduduk Indonesia termasuk dalam kategori ini pada tahun 2024. Di kawasan ASEAN, angka ini tertinggi kedua setelah Filipina. **Peringkat di ASEAN:** Secara regional di Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi yang relatif tinggi dalam hal kemiskinan ekstrem, di atas negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang mencatatkan angka mendekati nol persen. Penting untuk dicatat bahwa Pemerintah Indonesia, melalui BPS, menggunakan metodologi dan garis kemiskinan nasional berbasis kebutuhan dasar (cost of basic needs) yang menghasilkan angka yang berbeda secara signifikan (sekitar 8,57% pada September 2024). Untuk data spesifik Indeks Senjang Kemiskinan (Poverty Gap

Index) terbaru yang dapat dibandingkan secara global, dapat merujuk pada data resmi di situs World Bank Open Data atau Badan Pusat Statistik Indonesia. Data terkini yang tersedia di sumber-sumber tersebut untuk indeks ini adalah sekitar 1,71% pada tahun 2018. Indeks kemiskinan nasional Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47%, menurun dari September 2024 dan Maret 2024, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 23,85 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan ini terjadi hampir di seluruh wilayah, dengan kemiskinan perkotaan 6,73% (naik sedikit) dan pedesaan 11,03% (turun). Papua Pegunungan masih tertinggi (sekitar 30%), sementara Bali terendah (3,72%). Data Utama (Maret 2025) menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan Nasional: 8,47%, Jumlah Penduduk Miskin: 23,85 juta jiwa dan Garis Kemiskinan: Rp 609.160 per kapita per bulan, Perbandingan Wilayah, Perkotaan: 6,73% (naik sedikit dari Sept 2024), Pedesaan: 11,03% (turun dari Sept 2024). Tren & Konteks : Angka 8,47% merupakan yang terendah dalam dua dekade terakhir. Kemiskinan ekstrem menjadi fokus, dengan target pemerintah untuk menghapuskannya dalam lima tahun ke depan, meskipun standar garis kemiskinan ekstrem masih diperdebatkan.

11. **Sustainable Cities and Communities (Kota dan Permukiman Berkelanjutan).**

Target pada tujuan ini menekankan perencanaan kota yang baik dan menjamin akses terhadap transportasi umum. Sehingga menjadikan kota dan permukiman manusia yang inklusif, aman, dan berkelanjutan sembari melindungi warisan budaya. Pembaca nan-arif selalu mencari lembaga lain yang lebih kompeten daripada sekedar sumber yang ditemukan penulis makalah ini. Peringkat kota-kota di Indonesia dalam indeks kota berkelanjutan global sangat bervariasi tergantung pada metodologi indeks yang digunakan, dan umumnya kota-kota Indonesia tidak menempati posisi teratas secara global. Dalam indeks global seperti Arcadis Sustainable Cities Index, kota-kota di Indonesia, termasuk Jakarta, cenderung berada di peringkat menengah ke bawah atau bahkan tujuh terbawah dalam beberapa laporan historis, terutama dalam pilar tertentu seperti lingkungan (Planet). *Arcadis Sustainable Cities Index 2022/2024*: Kota-kota global terkemuka seperti Oslo dan Amsterdam menempati posisi teratas. Laporan ini memberi peringkat 100 kota di dunia berdasarkan tiga pilar (Planet, Manusia, dan Laba/Profit). Kota-kota Indonesia tidak secara eksplisit disebutkan di jajaran teratas. *Global Sustainability Index (Earth.Org, 2020)*: Indonesia secara keseluruhan menempati peringkat 151 dalam Indeks Keberlanjutan Global. Peringkat Nasional (UI GreenCityMetric): Di tingkat nasional, yaitu UI GreenCityMetric dari Universitas Indonesia secara khusus menilai dan memberi peringkat kota dan kabupaten di Indonesia berdasarkan kriteria keberlanjutan. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya dan kemajuan lokal. Peringkat Teratas Indonesia (2025) Kota Surabaya (Jawa Timur), Kota Madiun (Jawa Timur) dan Kota Semarang (Jawa Tengah). Penghargaan ASEAN: Lima daerah di Indonesia juga menerima penghargaan bergengsi dalam "The 6th ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award 2025", menunjukkan pengakuan regional terhadap upaya keberlanjutan tertentu. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian PPN/Bappenas, juga telah mengembangkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) sebagai instrumen pemantauan internal untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan global (SDGs) dan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Informasi lebih lanjut mengenai peringkat kota-kota di Indonesia dapat diakses melalui situs resmi UI GreenCityMetric atau laporan dari Bappenas.

12. **Responsible Consumption and Production (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).** Pembaca nan-arif selalu mencari lembaga lain yang lebih kompeten daripada sekedar sumber yang ditemukan penulis makalah ini. Tidak ada

satu "indeks kualitas konsumsi" tunggal yang digunakan secara universal di seluruh dunia. Kualitas hidup dan konsumsi masyarakat biasanya diukur melalui berbagai indikator komprehensif, terutama *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* atau *Human Development Index (HDI)*: *Peringkat Dunia*: Berdasarkan data UNDP (United Nations Development Programme) tahun 2022 (laporan terbaru yang tersedia dalam konteks perbandingan global), Indonesia berada di peringkat ke-113 dari 193 negara. *Peringkat Asia Tenggara*: Indonesia menempati peringkat ke-6 di Asia Tenggara. *Skor Terbaru Indonesia*: IPM Indonesia terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2025, BPS (Badan Pusat Statistik) melaporkan IPM Indonesia mencapai 75,90, yang termasuk dalam kategori "tinggi". Indeks Lain yang Relevan adalah : *Global Food Security Index (GFSI)*: Mengukur ketahanan pangan, ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas gizi. Pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara, dalam kategori moderat, tetapi masih di bawah rata-rata dunia. *Indeks Kualitas Hidup Numbeo*: Berdasarkan data Numbeo, indeks kualitas hidup di Indonesia berada di peringkat 74 dari 84 negara yang diranking pada tahun 2023. *Global Flourishing Index* (Studi Harvard): Sebuah studi oleh Harvard University yang dirilis pada tahun 2025 menempatkan Indonesia pada *peringkat pertama* di dunia dalam kategori *flourishing* (kondisi sejahtera yang mencakup kebahagiaan, kesehatan, makna hidup, dan koneksi sosial), mengungguli negara maju seperti AS dan Jepang.



Studi ini menekankan pentingnya hubungan sosial yang kuat di masyarakat Indonesia. Secara ringkas, Indonesia memiliki posisi yang beragam tergantung pada metrik yang digunakan. Indeks formal seperti IPM dan ketahanan pangan menunjukkan posisi menengah secara global, sementara studi tentang kesejahteraan subjektif dan hubungan sosial menempatkan Indonesia di peringkat yang sangat tinggi. Dalam hal mendorong pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, tujuan SDG

ini menekankan pentingnya efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah secara tepat, dan pengembangan produk ramah lingkungan. Tidak ada satu "indeks kualitas produksi" tunggal yang merangkum semua produk Indonesia secara global. Namun, berdasarkan data terkini, Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam hal nilai tambah manufaktur dan daya saing global. Berikut adalah beberapa metrik yang relevan untuk menilai kualitas dan posisi produksi Indonesia di dunia: *Peringkat Global Manufaktur (Manufacturing Value Added - MVA)*: Menurut data dari The Global Economy dan World Bank tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ke-12 dunia dalam hal MVA, dengan nilai tertinggi dalam sejarah negara tersebut. Capaian ini menempatkan Indonesia di atas negara-negara maju tertentu dan menjadi yang tertinggi di ASEAN. *Indeks Manajer Pembelian Manufaktur (PMI)*: PMI manufaktur Indonesia sering kali berada di zona ekspansi (di atas 50), bahkan memuncaki negara-negara ASEAN dan beberapa negara Asia lainnya seperti Korea Selatan dan Jepang pada waktu-waktu tertentu, yang menunjukkan aktivitas industri yang kuat dan berkelanjutan. *Daya Saing Global*: Dalam IMD World Competitiveness Ranking 2024, peringkat daya saing Indonesia naik signifikan ke posisi ke-27 dunia. Hal ini mencerminkan lingkungan bisnis dan produktivitas yang semakin baik. *Indeks Inovasi Global (GII)*: Indonesia menduduki peringkat ke-55 dari 139 negara dalam GII 2025 yang dirilis oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), menunjukkan adanya upaya peningkatan inovasi dalam produksi. *Persepsi Kualitas*: Opini publik global tentang citra produk dan jasa Indonesia diukur dalam Indeks Citra Indonesia, yang mencakup pandangan tentang kualitas hidup dan lingkungan bisnis. Secara

keseluruhan, Indonesia menunjukkan kinerja yang positif dalam volume produksi dan daya saing ekonomi global, meskipun tantangan dalam kualitas SDM dan inovasi masih menjadi fokus perbaikan berkelanjutan.

13. **Climate Action (Penanganan Perubahan Iklim).** Untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, tujuan ini berupaya mengambil tindakan sesegera mungkin, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan mitigasi bencana alam. Pembaca nan-arif selalu mencari lembaga lain yang lebih kompeten daripada sekedar sumber yang ditemukan penulis makalah ini. Peringkat aksi perubahan iklim Indonesia di dunia, berdasarkan Indeks Kinerja Perubahan Iklim (CCPI) 2026, berada di posisi ke-43 dari 63 negara dan Uni Eropa yang dinilai. Peringkat ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan kinerja keseluruhan yang rendah. Indeks Kinerja Perubahan Iklim (CCPI), yang diterbitkan oleh Germanwatch, NewClimate Institute, dan CAN International, menilai kinerja negara-negara dalam empat kategori utama: Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Indonesia menerima peringkat rendah (low). Energi Terbarukan: Peringkat rendah. Penggunaan Energi: Peringkat rendah. Kebijakan Iklim: Peringkat rendah. Pada tahun 2024, peringkat Indonesia dalam CCPI turun dari posisi ke-26 ke posisi ke-36, dan kemudian kembali turun ke peringkat 43 pada laporan CCPI 2026. Selain CCPI, laporan terpisah dari Climate Action Tracker (CAT) pada tahun 2023 menilai kebijakan dan target iklim Indonesia sebagai "sangat tidak memadai" (*critically insufficient*) untuk membatasi pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celcius, yang merupakan penurunan peringkat dari tahun sebelumnya yang "sangat tidak cukup" (*highly insufficient*). Penurunan ini sebagian disebabkan oleh peningkatan penggunaan batu bara dalam hilirisasi pertambangan. Meskipun peringkatnya rendah dalam beberapa indeks global, Indonesia telah menunjukkan upaya dalam beberapa aspek: Penurunan Deforestasi: Indonesia berhasil menurunkan angka deforestasi ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Komitmen NDC: Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan upaya sendiri pada tahun 2030, dan akan meningkatkan komitmen tersebut melalui NDC yang diperbarui. Peran Internasional: Indonesia aktif dalam forum internasional, termasuk sebagai Ketua Bersama Koalisi Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim, untuk mendorong pemahaman dan tanggung jawab bersama dalam penanganan iklim. **Dukungan Masyarakat:** Sebuah survei global menunjukkan bahwa 91% masyarakat Indonesia sangat mendukung upaya pengurangan dampak perubahan iklim, tertinggi di antara 17 negara yang disurvei. Para ahli iklim menekankan perlunya kecepatan dan upaya yang lebih besar dalam transportasi umum, pengurangan metana, dan jalur menuju nol emisi bersih (net zero). Detail lebih lanjut mengenai metodologi dan hasil CCPI dapat dilihat pada situs resmi Climate Change Performance Index.
14. **Life Below Water (Ekosistem Lautan).** Penekanan pada perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, juga menjadi salah satu fokus SDGs, relevan bagi negara kelautan NKRI nan-luas. Untuk mencapai tujuan ini, prioritas ada pada pelestarian ekosistem laut, pemanfaatan sumber daya maritim, sampai pada pengurangan limbah plastik, serta pengendalian praktik perikanan yang merugikan. Pembaca nan-arif selalu mencari lembaga lain yang lebih kompeten daripada sekedar sumber yang ditemukan penulis makalah ini. Indonesia memiliki indeks kesehatan laut (Ocean Health Index/OHI) dengan skor 66 dari 100, yang menempatkannya pada peringkat 168 dari 220 wilayah di dunia, lebih rendah dari skor rata-rata global sebesar 72. Peringkat ini menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam mengelola kualitas kehidupan bawah air meskipun Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut global. Peringkat Global: Berdasarkan data terbaru

(sekitar tahun 2023-2024), skor kesehatan laut Indonesia menempatkannya pada posisi yang relatif rendah secara global. Keanekaragaman Hayati: Di sisi positif, Indonesia adalah rumah bagi keanekaragaman hayati laut terbesar kedua di dunia, dengan sekitar 76% spesies karang dunia dan 37% spesies ikan karang berada di perairannya. Kualitas Air dan Pencemaran: Skor yang rendah dalam indeks kesehatan laut sebagian besar dipengaruhi oleh masalah pencemaran. Diperkirakan sekitar 75% laut Indonesia tergolong sangat tercemar di beberapa wilayah, dan Indonesia menempati peringkat kedua sungai paling tercemar di Asia. Indikator Utama: Indikator dengan nilai rendah dalam penilaian OHI untuk Indonesia mencakup laut bersih, perlindungan spesies dan tempat ikonik, serta penyimpanan karbon, yang menunjukkan dampak dari aktivitas berlebihan di area pesisir dan polusi. Upaya Perbaikan: Pemerintah Indonesia telah menyusun Peta Jalan Ekonomi Biru dan berbagai program konservasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan menargetkan perbaikan kualitas lingkungan. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati bawah air yang luar biasa, namun menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan dan pencemaran yang berdampak pada indeks kualitas kehidupan bawah airnya di dunia.

- 15. Life on Land (Ekosistem Daratan).** Upaya melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan dimulai dengan tindakan mengelola hutan secara tepat, menjaga biodiversitas, dan keanekaragaman hayati, amat relevan bagi NKRI yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan ekosistem berbeda. Pembaca nan-arif selalu mencari lembaga lain yang lebih kompeten daripada sekedar sumber yang ditemukan penulis makalah ini. Tidak ada satu "indeks kualitas ekosistem daratan" tunggal yang digunakan secara universal secara global, namun kondisi ekosistem daratan Indonesia sering dinilai melalui berbagai metrik lingkungan internasional dan nasional. Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas): Setelah terdegradasi 70 tahun, Indonesia ternyata masih menempati peringkat teratas di dunia untuk keanekaragaman hayati. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia secara keseluruhan, dan peringkat pertama untuk agro-biodiversitas jika digabungkan antara laut dan darat. Luas Hutan: Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan area hutan terluas di dunia, menempati peringkat ke-8 secara global, dengan sekitar 51,2% dari total daratan Indonesia adalah area berhutan (perkiraan 2022). Indeks Kinerja Lingkungan (EPI): Dalam laporan *Environmental Performance Index* (EPI) yang dirilis oleh Yale dan Columbia University, peringkat keseluruhan Indonesia cenderung rendah dan terus merosot, bahkan sempat masuk dalam *20 negara terburuk* di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan peringkat ini mencakup berbagai kategori, termasuk kesehatan ekosistem dan vitalitas ekosistem. Indeks Kinerja Perubahan Iklim (CCPI): Peringkat Indonesia dalam *Climate Change Performance Index* (CCPI) 2024 juga mengalami penurunan signifikan, dari peringkat 26 ke peringkat 36 secara global, sebagian karena penilaian rendah dalam kebijakan iklim dan emisi gas rumah kaca. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengukur menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL, atau Indeks Kualitas Tutupan Lahan/IKTL). Nilai IKLH nasional meningkat tipis dari tahun ke tahun di Indonesia, dengan sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota mencapai target yang ditetapkan pemerintah, namun hal ini adalah metrik internal untuk mengukur kinerja pengelolaan lingkungan di dalam negeri, bukan peringkat

global. Hutan primer sebagai sumber / bahan industri obat-obatan akan diwariskan kepada anak-cucu bangsa, sehingga harus menjadi agenda utama tiap Kabinet..

16. **Peace, Justice, and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh).** Pada tujuan SDGs ke-16 ini adalah untuk mendorong masyarakat yang damai, menyediakan akses terhadap keadilan untuk semua, dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Sehingga akan menguatkan sistem hukum yang adil dan memberantas praktik korupsi. Pembaca nan-arif selalu mencari lembaga lain yang lebih kompeten daripada sekedar sumber yang ditemukan penulis makalah ini. Indonesia tidak memiliki satu "indeks keamanan dan keadilan" tunggal yang diakui secara internasional, namun kinerjanya diukur dalam berbagai laporan global yang relevan. Berdasarkan laporan terbaru tahun 2024 dan 2025, peringkat Indonesia adalah sebagai berikut. Indeks Keamanan (Safety/Peacefulness): Gallup's Law and Order Index 2025: Indonesia menempati peringkat ke-19 secara global dari 144 negara, dengan skor 89, *menunjukkan tingkat rasa aman yang tinggi di masyarakat*. Dalam hal persepsi keamanan pribadi (*merasa aman berjalan sendirian di malam hari*), Indonesia berada di peringkat ke-25 dunia. Global Peace Index (GPI) 2024: Indonesia berada di peringkat ke-48 dari 163 negara. Peringkat ini mengukur tingkat perdamaian secara keseluruhan, termasuk keselamatan dan keamanan sosial, konflik domestik dan internasional, serta militerisasi. The Global Safety Report 2025: *Indonesia berada di peringkat ke-25 sebagai negara teraman di dunia dari 144 negara yang disurvei*. Indeks Keadilan (Justice/Rule of Law) mencakupi World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2024: Indonesia menempati peringkat ke-66 penegakan-hukum dari 142 negara di seluruh dunia. Di tingkat regional Asia Timur dan Pasifik, Indonesia berada di peringkat ke-9 dari 15 negara. Indeks Pemberantasan Korupsi: Dalam laporan Transparency International Corruption Perception Index (CPI) 2024, Indonesia berada di peringkat ke-37, menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum terkait korupsi. Secara ringkas, Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif kuat dalam aspek keamanan dan ketertiban umum berdasarkan survei persepsi masyarakat, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek keadilan formal dan pemberantasan korupsi menurut indeks penegakan hukum.

17. **Partnerships for the Goals (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).** Tujuan SDG Terakhir, dalam penyempurnaan ke-17, SDGs menargetkan penguatan dan revitalisasi (menghidupkan kembali) kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan dengan kolaborasi semua pihak. Fokus tujuan mengarah pada pengembangan kapasitas, transfer teknologi, dan dukungan keuangan untuk memastikan keberlanjutan. Pembaca nan-arif selalu mencari lembaga lain yang lebih kompeten daripada sekedar sumber yang ditemukan penulis makalah ini. Indonesia tidak memiliki indeks kemitraan (SDG 17) tunggal yang diperingkat secara terpisah secara global, namun kemajuan kemitraan global diukur sebagai bagian dari Indeks Pembangunan Berkelanjutan (SDG Index) keseluruhan, di mana Indonesia berada di peringkat ke-77 secara global pada tahun 2024. Menurut *Sustainable Development Report* (Laporan Pembangunan Berkelanjutan) terbaru yang diterbitkan oleh *Sustainable Development Solutions Network* (SDSN), Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap pencapaian SDGs secara keseluruhan: Peringkat Global: Indonesia berada di peringkat ke-77 dari 193 negara pada tahun 2024, dengan skor indeks SDG 70,22 dari 100. Skor ini meningkat dari tahun sebelumnya, menunjukkan tren positif dalam kemajuan pembangunan berkelanjutan. Capaian



Indikator: Hingga tahun 2024, Indonesia telah memenuhi sekitar 61,4% hingga 62,5% dari target indikator SDGs nasionalnya, *angka yang jauh di atas rata-rata global*. Peringkat Regional: Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara yang paling berkomitmen di Asia-Pasifik untuk memajukan SDGs. Aspek kemitraan global ini mencakup berbagai bentuk kerja sama, pendanaan, dan akses teknologi, bukan diukur dengan satu indeks peringkat yang berdiri sendiri, melainkan melalui keterlibatan aktif dan hasil kolaborasi: Keterlibatan Internasional: Indonesia aktif terlibat dalam 38 perjanjian perdagangan internasional dan berbagai forum global, yang menunjukkan peran aktifnya dalam kerja-sama global. Pendanaan Inovatif: Indonesia terpilih oleh Dana Bersama SDG PBB (*Joint SDG Fund*) sebagai salah satu dari empat negara yang menerima pendanaan untuk proyek-proyek investasi hijau dan sosial. Pelaporan Transparansi: Indonesia secara konsisten melaporkan kemajuan ber SDG di tingkat global melalui *Voluntary National Review (VNR)* sejak tahun 2017 sampai akhir 2025, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi SDGs. Platform Kemitraan Domestik: Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian PPN/Bappenas, menekankan prinsip kemitraan inklusif yang melibatkan empat platform partisipasi: pemerintah, akademisi, filantropi/pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil, yang memperkuat landasan kemitraan domestik untuk mendukung kerja sama internasional. Secara keseluruhan, Indonesia menunjukkan kinerja yang baik dalam membangun kemitraan untuk mencapai SDGs, yang tercermin dalam peringkat indeks SDGs nasionalnya yang terus membaik dan pengakuan internasional atas komitmennya. Detail lebih lanjut dapat ditemukan dalam *Laporan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia* terbaru. Laporan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Republik Indonesia kepada PBB, yang sering disebut sebagai *Voluntary National Review (VNR)*, merupakan suplemen LAKIP tahunan, merinci kemajuan Indonesia dalam mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Laporan ini disusun berdasarkan 4 pilar utama yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Secara umum, rincian kandungan laporan VNR atau SDG NKRI tersebut mencakupi:

1. Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang komitmen Indonesia terhadap SDGs, landasan hukum (seperti Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017), maksud dan tujuan pelaporan, serta sistematika laporan.
2. Tinjauan Pelaksanaan dan Kerangka Kelembagaan. Bagian ini menjelaskan mekanisme koordinasi di tingkat nasional dan daerah, peran berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, filantropi, pelaku usaha, masyarakat sipil, akademisi), dan penyelarasan agenda SDGs dengan kebijakan pembangunan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
3. Rincian Capaian Berdasarkan Pilar dan Tujuan. Ini adalah inti laporan yang menyajikan data dan analisis kemajuan untuk setiap tujuan, sering kali dikelompokkan ke dalam 4 pilar:
 - Pilar Pembangunan Sosial: Mencakup Tujuan 1 hingga Tujuan 5 (Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender).
 - Pilar Pembangunan Ekonomi: Mencakup Tujuan 7 hingga Tujuan 10 serta Tujuan 17 (Energi Bersih dan Terjangkau, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, Berkurangnya Kesenjangan, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).
 - Pilar Pembangunan Lingkungan: Mencakup Tujuan 6, Tujuan 11 hingga Tujuan 15 (Air Bersih dan Sanitasi Layak, Kota dan Permukiman Berkelanjutan,

Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan).

- Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola: Mencakup Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).

Dalam setiap tujuan pada 17 tujuan SDG, laporan SDG NKRI merinci:

- Target dan Indikator: Penyesuaian indikator global agar sesuai dengan konteks nasional.
- Metodologi dan Data: Penggunaan data statistik resmi (misalnya dari BPS) untuk mengukur capaian.
- Program dan Kegiatan: Inisiatif konkret yang telah dan sedang dilaksanakan oleh berbagai pihak.
- Tantangan dan Kendala: Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, seperti ketersediaan data atau dampak pandemi.

4. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut. Bab penutup berisi rangkuman kemajuan, tantangan utama yang perlu diatasi, dan rekomendasi langkah-langkah strategis serta rencana kerja di masa mendatang untuk mempercepat pencapaian SDGs.

Performa pelaporan SDG NKRI kepada PBB amat memuaskan. Laporan lengkap VNR Indonesia dapat diakses sidang-pembaca makalah ini melalui portal resmi Kementerian PPN/Bappenas atau situs PBB di Indonesia

Inilah utopia ber SDG. Di masa depan, agar memudahkan Kabinet-Baru ber SDG, pembentukan judul/nomenklatur Kementerian semoga makin disesuaikan dengan tiap butir-tujuan SDG PBB, tupoksi tiap kementerian/lembaga semoga makin bias-cermin dengan 169 Program SDG. Desain LAKIP Kepemerintahan yang terbaru semoga mengutamakan pelaksanaan 169 Program SDG PBB dan dampaknya pada peringkat SDG NKRI, untuk menjamin NKRI tidak tertinggal dalam lomba SDG Global antar-bangsa.

BAPPENAS menyadari bahwa suatu nomor pada 169 program SDG mungkin mesti dilakukan beberapa K/L cq kerjasama K/L/Pemda sesuai bidang-tugas K/L/Pemda.

Bentuk kerjasama/sinergistik antar K/L dan Pemda untuk pelaksanaan tiap butir program SDG tersebut di atur /di koordinasi BAPPENAS.

Tiap K/L, Provinsi dan Pemda wajib memiliki suborganisasi VNR/SDG NKRI yang menjadi *liasson* / perwakilan K/L dalam komunikasi horizontal dan wajib-hadir tiap rapat SDG berkala BAPPENAS.

Presiden di dampingi BAPPENAS, menyelenggarakan rapat berkala SDG tingkat Kabinet dan memberi pengarahan bagi K/L.

BAPPENAS selalu melakukan *check & recheck* dan menjamin bahwa 169 program SDG telah di laporkan setiap K/L/Pemda pelaksana program, BAPPENAS semoga makin mudah mengoordinasi berbagai unsur tujuan & program SDG PBB karena telah ada pada struktur organisasi & tupoksi tiap K/L menjadi Evaluasi dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja SDG Nasional Tahunan kepada DPR.

Jayalah NKRI !

Jakarta, 25 Desember 2025.

